



UNIVERSITAS INDONESIA

MENEMPATKAN KEMBALI KOPERASI PETANI SEBAGAI GERAKAN  
TANI  
(Studi Kasus Koperasi Petani Ciwangun)

TESIS

DIDI NOVRIAN.S  
0906588832

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
DEPOK  
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

MENEMPATKAN KEMBALI KOPERASI PETANI SEBAGAI GERAKAN  
TANI  
(Studi Kasus Koperasi Petani Ciwangun)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master of  
Science (M.Si)

DIDI NOVRIAN.S  
0906588832

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
DEPOK  
JUNI 2012



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ithromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022  
E-mail: pascent@gmail.com

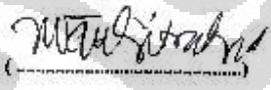
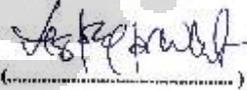
### HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Didi Novrian S.  
NPM : 0906588832  
Program Studi : Antropologi  
Judul Tesis : **Menempatkan Kembali Keperami Petani Sebagai Gerakac Tani  
(Studi Kasus Keperami Petani Ciwaagna)**

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	IWAN THIRADJAJA, Ph.D	
PEMBIMBING	SURAYA ABDULL WAHAB AFIFF, Ph.D	
PENGUJI	DR. TONY RUDYANSJAH, MA	
PENGUJI	DR.DRS SEMIARTO PURWANIO, MSI	

Ditapkan di : Depok  
Tanggal : 6 Juni 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Didi Novrian.S

NPM : 0906588832

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan semua hal untuk penulis agar dapat menyelesaikan karya ini. Tulisan ini adalah persembahan untuk Nenek Nurmala (almh) yang mendidik hari-hari masa kecil ku, dan Ibunda serta Ayahanda Syafrida dan Syafardi, *my heroes*, yang telah membesarkanku dengan ikhlas, dan merelakan semuanya untuk menyekolahkan empat orang anaknya. Selanjutnya kepada Adik-adik ku tercinta, Jimmy, Ayu, “kamba” Zuhendra dan Zulhandri. serta ponakanku Lakesha Putri Humayra. Semoga Tuhan selalu mengikat kita dalam persaudaraan tiada henti hingga masa akhir hayat.

Vica Tri Septianty, “maafkan aku kalau telah mengambil waktu kita bersama untuk terus didepan laptop dan tumpukan buku-buku selama engkau merawat calon anak kita”, dan terima kasih banyak atas dorongan yang engkau berikan dengan kasih sayang saat-saat penulisan tesis ini dilakukan. Juga kepada Ibu Ety Sri Rahayu dan Bapak Siswanto di Bandung, Mbak Ririn dan A Maman serta dikecil Mara, Mbak Aknes dan Daniel serta di kecil Kalika, yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akademik ini.

Karya ini, juga penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih tak berhingga kepada semua guru di Pasca Sarjana Antropologi Universitas Indonesia, terutama kepada Mbak Ncur (Dr Suraya Affif) sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberi masukan, usulan, komentar, dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan tesis ini. kepada Pak Iwan Tjitrajadja yang telah banyak memberi masukan berharga dari segi metodologis, Pak Tony Rudijansah guru senam otak yang mengenalkan Marxist Antropologi kepada penulis, Mas Aji (Semiarto Aji) yang telah bersedia membaca tuntas dan memberi coretan-coretan berharga di lembaran draft tulisan ini, Profesor Ahmad Fedyani, Bu Yunita, Bu Sulis, Pak Hariyadi, Bu Jasmine. Dan juga kepada teman-teman Antroponista Pasca Sarjana Antropologi Universitas Indonesia, Kartika Handayani, Kartika Pamungkas, Wenny, Joko, Nosa Normanda, Sipin, Erna, Ismail, Icha, Tina Napitupulu, Andi Achdian, Kesep, Mbak Mona, Pak Farid, dan semua kawan-kawan diskusi di Takor.

Kepada Guru, Sahabat, dan Kakak ku yang sangat ku hormati, Noer Fauzi Rachman-Mbak Ita, dan Moh Sohibuddin-Mbak Faiz, tidak ada kata-kata yang pantas untuk

menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam. Mas Luthfi, Mbak Ana, Pak Pri, Mbak Dina, Mas Dian, Mbak Lela, Bang Udink, Indah, Da Wong, Mbak Ika, Mas Eko Cahyono, Ayuk Ana, Risman Buamona, Rudi, Uie, Cupi, Mbak Laksmi, Yenny, Cindra, Uus, Nunik, Kang Ajid, Hasan, dan semua keluarga di Studio Studi Agraria Indonesia Sajogyo Institute, penulis ucapkan terima kasih tak terhingga, terutama Pak Pri, Mas Dian, Mas Luthfi dan Da Wong (Surya Saluang) yang telah membantu berdiskusi saat penulis mengalami otak buntu selama menulis tesis ini.

Mas Yoyo (Hendro Sangkoyo) dan kawan-kawan di Sekolah Demokratika Ekonomika, yang telah banyak berbagi ilmu, inspirasi dan ide-ide nya pada setiap pertemuan-pertemuan singkat kita. Juga kepada Duo Jagoan Parompong (Mas Bambang TD, dan Kang Yufik), terima kasih atas ide-ide liar nya yang menakjubkan.

Mbak Wiwin, Mbak Wati, Mbak Tina, Mas Tomy di administrasi departemen yang telah bersedia membantu banyak untuk proses selama kuliah di Departement Antropologi Universitas Indonesia, untuk mereka, penulis berharap agar selalu diberikan terus menerus berkat dan rahmat Tuhan, semoga ketulusan membantu kawan-kawan mahasiswa mendapat ganjaran yang setimpal untuk kebahagiaan mereka.

Terima kasih tak terhingga penulis haturkan untuk keluarga Ibu Kumala dan Bapak Siswanto serta tiga orang bidadari mereka yang telah banyak membantu penulis hingga selesainya tesis ini, juga kepada Bu Fery, dan Mas Joko, terima kasih atas banyak pelajarannya selama ini.

Karya ini juga merupakan hasil diskusi banyak dengan Pak Daniel Fernandez dan keluarga di Depok, teman, sahabat, yang sering penulis repotkan dengan segala urusan-urusan selama menjalani perkuliahan di Universitas Indonesia ini. Dan terima kasih juga penulis sampaikan untuk semua kawan-kawan dosen pengajar di Universitas HAMKA.

Eyang Profesor Sajogyo dan Pak Dr (HC) Gunawan Wiradi, dan Prof Tjondronegoro, semoga keteladanan mu dapat kami ikuti sebagai pewaris tradisi ilmu yang engkau wariskan untuk kami.

Terima Kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Pak Nandang dan Umi di Tasikmalaya, Kang Umar dan teteh, Pak Haris, Pak Nana, Pak Jaja, Pak Yaya, dan semua keluarga-keluarga di Koperasi Petani, semoga perjuangan koperasi petani itu tak berhenti hingga generasi sekarang. Guru-guru di Serikat Petani Pasundan Teh Linda, Epul, Beno, Edy, Bang Boy

Fidro, Indra dan sikecil Ayudra. Serta semua kawan-kawan ku pelajar-pejuang petani di Sekolah Serikat Petani Pasundan di Pasawahan. Juga kepada kawan-kawan aktivis SPP Tasikmalaya Yayan, Erni, Lala, Asep, Usep, Andi, Iwa, kang Ibang dan Teh Nisa, serta Kang Agustyana (Sekjen SPP) semoga perjuangan untuk kesejahteraan kaum tani terus menerus diwariskan pada generasi selanjutnya. Kawan-kawan di Konsorsium Pembaruan Agraria (Bogel, Iwan, Dewi Kartika), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (Mas Dodo, Rija, Cimot, Imam, Mas Monti, Mas Ganden), Kiara (Riza Damanik dan Halim), Forest Watch (Mas Yoyon), dan semua aktivis dan pegiat agraria di Indonesia.

Karya ini tentu masih jauh dari sempurna, karena ini adalah awal dari proses selanjutnya yang akan dilalui. Semua kekurangan dan kelemahan dari hasil studi inii adalah bentuk dari percobaan-percobaan penulis dalam berusaha menemukan jalur yang akan dilalui kedepan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari semua guru-guru, dan kawan-kawan. Semoga Ilmu Pengetahuan yang telah didapat selama di Program Pasca Sarjana Antropologi Universitas Indonesia ini dapat berguna bagi kepentingan rakyat.

**PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMPUBLIKASIKAN TESIS UNTUK  
KEPERLUAN DAN TUJUAN AKADEMIS**

---

Sebagai akademisi dari Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didi Novrian.S  
NPM : 0906588832  
Program : Pasca Sarjana  
Department : Anthropologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Tulisan : Tesis

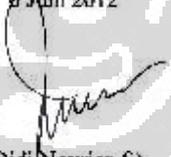
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, maka dengan ini saya memberikan persetujuan kepada Universitas Indonesia untuk Hak Non-eksklusif Royalti Bebas pada tesis saya yang berjudul:

Menempatkan Kembali Koperasi Petani sebagai Gerakan Tani (Studi Kasus Koperasi Petani Ciwangun)

Kesediaan ini, juga termasuk semua dokumen dan bahan pendukung (jika diperlukan). Dengan Hak Non-eksklusif Royalti Bebas ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, format, transfer, mengelola dalam bentuk database, memelihara, dan mempublikasikan tesis ini tanpa izin lebih lanjut saya dengan ketentuan bahwa nama saya dinyatakan sebagai penulis dan pemilik hak kekayaan intelektual.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Depok  
6 Juni 2012

  
(Didi Novrian.S)

## ABSTRAK

Nama : Didi Novrian.S  
Program Studi : Antropologi  
Judul : Menempatkan Kembali Koperasi Petani sebagai Gerakan Tani (Studi Kasus Koperasi Petani Ciwangun)

Penjelasan yang dipaparkan didalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang gerakan tani. Bukan hanya perluasan model gerakan tani, tetapi juga perluasan imajinasi dan praktek gerakan petani didalam usaha mereka mencapai cita-cita kesejahteraan sosial. Dalam memberikan perluasan pemahaman itu, memaknai gerakan petani oleh petani sendiri menjadi hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh kasus Koperasi Ciwangun, dipilih sebagai kasus uji bagi perluasan cara baca tentang gerakan petani. Koperasi, didalam historiografi akademis gerakan sosial tidak mendapat tempat yang menggolongkannya sebagai gerakan. Penelitian yang ditampilkan dalam kasus uji ini justru menegaskan bahwa koperasi petani adalah bagian dari gerakan tani. Karena dengan koperasi inilah, mereka tetap bertahan melewati badai politik Indonesia yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Kata kunci:  
Gerakan Tani, Gerakan Sosial, Koperasi Petani.

## ABSTRACT

Name : Didi Novrian.S  
Study Program : Anthropology  
Title : Repositioning Peasant Cooperative as Peasant Movement  
(Case Study in Ciwangun Peasant Cooperative)

The aim of the explanation in this research to give broader understanding about peasant movement. Not only broader model of peasant movement, but also broader imagination and peasant movements practice in their efforts to gain the social welfare goal. In giving the broader understanding, to comprehend the peasant movement by the peasant itself become the significant thing that cannot be neglected. Koperasi Ciwangun is chosen as the case study for the broader understanding on peasant movement. The cooperative, in social movement historical academic do not obtain a place to be classified as a movement in this case study, but as peasant movement. Because through this cooperation, they are enabled to endure from the ups and downs of politic in Indonesia.

Key words  
Peasant Movement, Social Movement, Peasant Cooperative.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
..... 1.1 Latar Belakang	1
..... 1.2 Petani dan Kemiskinan	4
..... 1.3 Apa yang Dianggap Gerakan dan “bukan” Gerakan	8
..... 1.4 Apa yang disebut dengan Gerakan Petani?	16
..... 1.5 Duduk Perkara Gerakan Petani Dalam Studi Gerakan Sosial	19
..... 1.6 Signifikansi Penelitian	26
..... 1.7 Metode dan Metodologi	27
<b>2. DISANA TIDAK ADA GERAKAN PETANI, HANYA KOPERASI PETANI .....</b>	<b>31</b>
2.1 Kekalahan Perang Jawa dan Suplai Tenaga Kerja ke Priangan .....	32
2.2.....	B
berdirinya Perkebunan Ciwangun.....	35
2.3 Berdirinya Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun.....	43
2.4 Masa Pengembangan Koperasi Ciwangun.....	54
<b>3. LATAR SEJARAH, MUNCUL DAN TENGGELAMNYA GERAKAN TANI DI INDONESIA .....</b>	<b>63</b>
3.1 Gerakan Petani dan Penindasan VOC .....	63
3.2 Peran Komunisme di Indonesia hingga 1933 .....	71
3.3 Masa Depresi Politik, Penjajahan Jepang hingga 1945 .....	82
3.4 Pasca Kemerdekaan hingga Polemik Pelaksanaan UUPA .....	92
3.5 Pembungkaman Gerakan dan “kebangkitan” Pasca Orde Baru .....	103
<b>4. MEMAKNAI GERAKAN PETANI MELALUI KOPERASI .....</b>	<b>110</b>
..... 4.1 Awal Tumbuhnya Koperasi di Indonesia	112
..... 4.2 Koperasi Tahun 1930-an hingga 1950	119
..... 4.3 Koperasi Pada Masa Transisi (1950-1960)	128
..... 4.4 Koperasi Pada Masa Peralihan Politik (1960-1965)	135
..... 4.6 Masa Depolitisasi Koperasi oleh Orde Baru	141
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>149</b>
<b>6. DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*“a campesino comes from the countryside. There have always been campesinos. What did not exist before were investors, industrialists, political parties, etc. Campesinos have always existed and they will always exist. They will never be abolished” (Desmarais 2007, 19).<sup>1</sup>*

Pada penghujung tahun 2009, saya hadir sebagai peserta dalam sebuah pertemuan nasional tentang reforma agraria yang diadakan di Jakarta. Ruangan besar dengan kapasitas 200 orang tersebut telah dipenuhi oleh aktivis-aktivis gerakan agraria, petani, pedesaan, masyarakat adat, dan kelihatannya juga dari aktivis Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. Pada forum tersebut telah duduk beberapa orang sebagai pembicara dan nara sumber dari acara pertemuan nasional itu. Mereka adalah kalangan-kalangan akademisi, pemimpin serikat tani terkenal di Indonesia, dan pejabat pemerintahan dari bagian yang mengurus soal “tanah”.

---

<sup>1</sup> Kalimat ini terdapat didalam: Desmarais. *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasant*. Point Black, NS and London; Fenwood Books & Pluto Press. Halaman 19. Terjemahan bebas dari kutipan ini adalah “Petani (campesino) akan selalu tetap ada di pedesaan, mereka telah ada sebelum datangnya investor, industrialias, partai politik, dan lainnya, kaum petani akan tetap ada dan akan selalu ada, mereka tidak akan bisa dihilangkan”.

Acara kemudian berlangsung selama lebih kurang 3 jam, masing-masing narasumber mempresentasikan makalahnya tentang bagaimana menyelesaikan problem agraria dan kemiskinan pedesaan Indonesia yang angkanya masih sangat tinggi. Narasumber kemudian menjelaskan tentang problem agraria dan kemiskinan pedesaan, ada yang memakai tabel-tabel dengan angka-angka kecil yang tidak terlihat dari meja pendengar, ada yang memakai foto-foto yang menggambarkan kondisi pedesaan di Indonesia, dan ada pula yang memakai kutipan-kutipan berbahasa Inggris, yang jika tidak diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, mungkin tidak banyak dimengerti oleh sebagian peserta.

Ketika sesi tanya jawab tiba, semua orang yang telah diberikan waktu bertanya oleh moderator memperkenalkan dirinya. Sebagian menceritakan pengalaman mereka didalam organisasi yang mereka ikuti, serta aksi-aksi yang mereka lakukan (terutama aksi pendudukan tanah) diatas tanah-tanah perkebunan, dan kehutanan pasca 1998. Setelah itu mereka akan ditanggapi oleh nara sumber yang sebelumnya telah mempresentasikan makalah mereka tentang solusi bagi penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan semacam sarasehan, yang diikuti oleh sebagian besar peserta yang hadir pada acara pertemuan nasional itu. Pejabat pemerintahan dari kantor pertanahan tidak ikut, mungkin sibuk, atau mungkin dia hanya sengaja datang dan didatangkan sebagai pembicara pada sesi pertama. Dalam pertemuan sarasehan itu, dirumuskanlah beberapa rencana aksi untuk memperingati hari tani yang akan jatuh pada tanggal 26 September. Rencana aksi tersebut membahas seputar merancang aksi demonstrasi, dan membuatnya agar menarik opini media massa.

Diakhir pertemuan, pemimpin rapat mengidentifikasi keikutsertaan dari organisasi-organisasi yang akan dicantumkan namanya didalam brosur kampanye yang akan di sebar ketika aksi demonstrasi nanti. Bagian terakhir inilah yang paling penting dari rangkaian acara pertemuan para aktivis. Karena, masalah representasi adalah sesuatu yang sangat dihargai. Si penulis brosur akan disalahkan jika tidak mencantumkan nama organisasi atau salah menuliskan nama organisasi yang terlibat didalam aksi demonstrasi. Atau dengan kata lain, menulis

nama organisasi di brosur kadang lebih penting dari pada isi dari brosur kampanye itu sendiri.

Setelah rapat, saya berbincang dengan dua orang peserta sarasehan yang sepertinya tidak sempat mengutarakan pendapatnya pada pertemuan yang baru saja selesai. Dilihat dari penampilannya dia berumur sekitar 50-an, suaranya parau, dengan logat sunda yang sangat kental, dia berasal dari Tasikmalaya. Ketika saya bertanya tentang asal organisasinya, dia menggelengkan kepala, dia tidak berasal dari organisasi manapun, dia hanya anggota koperasi petani di sebuah desa di selatan Kabupaten Tasikmalaya. Dia datang ke acara tersebut karena diajak oleh temannya sesama petani yang tergabung didalam salah satu gerakan petani yang cukup populer di Indonesia. Sore itu, dia bercerita tentang koperasi petani yang dia maksud, yang melakukan sebuah inisiatif untuk melakukan seperti yang dibahas didalam acara seminar dan sarasehan diatas, yaitu “bercita-cita memperbaiki nasib rakyat petani Indonesia”, tetapi, sekali lagi, koperasi ini bukan lah bagian dari apa yang disebut sebagai gerakan tani pada pertemuan itu.

Lantas saya berpikir, apakah rapat-rapat nasional seperti yang baru saja terjadi adalah representasi dari keseluruhan petani yang ada dalam masalah yang sama di banyak wilayah di Indonesia? lalu bagaimana dengan petani-petani yang tidak ikut didalam organisasi, atau mereka memiliki organisasi tetapi tidak bisa tampil karena tidak memiliki cantolan dengan organisasi “perantara” tingkat nasional seperti yang baru saja dilakukan? Atau bagaimana dengan petani-petani yang kondisinya sama-sama berada dalam ketertindasan, mereka melawan -bukan seperti perlawanan sehari-hari dan bukan juga perlawanan terbuka- tetapi dalam suatu tindakan subversi melalui aktivitas produksi perkebunan (yang memiliki HGU) yang seolah-olah patuh pada rezim dan dilakukan melalui serangkaian rencana yang tersusun?

Pertanyaan diatas, pada kelanjutannya, menjadi rencana penelitian saya pada pertengahan tahun 2011 di tempat dimana lokasi Koperasi itu berada. Jawaban dari pertanyaan yang ajukan diatas, dijawab melalui pemaparan hasil penelitian yang akan dibagi dalam beberapa bagian penjelasan berikut. Bagian pertama, akan disampaikan tentang duduk perkara dari memahami gerakan petani, bagian ini memaparkan pendapat-pendapat dari literatur-literatur yang telah

membahas tentang gerakan petani, sehingga dapat memberikan alas bagi melihat gerakan petani bukan sebatas “aksi pemberontakan” tetapi juga “inisiatif”.

Bagian kedua, akan memaparkan cerita tentang inisiatif petani yang tidak dianggap gerakan, yaitu koperasi petani di Ciwangun, Tasikmalaya. Penjelasan ini akan memberikan gambaran utuh tentang sebuah gerakan “perlawanan” dengan penguatan organisasi produksi” bukan “aksi massa” dan aksi-aksi dramatis. Bagian ini juga akan menceritakan perjalanan sejarah orang-orang di Ciwangun sejak mereka menjadi kuli kontrak pada penanaman kopi Priangan (*Prianger Stelsell*) hingga mendirikan organisasi Koperasi Produksi.

Bagian ketiga adalah penjelasan tentang latar sejarah, yaitu tentang bagaimana sejarah gerakan petani di Indonesia, dan bagaimana perjalanan gerakan petani didalam mengisi jalur-jalur perjuangan dari gerakan milleniarian ke perjuangan kelas hingga penataan produksi di pedesaan. Termasuk menjelaskan tentang naik-turunnya gerakan politik petani di pentas nasional dari dulu hingga sekarang. Bagian ini hendak memberikan setting panggung bagi cerita gerakan Koperasi buruh tani di lokasi penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Bagian keempat, akan menjelaskan tentang “Kenapa Koperasi Buruh tani ini disebut sebagai Gerakan”. Penjelasan ini akan dimulai dari memaparkan tentang sejarah kemunculan Koperasi di Indonesia yang memang pada awalnya dimaksudkan untuk membangun gerakan sosial. Bagian Kelima adalah kesimpulan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pembelajaran dari studi kasus didalam Koperasi petani di lokasi penelitian dan apa yang dapat diambil-terapkan didalam pengembangan dan mempertahankan gerakan petani secara umum di beberapa tempat di Indonesia berdasar pada penjelasan hasil penelitian ini.

## 1.2 Petani, dan kemiskinan

Dalam bentang sejarah perjalanan masyarakat di kepulauan Indonesia, ada satu kelompok yang selalu berada didalam kondisi yang sangat buruk sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan, dan sampai saat ini. Kondisi buruk itu disebabkan karena orang-orang ini telah dibayangkan menjadi penggerak dari tuas-tuas ekonomi yang dijalankan melalui cara eksploitatif, tetapi diabaikan nasibnya dan di jauhkan kesempatan mereka untuk menjadi sejahtera. Mereka

berada di kantong-kantong produsen makanan dan kebutuhan orang-orang yang berada di kota-kota. Mereka inilah yang disebut sebagai masyarakat pedesaan yang didalam data makro kependudukan di Indonesia, tinggal di wilayah-wilayah produksi kepulauan Indonesia yang bekerja menggarap tanah sebagai petani<sup>2</sup>. Penekanan dari Mazoyer dan Roudart berikut adalah gambaran dari keadaan petani yang dimaksud:

*“Most of the world’s hungry people are not urban consumers and purchasers of food but peasant producers and sellers of agricultural products. Further, their high number is not a simple heritage from the past but the result of an ongoing process leading to extreme poverty for hundreds of millions of deprived peasants”.*<sup>3</sup>

Berikut ini, akan ditampilkan dua potret data kemiskinan petani itu dari dua waktu yang berjauhan. Pertama, data statistik tahun 1925 di beberapa tempat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa 71% dari penduduk tidak mempunyai ternak, 7% mempunyai seekor kerbau atau lembu, 10% mempunyai 2 ekor ternak, dan 11,6% mempunyai lebih dari 2 ekor. Perhitungan ini disandarkan atas rata-rata keseluruhan penduduk. Saat itu, 75% penduduk di Jawa adalah petani, maka diantara petani tersebut, terdapat 61,9% tidak mempunyai ternak. Data statistik tahun 1925 ini menggambarkan hasil pertanian rakyat Indonesia yang hanya berpenghasilan rata-rata 5 – 9 sen seorang perhari.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Tentang pembagian lapisan sosial petani, diambil dari Sajogyo yang membagi tiga lapisan sosial masyarakat petani di pedesaan Jawa, yaitu: petani kaya/pengusaha petani (kepemilikan lahan seluas 0,5-1 Ha dan di atas 1 Ha), petan gurem (kepemilikan lahan di bawah 0,5 Ha) dan buruh tani (tidak memiliki lahan sama sekali). Sedangkan dalam kajian Studi Dinamika Pedesaan (SDP), petani didefinisikan pada dua fokus, *pertama*, petani adalah pengusaha-pengolah tanah, dan *kedua*, petani adalah mereka-petani-yang menguasai/memiliki tanah.

<sup>3</sup> Kutipan ini berasal dari tulisan M. Mazoyer dan L. Roudart didalam *A History of World Agriculture: From the Neolithic Ageto the Current Crisis*. 2006. New York; Monthly Review Press. Kutipan ini juga terdapat didalam tulisan Philip McMichael pada *Peasant Make Their Own History But Not Just as They Please.....* didalam Borrás, Edelman, Kay, *Transnational Agrarian Movement Confronting Globalization*. London. Blackwell.2008. halaman 37.

<sup>4</sup> M. Tauchid, *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, terbitan ke-4 oleh Yayasan Bina Desa, Jakarta. 2011. Halaman 217.

Data kedua adalah data 2008, BPS melansir data tentang jumlah orang miskin di Indonesia yang mencapai 37,17 juta jiwa, atau sekitar 16,58% dari keseluruhan total populasi penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, 66% diantaranya berada dikawasan pedesaan Indonesia, dan 56% diantaranya menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan sumberdaya alam yang ada di atasnya. Pada tahun yang sama, Serikat Petani Indonesia melansir data yang hampir serupa, klaim dari organisasi petani yang tergabung didalam aliansi international *La Via Campesina* ini menyatakan bahwa data petani gurem (yang memiliki tanah kurang dari 0,5 ha) di Indonesia sebanyak 15,6 juta KK. Jika masing-masing keluarga memiliki 3 orang anak, maka jumlah penduduk dari petani gurem ini akan mencapai 78 juta jiwa. Jumlah ini akan meningkat pada tahun 2010, karena menurut data BPS, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami tren kenaikan. Februari 2010 saja, angka angkatan kerja disektor pertanian mencapai 42,8 juta jiwa, atau sekitar 40% dari keseluruhan angkatan kerja nasional yang mencapai 107,4 juta jiwa.<sup>5</sup>

Dengan memakai tehnik *superimposed*,<sup>6</sup> saya melakukan *overlay* dengan membuat peta kawasan yang terdiri dari area kawasan hutan, konsesi tambang, kawasan perkebunan dan industri dari berbagai sumber terkait (dinas pertanian, Dirjen Planologi, statistik kehutanan, peta Izin dan Konsesi Pertambangan, dan Peta Tata Ruang Nasional 2007) dengan data kemiskinan di dalam data potensi desa tahun 2006. Hasil dari *overlay* beberapa data itu, didapatkan desa-desa dengan sebaran rumah tangga miskin diatas 50%, berada disekitar lokasi-lokasi penguasaan sumberdaya alam (kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan industri, dan pertambangan) yang dikuasai oleh perusahaan besar Asing maupun Nasional. Dan sebarannya hampir merata di seluruh kepulauan Indonesia, sebanyak 28% berada di Pulau Jawa-Bali-Madura, 20% desa di

---

Didalam buku ini ditampilkan banyak sekali perbandingan data statistik yang dihasilkan dari survey pemerintah kolonial.

<sup>5</sup> Serikat Petani Indonesia, *Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan, dan Pembaruan Agraria*. 2010.

<sup>6</sup> Teknik ini adalah cara untuk melihat suatu fakta dengan melakukan *Over Lay* dari beberapa data yang ada, tehnik ini berguna untuk melihat kaitan antara munculnya kemiskinan dan konsentrasi penguasaan tanah akibat konsesi-konsesi yang didapatkan perusahaan raksasa untuk produksi (misal Perhutani, PTPN, Perkebunan Swasta), Ekstraksi (perusahaan tambang), dan Konservasi (Kawasan Lindung, Taman Nasional, *Ecotourism*)

Kalimantan, 23% desa di Sumatera, dan sisanya di wilayah-wilayah kepulauan Maluku, Papua, Sulawesi.

Sementara berkebalikan dengan itu, penguasaan tanah luas oleh “perusahaan-perusahaan besar” semakin menjadi-jadi. Misalnya, untuk ekspansi perkebunan Sawit, luas areal tanaman sawit meningkat dari 290 ribu Ha pada tahun 1980 menjadi 5,9 juta Ha pada tahun 2006, dan pada tahun 2010 luasan itu meningkat lagi menjadi 7,8 juta Ha, luasan yang sangat besar ini 56% diantaranya dimiliki oleh perusahaan Swasta Asing.<sup>7</sup> Sementara itu, contoh lain yang signifikan adalah pemberian konsesi tambang yang pada tahun 2010 ini telah mengalami peningkatan hingga 67% sejak tahun 1990 dan telah memakan lahan seluas 3,4 juta Ha di darat dan 2,8 juta Ha di perairan, konsesi pertambangan yang meliputi gas, minyak, dan galian (emas, batubara) ini 78% diantaranya dikuasai dan dioperasikan oleh Perusahaan Modal Asing.<sup>8</sup>

Studi tentang kemiskinan sebagian besar rakyat petani akibat sedikitnya lahan dan hilangnya kesempatan mereka bekerja di atas tanah, pernah dengan sangat intensif dilakukan oleh tradisi sosiologi pedesaan yang dipimpin oleh Prof. Sajogyo pada rentang antara tahun 50-an hingga 90-an dan berlanjut hingga tahun-tahun belakangan ini. Prof Sajogyo menekankan didalam setiap cara pandang sosiologisnya untuk selalu memperhatikan “kaum lemah dari yang terlemah” di pedesaan. Dari rangkaian penelitian panjang yang dilakukannya, Prof Sajogyo kemudian melahirkan beberapa konsep tentang studi kemiskinan, yang dipakai didalam studi sosial hingga saat ini.<sup>9</sup>

Cara pandang yang diperlihatkan oleh Prof Sajogyo bermaksud untuk membuat cara melihat problem kemiskinan bukanlah dalam ukuran atau variabel yang mengabaikan makna sirkuit kuasa dan proses/sejarah kompleks dan aspek-aspek struktural yang membentuknya. Kemiskinan bukanlah “kondisi” yang bersifat statis daripada “konsekuensi” yang bersifat dinamis, beragam dan

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Perkebunan, Kementrian Pertanian, *Statistik Perkebunan 2010*, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*, 2010.

<sup>8</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, *Data Perusahaan Tambang Modal Asing di Indonesia*. 2010.

<sup>9</sup> Lebih lengkap tentang studi kemiskinan Prof Sajogyo, dapat dilihat diantaranya didalam: Francis Wahono (ed). *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta. Cindelaras. 2006.

kompleks. Karena itulah, kemiskinan mesti dilihat sebagai bagian dari hasil dari sejarah dan dinamika kontemporer kapitalisme yang meliputi proses-proses akumulasi, perampasan, diferensiasi dan eksploitasi. Dengan demikian, analisis kemiskinan sebagai hasil dari sejarah dan dinamika kapitalisme kontemporer, tidak bisa dilepaskan dari proses dan praktek hubungan akumulasi, perampasan, diferensiasi dan eksploitasi.

Pada titik ini, kemiskinan memiliki sifat relasional yang memposisikan kemiskinan dilihat bukan pertama-tama sebagai kondisi melainkan konsekuensi. Sebagai suatu konsekuensi, maka dia merupakan efek dari relasi-relasi sosial, yang tidak terbatas dalam pengertian koneksi atau jaringan semata (asumsi di balik teori modal sosial yang individualistis), melainkan dalam pengertian hubungan-hubungan kekuasaan yang timpang.

Pada konteks semacam inilah proses pemiskinan dapat terjadi berulang dan terwariskan. Secara relasional, kemiskinan semacam ini harus dipandang sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang, ketimbang sebagai produk dari proses-proses yang abnormal dan patologis. Suatu “kepekaan ekonomi politik (*a sense of political economy*) menjadi esensial” disini untuk dapat “menyibakkan hubungan-hubungan historis yang menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan, kemakmuran dan kesempatan di tengah-tengah masyarakat”<sup>10</sup>

### 1.3 Apa yang dianggap Gerakan dan “bukan” Gerakan

Sejak tahun 2007, penulis terlibat didalam salah satu dari gerakan petani yang cukup besar di daerah Jawa Barat yaitu Serikat Petani Pasundan.<sup>11</sup> Wilayah

<sup>10</sup> Adam Mosse, *Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty*. Working Paper 107, tahun 2007, Chronic Poverty Research Centre.

<sup>11</sup> Organisasi petani ini sebenarnya telah ada sejak akhir tahun 80-an dengan nama Serikat Petani Jawa Barat, tetapi karena suasana politik nasional yang tidak kondusif, dan perlakuan rezim otoriter Soeharto, organ ini tidak dapat mengembangkan kegiatan politiknya, pasca 1998, aktivis-aktivis SPJB kemudian mulai melakukan pendidikan politik secara terang-terangan, dibantu oleh aktivis-aktivis kampus dan Lembaga advokasi di Bandung, Bulan Januari 2000, organisasi resmi dideklarasikan. Lebih jelas lihat Ibang Lukmanudin, “Mari Bung Rebut Kembali, Rakyat Sagara Menuntut Hak atas Tanah”, dalam *Mengubah Ketakutan menjadi Kekuatan, Kumpulan Kasus-kasus Advokasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2001; Dianto Bachriadi, “Warisan Kolonial yang

kerja organisasi ini berada di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Proses saling belajar ini kadang-kadang berbentuk pendampingan keterlibatan di beberapa kegiatan Serikat Petani, dan kadang-kadang berbentuk agenda-agenda penelitian kecil bersama dengan aktivis-aktivis pendamping serikat tani. Biasanya agenda penelitian itu berkisar di sekitar permasalahan agraria di beberapa desa-desa basis gerakan, yang digunakan nantinya untuk bahan evaluasi di rapat-rapat organisasi serikat tani ini. Keterlibatan itu bermula sejak penulis bergiat di Sajogyo Institute yang memiliki konsentrasi di studi agraria dan pedesaan, sering dalam banyak kegiatan Serikat Petani Pasundan, penulis terlibat aktif sebagai bagian dari pendukung organisasi ini, dan puncaknya ketika penulis menandatangani untuk menjadi pengajar di Sekolah Petani yang didirikan Serikat Petani Pasundan di salah satu wilayah kerja mereka. Hubungan dengan Serikat Petani Pasundan ini, berlanjut hingga sekarang.

Pada masa-masa pergaulan dengan Serikat Petani Pasundan, tahun 2010, penulis ikut didalam sebuah penelitian bersama dengan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dan Sajogyo Institute. Aktifitas itu lah yang membawa penulis ke beberapa komunitas petani yang bukan tergabung didalam Serikat Petani Pasundan tetapi berada di sekitar daerah kerja SPP. Petani-petani ini membuat suatu aktivitas inisiatif yang ternyata telah terjadi sejak waktu lama, yaitu melakukan penataan produksi pasca aksi reclaiming yang mereka lakukan diatas tanah *onderneming* Belanda.

Koperasi Petani ini berada di Desa terpencil di selatan Kabupaten Tasikmalaya bernama Ciwangun. mereka adalah kumpulan petani-petani yang tergabung dengan sebuah Koperasi yang berawal sejak tahun 1952, -jauh sebelum SPP didirikan pada tahun 1999-, mereka adalah mantan-mantan Buruh Perkebunan Belanda yang melakukan aksi reclaiming pada tahun 1950. Sebelumnya pada tahun 1930-an, daerah ini adalah salah satu basis dari Sarekat Islam-*Afdeling B*, suatu organisasi seksi rahasia Sarekat Islam yang melakukan

---

Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat”, dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Anu Lounella dan R. Yando Zakaria (Eds.), Yogyakarta: Insist Press bersama KARSA, 2002. Anton Lucas and Carol Waren, “The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia”, *Indonesia*, no 76, October 2003.

pemberontakan di Garut, yang kebanyakan anggotanya adalah buruh-buruh perkebunan.<sup>12</sup>

Ketika Indonesia merdeka, mereka bergabung dengan salah satu kekuatan massa petani hasil kongres petani 1945 yaitu Barisan Tani Indonesia, dan ketika BTI menjadi kekuatan yang diklaim oleh Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1954 mereka bergabung dengan Gerakan Tani Indonesia yang berada dibawah bimbingan aktivis Partai Sosialis Indonesia. Ketika Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1956, mereka meninggalkan simbol-simbol PSI, tetapi tetap melakukan proses pendidikan kader seperti yang mereka telah ketahui dari Pelatihan Kader PSI, dan tetap tergabung didalam GTI.

Saat terjadi perubahan drastis didalam kondisi perpolitikan di Indonesia tahun 1965, mereka secara diam-diam memperkuat barisan nya dengan berlindung pada kekuatan Divisi Siliwangi yang terkenal sangat disegani didalam politik militer Indonesia. Tindakan ini dilakukan karena Divisi Siliwangi yang pada waktu itu dipimpin oleh Ibrahim Adjie, serta A.H Nasution, pernah menjadikan kampung mereka sebagai salah satu basis pertahanan divisi Siliwangi pada zaman revolusi (Agresi Militer Belanda), dan ikut membantu penumpasan gerombolan yang menamakan diri sebagai DI/TII pimpinan R.M Kartosuwiryo.

Mereka selamat dari razia yang dilakukan Orde Baru terhadap gerakan-gerakan rakyat produk organisasi pada masa Bung Karno yang dinilai merongrong kekuasaan. Bersamaan dengan itu, -seperti juga banyak daerah lain di Indonesia- dengan pertimbangan keberlanjutan produksi dan kerja-kerja kolektif di Koperasi, mereka beramai-ramai menjadi Golkar dan menggabungkan diri dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Bahkan, pemimpin-pemimpin Koperasi ini menjadi Juru Kampanye Golkar pada setiap Pemilu hingga tahun 90-an.

Sekarang, Koperasi ini hampir berumur 60 tahun, mereka telah memiliki izin HGU perkebunan dari Badan Pertanahan Nasional Indonesia untuk mengelola tanah hasil reclaiming yang diperuntukkan sebagai hak kolektif. Selain itu juga telah memiliki sertifikat hak milik bagi tanah-tanah hasil redistribusi yang digarap

---

<sup>12</sup> Disarikan dari catatan-catatan lapangan hasil wawancara tanggal 4-6 Maret 2009, 12 Agustus 2010, dan 11 Januari 2011.

pribadi. Hingga saat ini mereka terus menguatkan organisasi produksi mereka dengan mengembangkan kemitraan “karet rakyat” di daerah-daerah sekitar perkebunan Koperasi ini. Mereka terus menerus membuat inisiatif-inisiatif baru demi mempertahankan tanah hasil perjuangan mereka, dan memperluas manfaat Koperasi yang menurut petani di Ciwangun sebagai “*cara membuat orang tani sejahtera, tanah tetap terjaga, anak cucu bisa berjaya, dan bangsa Indonesia menjadi sentosa*”.<sup>13</sup>

Saya teringat dengan catatan setelah seminar nasional tentang Reforma Agraria yang telah disampaikan pada bagian awal. Petani-petani di Ciwangun ini tidak tergabung dengan gerakan. Bahkan aktivis-aktivis di Serikat Petani Pasundan yang bekerja dikampung-kampung Tasikmalaya pun tidak mengetahui tentang Koperasi petani ini, apalagi aktivis-aktivis gerakan sosial di perkotaan, atau mungkin juga akademisi pendukung gerakan sosial yang bertempat di kampus-kampus. Jika pun ada yang mengetahui, mereka hanya mengenalnya sebagai Koperasi yang menjadi hal biasa di negeri ini, karena ada begitu banyak Koperasi.

Koperasi ini melakukan apa yang disebut sebagai “usaha untuk memperbaiki kondisi “miskin” yang dialami petani” akibat penindasan panjang yang mereka alami sebagai buruh perkebunan Belanda. Mereka menyusun suatu rencana yang dilakukan secara bertahap, sejak dari pengakuan hak, pembagian tanah pertanian untuk anggotanya, dan penataan produksi kolektif hingga rencana pengembangan. Mereka membangun sebuah komunitas kecil di pedalaman perbukitan selatan kabupaten Tasikmalaya. Tetapi, hingga kini, tidak pernah ada yang melihat Koperasi ini sebagai bagian dari gerakan petani walaupun mereka bercikal bakal dari gerakan Sarekat Islam yang terkenal sangat radikal pada zamannya.

Didalam membaca gerakan dan “bukan” gerakan, anjuran dari Brenda Baletti, Tamara M. Jhonson, dan Wendy Wolford tentang kewaspadaan melihat perbedaan waktu dan tempat pada kemunculan dari gerakan petani itu sendiri menjadi penting, didalam tulisan mereka yang berjudul *Late Mobilization: Transnational Peasant Network and Grassroots Organizing in Brazil and South*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak N.tanggal 1 Maret 2012.

*Africa*, memberikan pertimbangan untuk melihat perbedaan skala tempat dan waktu ini. Didalam tulisan nya Baletti et.al, mereka membandingkan antara gerakan *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) di Brazil dengan *Landless People's Movement* (LPM) di Afrika Selatan.<sup>14</sup>

Analisa mereka terhadap perbandingan itu menegaskan bahwa seberhasil apapun klaim MST Brazil dalam perjuangan mereka pada tahun 90-an<sup>15</sup>, ketika aktivis-aktivis MST melakukan pendidikan terhadap calon aktivis di Afrika Selatan yang kemudian tergabung menjadi organisasi LPM pada awal tahun 2000-an, strategi mereka tidak berhasil, karena berbedanya situasi masing-masing tempat, dan kesempatan politik pada waktu itu.

Anjuran dari Marc Edelman, tentang pentingnya memberikan perluasan cara baca dan radar untuk melacak gerakan, dituangkannya didalam *Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politic*. Edelman memperlihatkan perjalanan diskursus tentang gerakan dari waktu ke waktu (60-an hingga sekarang) dan apa pengaruh diskursus itu terhadap praktek gerakan yang terjadi di masyarakat. Menurut Edelman, isu sentral yang dibahas ternyata tidak pernah lepas dari persoalan “apakah diskursus gerakan (pengetahuan) adaptif terhadap praktek sosial yang ada disekitarnya (politik, kebudayaan)”. Pendapat Edelman ini menegaskan bahwa perkembangan -“apa yang disebut”- sebagai gerakan, kadang tidak dapat hanya dikerangkakan didalam pengelompokan-pengelompokan tertentu yang basis nya dapat di lacak dengan jelas, karena terdapat “identitas pengikat” yang berbeda-beda antara orang-orang yang terlibat dalam suatu gerakan itu.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Borrás et al. (2008) *Op Cit.* halaman 123.

<sup>15</sup> Menurut Baletti et.al, keberhasilan MST ditopang oleh 3 hal: *pertama*, MST dibangun melalui kepemimpinan pemuda-pemudi yang merupakan anak-anak dari petani kecil-para pemimpin “organic” yang lahir dari gerakan mereka sendiri sehingga dapat mempertahankan satu hubungan ideologis yang kuat dalam perjuangan mereka untuk masa depan bersama, *kedua*, terus menerus melangsungkan aksi okupasi tanah, sebagai bentuk cara mencari perhatian publik keluar, dan membangun solidaritas sesama petani MST, *Ketiga*, mempertahankan otonominya dari sistem politik serampangan yang ada di Brazil, pemimpin-pemimpin gerakannya tidak terlibat didalam partai politik yang ikut serta didalam pemilu.

<sup>16</sup> Misalnya: Edelman mencontohkan fenomena baru tentang munculnya ikatan-ikatan baru yang membuat sekumpulan orang menjadi gerakan massa. Ikatan-ikatan baru itu bersifat universal. Edelman mencontohkan: tentang muncul nya gerakan-gerakan gay, lesbi, dan gerakan pro dan kontra aborsi, dan sebagainya. Lihat dalam Marc Edelman,

Perdebatan tentang gerakan dan bukan gerakan ini, juga dapat dilacak dari rumusan James Scott yang pernah menawarkan suatu alternatif dari cara melihat gerakan petani. Pada tahun 1980-an, melalui publikasi hasil penelitiannya di beberapa wilayah di Asia Tenggara, Scott mengeluarkan suatu karya yang sangat berpengaruh yaitu *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Scott berusaha untuk merubah lensa analitik dalam melihat gerakan petani, dari revolusi petani menjadi perlawanan petani, Scott memilih cara lain dalam melihat perlawanan petani yang selalu diartikulasikan dalam bentuk pergolakan revolusioner, pemberontakan, dan aksi bersama, Scott merumuskan tindakan-tindakan petani didalam bentuk sabotase, desersi, pencurian, kepura-puraan, sebagai bentuk dari perlawanan sehari-hari yang memiliki konsekuensi politik atau sosial ekonomi yang signifikan.

Kathy Le Mons Walker, didalam tulisannya yang berjudul *From Covert to Overt: Everyday Peasant Politics in China and the Implications for Transnational Agrarian Movement*<sup>17</sup> memperhadap-hadapkan kenyataan yang ditulis Scott di semenanjung Malaya itu dengan pengalaman penelitian tentang gerakan tani di pedesaan China. Ternyata, menurut Walker, perlawanan sehari-hari yang dirumuskan Scott sebagai tindakan “perlawanan diam-diam” yang memakai cara-cara “pembangkangan tersembunyi” justru berbeda dengan yang dia temui di China. Bentuk perlawanan sehari-hari di negeri itu adalah demonstrasi dalam bentuk pengerahan massa yang dilakukan oleh aktivis-aktivis petani. Aksi-aksi ini melibatkan jutaan orang, dan seperti itulah perlawanan sehari-hari di China.

Untuk studi yang pernah dilakukan di Indonesia, tentang inisiatif petani yang tergabung didalam suatu organisasi yang tidak dianggap sebagai gerakan, dapat ditemui didalam apa yang telah dilakukan oleh studi-studi Survey Agro Ekonomi pada tahun 70-an dan 80-an yang dipimpin oleh Prof Sajogyo, setelah mereka mengeluarkan suatu pernyataan tentang akibat “Revolusi Hijau” terhadap tersingkirnya petani kecil, SAE menerbitkan beberapa laporan tentang usaha-usaha petani yang melakukan inisiatif untuk tetap bertahan hidup, sebelumnya,

---

*Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politic*. Annual Review of Anthropology;2001;30. Halaman 285.

<sup>17</sup> Tulisan ini dapat dilihat didalam Borras, Edelman, Kay. *Transnational Agrarian Movement*. London. Blackwell. 2008. Halaman 295-299.

Prof Sajogyo yang pada waktu itu memakai nama Kampto Utomo, pernah melakukan penyelidikan pada suatu usaha inisiatif dari masyarakat yang melakukan transmigrasi spontan dari Jawa ke Lampung (Way Sekampung), didalam karya tersebut, Kampto Utomo menyatakan bahwa itu adalah inisiatif petani-petani dalam melakukan usaha perbaikan nasib. Untuk karya terbaru, misalnya karya yang dihasilkan dari riset Prof. Yunita tentang inisiatif petani-petani di Subang dan Indramayu dalam *Iso Dewe*, juga menggambarkan bagaimana petani melakukan usaha-usaha untuk mengatasi tantangan baru yang dihadapkan pada mereka.

Kenapa Koperasi petani seperti di Ciwangun ini luput dari studi-studi tentang gerakan petani di Indonesia? Sepenuhnya tidak dapat memberikan sandaran tanggungjawab kepada aktivis-aktivis gerakan agraria dan para sarjana-sarjana dari kalangan aktivis yang bergiat di lapangan studi gerakan tani. Kenapa demikian? Ada satu rentang sejarah perjalanan ilmu sosial di Indonesia, sebagai “bagian yang digelapkan agar tidak terlihat”, yaitu *Kajian Agraria*, masa itu terjadi pada masa sejak transisi politik nasional di Indonesia pada tahun 1965 – 1966.

Diantara dari sekian banyak akibat dari transisi politik itu adalah ditutupnya minat untuk melakukan studi terhadap gerakan petani dan gerakan sosial. Ilmu-ilmu sosial di bangun sedemikian rupa agar patuh pada kekuasaan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan penguasa, masyarakat di teliti untuk dicarikan “mantra penjinak” agar mereka bisa patuh, dan ilmu sosial dikungkung hanya didalam tradisi yang diinginkan oleh penguasa baru pasca 1966. Namun tentu saja, disela-sela masa itu, beberapa studi agraria tetap muncul, terutama sejak tahun 1976, saat pertama kalinya pada masa Orde Baru, Prof Sajogyo mengangkat kembali isu reforma agraria menjadi bahasan didalam ilmu sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Prof Sajogyo, pada tahun 1974 mulai membicarakan masalah kemiskinan pedesaan dan Reforma Agraria. Strategi Sajogyo untuk menghindari kecurigaan rezim Orde Baru adalah dengan mengatakan itu sebagai “alat uji untuk melihat angin politik”. Tahun 1976, kajian yang sama di lakukan oleh Masri Singarimbun dan David H, Penny di Yogyakarta (Sriharjo, Bantul). Tahun 1980-an, Mubyarto dan Loekman Soetrisno mulai menulis topik tentang kemiskinan di pedesaan. Tahun 1979, FAO mengadakan lokakarya “reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan” di Roma dan diikuti oleh para pestudi agraria (Sajogyo, Gunawan Wiradi, dkk) setelah itu diadakan workshop international tentang “*Agrarian Reform in Comparative Prespective*” di Selabintana, Sukabumi. Lebih

Hal lain yang cukup penting untuk konteks penelitian ini (dan akan dijelaskan pada bagian tersendiri nanti) adalah, terjadinya pemahaman yang berbeda oleh aktor negara, aktivis, akademisi, dan petani sendiri, dalam memaknai Koperasi. Koperasi Ciwangun yang didirikan pada tahun 1952, berada didalam suatu suasana semangat kebangsaan yang tinggi pasca pernyataan kemerdekaan 1945. Mereka mendapat pendidikan tentang Koperasi -sebagai salah satu jalan keluar untuk memberdayakan ekonomi rakyat tani- dari pencetus ide Koperasi yaitu M. Hatta dan orang-orang yang berada didalam semangat yang sama.

Sementara ketika tahun 1965, saat politik Indonesia berpindah haluan, koperasi kemudian dipakai oleh rezim Soeharto sebagai instrumen pendukung pelaksanaan rencana-rencana pembangunannya. Koperasi kemudian dimaknai sebagai kelompok yang dibentuk sebagai alat kontrol bagi rakyat pedesaan. Bahkan, didalam perjalanan koperasi pada masa-masa itu yang dikenal dengan nama KUD, dia justru mengakomodir keanggotaan petani-petani besar (pemilik tanah luas) daripada petani kecil yang seharusnya di berdayakan oleh koperasi.

Generasi baru, setelah pamor KUD mulai merosot akibat kasus-kasus internal (korupsi, *elite capture*), kemudian koperasi banyak dipahami mirip seperti “tukang kredit”. Koperasi dipahami sebagai penyedia *fresh money* bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, terutama di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh *public Finance* (Bank). Sistem pengembalian pinjamannya mirip seperti bank, jenis koperasi seperti ini tidak terlalu mengabaikan sistem pembangunan koperasi berdasarkan keanggotaan masyarakat, tetapi seperti sistem “struktur pemerintahan” korporasi yang sahamnya dimiliki sedikit orang, dan dijalankan oleh karyawan yang bertugas merekrut nasabah, bukan anggota.

Penelitian ini berupaya untuk mengatasi *gap* antara studi untuk memahami tentang gerakan petani disatu sisi, dan inisiatif petani yang tidak dikategorikan didalam gerakan petani disisi yang lain seperti Koperasi Ciwangun ini. Problem “pembatasan” itu semakin terlihat tatkala minat untuk melihat kembali gerakan petani muncul pada akhir 90-an, akibatnya terjadilah pembentukan narasi tentang

---

jelas dapat dilihat pada tulisan Prof. Ben White, didalam Vedi Hadiz dan Daniel Dakhidai (ed), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta, Equinox publishing, 2006.

perbedaan petani yang bergabung dengan gerakan sebagai petani revolusioner, dan petani yang tidak bergabung dengan gerakan sebagai petani yang tidak revolusioner, padahal, kedua kelompok ini, sama-sama berjuang untuk pewujudan kemakmuran dan kesejateraan kehidupan mereka.

Sementara itu, seiring dengan percepatan perkembangan kondisi-kondisi diluar petani itu sendiri, telah terjadi semacam dinamika sangat kompleks, yang itu dipengaruhi dari tersebarnya masyarakat petani ini didalam wilayah-wilayah spasial yang berbeda<sup>19</sup>, agro ekologi yang beragam, dan situasi politik lokal dan nasional yang berbeda. Pertanyaan tentang bagaimana petani-petani ini “bergerak” mengusahakan suatu pencapaian dari tujuannya meraih kehidupan yang lebih baik, untuk pencapaian tujuan bagi pewujudan keadilan agraria dalam berbagai bentuk menjadi penting dilihat kembali, bagaimana kemunculannya, perjalannya, inisiatif yang dilakukannya, dan rumusan-rumusan cita-citanya.

#### 1.4 Apa yang disebut dengan gerakan petani?

Kenyataan yang tidak dapat dihindarkan didalam perjalanan sejarah pedesaan di Indonesia seperti yang akan dijelaskan pada bagian kedua adalah, sebagian petani mengambil suatu jalan untuk menentang bentuk-bentuk kuasa yang menindas mereka. Dari dulu hingga sekarang, penentangan itu dilakukan didalam berbagai bentuk, dilakukan secara bergerombol, perorangan, secara terorganisir maupun tidak, tetapi diatas semua cara yang berbeda-beda tersebut, gerakan petani adalah bentuk dari tanggapan mereka terhadap kondisi penindasan yang mereka alami.

Koperasi Ciwangun, adalah salah satu contoh dari bagaimana petani-petani disana melakukan sebuah inisiatif dengan melakukan penentangan, yaitu dengan penataan produksi yang melawan model kapitalisme yang eksploitatif, serta penerapan strategi melawan dari pembacaan mereka terhadap situasi yang dimusuhi, sehingga perwujudan cita-cita masyarakat yang sejahtera dapat mereka wujudkan. Untuk melihat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai

---

<sup>19</sup> Philip McMichael, Peasant Make Their Own Stoy, But Not Just as They Please, didalam Jun Borrás et.al, *Transnational Agrarian Movement Confronting Globalization*, Willey - Blackwell Ltd, 2008. halaman 39.

“apakah Koperasi Ciwangun dapat disebut sebagai gerakan,” maka perlu untuk melihat perumusan dari hasil studi yang sudah dilakukan.

Sebuah karya klasik, yang pernah menunjukkan bagaimana penindasan terjadi dan seperti apa perlawanan yang dilakukan oleh petani, adalah karangan Eric Wolf didalam *Peasant War in Twentieth Century* (1969). Wolf menekankan titik bahasannya pada akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyebaran kapitalisme dari atlantik utara ke negara-negara pra-kapitalisme. Menurut nya:

“ ...pada masa pra kapitalisme, kehidupan sosial masyarakat dan hubungan antara manusia bergantung pada hubungan saling memberikan antara petani dan Tuan Tanah, petani memberi tenaga, dan tuan tanah memberi jasa keamanan kepada petani-petani tersebut, ketika kapitalisme datang, mereka dikacau balaukan sedemikian rupa, hubungan sanak keluarga, dan tetangga menjadi berubah karena mereka (para petani) telah diubah menjadi aktor ekonomi belaka”<sup>20</sup>

Berkembangnya gaya ekonomi baru kapitalisme kepada masyarakat petani ini, membuat hubungan eksploitatif antara tuan tanah dan petani-petani nya, maupun dengan aristokrat kolonial menjadi kacau. Di sisi lain, menyebarnya hubungan-hubungan baru dalam model ekonomi kapitalisme ini, bersamaan dengan terciptanya berbagai jalur yang memungkinkan munculnya elit-elit baru, baik itu pedagang, intelektual, maupun aktivis gerakan politik. Menurut Wolf, disinilah titik berangkat munculnya gerakan perlawanan petani, yaitu ketika:

“Perpaduan politik antara organisasi (termasuk organisasi bersenjata) dari kalangan elit baru yang marjinal, kalangan intelektual dan professional baru, dengan kalangan petani yang tidak puas dikarenakan pasar tidak memberi peluang yang cukup”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Terjemahan lepas dari karya Eric Wolf, *Peasant War in Twentieth Century*, New York, Harper and Row, 1969. Halaman 279.

<sup>21</sup> Wolf (1960), dalam Noer Fauzi Rachman, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005. Halaman 17.

Rumusan yang lebih terperinci untuk kasus gerakan petani, dan memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya studi tentang gerakan petani dikemudian hari, adalah rumusan yang diperkenalkan oleh Scott, Peigie, dan Popkins,<sup>22</sup> - walaupun banyak teoritis lain yang menghuni ruang politik yang sama dengan mereka- ketiga teoritis tentang gerakan petani ini, telah berhasil membuat satu pijakan bagi bahasan gerakan petani khususnya di negara-negara bekas jajahan seperti wilayah di Asia Tenggara.<sup>23</sup>

Scott didalam karya nya yang berjudul *The Moral Economy of Peasant* mengemukakan suatu argumen tentang masyarakat tradisional yang memiliki suatu aturan-aturan moral tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari urusan produksi mereka diatas tanah. Tatanan sosial dari kehidupan seperti itu telah menghasilkan jaminan bagi keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan petani dipedesaan.

Ketika hubungan-hubungan baru yang dibawa oleh kolonialisme datang, hubungan ini menjadi porak-poranda, dan mengancam kelangsungan hidup petani-petani ini, yaitu kelangsungan jaminan subsistensi minimum mereka untuk tetap bertahan hidup. Karena itulah, menurut Scott –yang paling ditekankan- respon yang muncul dari petani-petani ini adalah bentuk dari usaha mereka untuk mengembalikan tatanan yang dibayangkan dalam kehidupan mereka di pedesaan. Perlawanan yang terjadi, kemudian berbentuk pembangkangan terhadap sebuah nilai yang tidak mereka yakini dapat membawa mereka kepada kondisi sejahtera yang disebut oleh Scott sebagai Perlawanan Sehari-hari.

Selain Scott, seorang teoritis gerakan petani yang lain adalah Samuel Popkins, yang menerbitkan sebuah karya berjudul *The Rational Peasant*, menurut Popkins, masyarakat petani sebenarnya adalah masyarakat yang menjalani hidup

---

<sup>22</sup> Perbandingan antara ketiga ini dapat dilihat dalam Marcus J. Kurts, *Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and case*, Theory and Society 29: Kluwer Academic Publisher, halaman 93 – 124.

<sup>23</sup> Didalam karya Noer Fauzi Rachman yang berjudul *Memahami Gerakan gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist 2005, pada bagian awal, ketiga aliran ini dikategorikan sebagai konsep klasik. (penulis tidak menjelaskan maksud klasik didalam mengkategorikan ini, tetapi sepertinya klasik disini adalah pembedaan waktu dengan yang sekarang, dan menunjukkan keharusan cara melihat gerakan petani dengan cara yang baru karena pertimbangan situasi-situasi baru yang muncul)

ibarat orang main judi,<sup>24</sup> dengan pertimbangan untung rugi, dan perasaan menunggu dengan harap cemas, terutama ketika menghadapi situasi-situasi baru yang datang kepada mereka seperti ekonomi pasar. Menurut Popkins, gerakan petani bukan bersifat mengembalikan tatanan seperti dahulu (restoratif), tetapi justru membuat suatu cara agar dia dapat berintegrasi dengan sistem baru, atau dengan kata lain, menjinakkan model baru tersebut agar mereka mendapat untung dari model tersebut.

Teoritisi ketiga adalah Jeffery Peigie, dalam karya monumentalnya berjudul *Agrarian Revolution, Social Movement and Export Agriculture in the Underdeveloped World* (1975), Peigie tidak terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat moralitas dan pilihan rasional petani seperti Scott dan Popkins. Dia lebih memfokuskan penglihatan pada situasi yang bersangkutan paut dengan aktivitas produksi yang dilakukan oleh orang-orang di pedesaan, yaitu proses kerja mereka (organisasi, struktur kerja, ekologi produksi), Peigie secara khusus mengangkat kondisi-kondisi yang memungkinkan pemberontakan petani sebagai ekspresi perlawanan mereka pada penindasan.<sup>25</sup>

#### 1.5 Duduk Perkara Gerakan Petani didalam Studi tentang Gerakan Sosial.

Pertanyaan yang ingin dijawab dari hasil perumusan bermutu Scoot, Popkins, dan Peigie diatas -seperti yang dirumuskan oleh Noer Fauzi Rachman didalam *Memahami Gerakan rakyat Dunia Ketiga-* adalah tentang apa yang membuat sebagian petani melakukan perlawanan secara terbuka dan sebagian yang lain tidak? Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dari “pengalaman tertindas sebagai petani” ke “perlawanan petani”?, maka penelitian ini hendak menambahkan satu pertanyaan baru yaitu “apa yang membuat sebagian petani - yang melawan secara terbuka dan tidak- dilihat sebagai gerakan dan yang lain

---

<sup>24</sup> Noer Fauzi Rachman, *Ibid.* halaman 23.

<sup>25</sup> Didalam bukunya yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi *Revolusi Agraria, Gerakan Sosial, dan Pertanian Eksport di Negara-negara Dunia Ketiga*. Pedati. 2004. Peigie merumuskan situasi yang memungkinkan bagi gerakan petani untuk bisa muncul: *pertama* terkonsentrasinya penguasaan tanah pada sedikit penguasa, *Kedua*, dihambatnya kesempatan petani untuk melakukan mobilitas keatas, *Ketiga*, terbentuknya solidaritas antara sesama petani yang berada pada suatu lokasi yang sama.

tidak? Seperti temuan didalam kasus Koperasi Ciwangun yang akan dijelaskan nanti secara detail pada bagian ketiga dari paparan hasil penelitian ini.

Seorang guru dan pemikir politik agraria kepulauan Indonesia, Hendro Sangkoyo, menyatakan pendapatnya tentang gerakan sosial yang seringkali digolongkan sebagai perlawanan kolektif diluar atau disamping prosedur politik kenegaraan yang berlaku, untuk menggugat ketidakadilan atau untuk merebut kembali sumber yang pernah dirampas dari miliknya. Padahal batasan itu sangat tidak dapat dilekatkan pada watak dari gerakan sosial yang memiliki banyak variasi. Menurut Hendro Sangkoyo, gerakan sosial itu memiliki banyak watak, tergantung pada apa yang dimusuhinya, seperti apa ikatan sosial yang berlaku disekeliling tempat munculnya, dan kesempatan politik seperti apa yang dimilikinya. Pentingnya untuk meluaskan cara baca melihat gerakan sosial ini, karena begitu kompleks dan beragamnya tempat dan konteks muncul gerakan sosial ini:

“Di pedalaman kepulauan Indonesia, tajamnya perbedaan kepentingan diantara kelas penguasa setempat dengan rakyat jelata atas sumber-sumber kehidupan bersama, bukanlah satu-satunya unsur yang sangat menentukan, berhasil atau gagalnya tindakan untuk mengubah tata kuasa atas sumber-sumber tersebut”<sup>26</sup>

Gerakan petani, sebagai bagian dari gerakan sosial yang luas, adalah salah persoalan yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit yang perlu dilihat lebih jelas. Perbedaan itu dapat berupa keragaman karakter pedesaan, watak penindas, situasi sosial dan alas sejarah yang berbeda dan bentuk-bentuk formasi sosial di setiap tempat. Dr Kuntowijoyo didalam *Esai-Esai Sejarah, Radikalisasi Petani*, menjelaskan tentang kompleksitas masyarakat pertanian di pedesaan Indonesia yang tidak dapat dilihat pembelahannya berdasarkan pada analisa kelas yang sederhana, seperti memperhadap-hadapkan kaum proletar dan borjuis, tetapi ada

---

<sup>26</sup> Hendro Sangkoyo, Kata pengantar pada buku Noer Fauzi Rachman, *Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta, 2005. Halaman xiv.

kompleksitas sistem budaya dan sosial yang mengharuskan untuk melihat perbedaan masyarakat petani secara lebih mendalam.<sup>27</sup>

Untuk itu, perlu bagi para pestudi gerakan petani untuk memiliki teropong alat analisis yang ada didalam melihat gerakan petani, yang tidak terbatas pada hanya “siapa yang muncul ke permukaan” karena koneksinya dengan aktivis di kota yang punya jaringan nasional dan international, atau situasi lain yang memungkinkannya untuk tampil ke permukaan. Tetapi juga harus melihat gerakan petani yang menyebar didalam praktek perlawanan seperti misalnya yang ada didalam cerita tentang koperasi di Indonesia.

Berikut, akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan gerakan sosial, dan seperti apa posisi studi gerakan petani selama ini, dan dimana letak penelitian ini yang membuatnya berbeda dari penelitian tentang gerakan petani yang telah ada.

Secara definitif gerakan sosial memiliki definisi luas dan tidak tunggal karena ada berbagai macam perspektif yang dipakai oleh para teoritis dalam melihat dan menganalisa gerakan sosial. John McCarthy dan Mayer Zald misalnya menggunakan perspektif perilaku kolektif dalam melihat gerakan sosial melalui teori yang disebut dengan *resource mobilisation*. Mereka mendefinisikan gerakan sosial sebagai:

*“a set of opinions and beliefs which represents preferences for changing some elements of the social structure and/or reward distribution of society. A countermovement is a set of opinions and beliefs in a population opposed to a social movement.”*<sup>28</sup>

Dalam teori tersebut titik tekan dalam melihat gerakan sosial adalah pada pentingnya peran organisasi dalam melakukan transformasi keyakinan-keyakinan menjadi tindakan nyata yang konkrit serta menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi pembentukan organisasi-organisasi gerakan sosial.

<sup>27</sup> Kuntowijoyo. *Radikaliasi Petani: Esai-Esai Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya 2002.

<sup>28</sup> John. D. McCharty and Mayer. N. Zeld, *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*, dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 82 (1977), halaman 1217-1218.

Sementara, Charles Tilly didalam *From Mobilization to Revolution* selain melihat praktek organisasi sebagai sumber gerakan sosial, juga melihat hubungan antara munculnya gerakan sosial menuju pada proses politik yang lebih luas. Secara umum Tilly mengatakan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir, berkelanjutan, menolak *self-conscious*, dan didalam gerakan itu sendiri terdapat kesamaan identitas diantara mereka.

Analisis yang dikemukakan oleh Tilly, didasarkan pada perspektif historis, memperiodisasi tahapan-tahapan dari perdebatan dan pertarungan yang berlangsung secara intens dalam lingkup sejarah kontemporer dan memetakan perubahan-perubahan dalam “panggung pertunjukan” dari aksi kolektif yang terjadi. Berbeda dari John McCarthy dan Mayer Zeld, Tilly menekankan pada dinamika keseluruhan yang menentukan keresahan (bahkan kerusuhan) sosial (*social unrest*) dan karakteristik-karakteristik yang ada padanya, ketimbang pada gerakan sosial di mana terdapat aktor-aktor yang terorganisir secara spesifik. Perspektif teoritis Tilly ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah:

*(...) sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support”<sup>29</sup>*

Dalam kategori yang lebih umum, Sydney Tarrow didalam bukunya yang berjudul *Power in Movement, Social Movement, Collective Action and Politics* mengatakan bahwa gerakan sosial adalah politik perlawanan yang dilandasi oleh aksi kolektif yang melawan. Tindakan kolektif tersebut berlangsung dalam institusi ketika mereka yang bergabung didalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, aksi “melawan” adalah basis dari gerakan sosial.

---

<sup>29</sup> Charles Tilly, “Social Movement and National Politics” dalam C. Bright and Sandra Harding (Eds), *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. (Ann-Arbor, Michigan: University of Michigan Press), halaman 306.

Perdebatan yang juga berpengaruh tentang gerakan sosial, yang berangkat dari pembahasan tentang tipe gerakan, model, dan situasi munculnya gerakan, adalah pembagian antara “gerakan sosial lama” (*old social movement*) dan “gerakan sosial baru” (*new social movement*). Gerakan Sosial Lama adalah gerakan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran tradisi Marxist. Jalan pikir nya adalah ingin menegaskan bahwa rakyat harus diorganisir melalui transformasi demokrasi yang berakar kuat berdasarkan kelas sosial masyarakat. Karena berbasis pada perjuangan kelas, maka transformasinya harus revolusioner, dan itu terjadi jika individu diintegrasikan dalam kelompok gerakan. Transformasi revolusioner untuk menggugah kesadaran kelas merupakan prinsip perjuangan organisasi berideologi Marxis. Mereka yang berpandangan seperti ini cenderung melihat bahwa gerakan adalah bentuk dari pertentangan kelas.

Melalui cara pandang struktural tersebut, perspektif ini mengatakan bahwa problem dasar yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi adalah marginalisasi, eksploitasi, ketidakberdayaan, dan kemiskinan yang diderita rakyat bawah akibat penindasan yang dilakukan kelas yang berkuasa kepada rakyat. Dalam konteks demikian, siapapun yang melakukan penindasan terutama yang melakukan eksploitasi kepada sekelompok orang adalah musuh yang harus dilawan.

Sedangkan “gerakan sosial baru” lahir dari kritik atas tradisi berpikir Marxis yang memandang kontradiksi di dalam masyarakat semata-mata karena adanya perbedaan kelas. Sehingga perjuangan selalu diidentikan dengan perjuangan kelas karena semua bentuk pengelompokan masyarakat didasarkan pada kelas. Padahal, untuk masyarakat yang berbasis pertanian agraris non industri seperti Asia, pertanyaan tentang kelas, menjadi dipertanyakan ulang.

Para pemikir Kiri Post-Marxis mengajukan kritik bahwa pandangan yang berbasis pada kelas sudah tidak cocok lagi untuk menjelaskan dinamika perlawanan masyarakat kekinian. Dengan kata lain, kelas sebagai *general theory* bagi alas analisis perjuangan rakyat telah mengalami keruntuhan, karena dalam perkembangannya sekarang, konflik sosial sudah keluar dari sekat-sekat berdasarkan kelas. Dewasa ini muncul banyak perjuangan yang “sudah melampaui kelas” semisal gerakan lingkungan, gender, anti rasisme, gerakan konsumen, dsb. Karenanya gerakan sosial baru diidentifikasi melalui tampilan

yang non kelas, dengan artikulasi ideologis, tujuan, dan nilai-nilai yang melintasi metode penjelasan Marxis yang berkisar pada istilah kelas dan formasi kelas.

Kajian yang lebih baru dari perdebatan tentang GSL dan GSB ini, dapat kita lihat dari hasil rumusan yang dijelaskan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Menurut Chantal Mouffe “gerakan sosial baru” (*new social movement*) – sebenarnya Mouffe lebih suka menyebutnya sebagai “perjuangan demokratik baru” (*new democratic struggle*) – haruslah dipahami sebagai bentuk perlawanan-perlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul dalam masyarakat kapitalisme tahap lanjut, dalam hal ini dia mengajukan empat posisi teoritis<sup>30</sup>:

*Pertama*, dalam setiap masyarakat, agen sosial adalah lokus bagi kerumitan dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti sex, ras, nasionalitas dan lingkungan. Semua hubungan-hubungan sosial yang ada akan mempengaruhi pembentukan personalitas atau posisi subyek. Oleh karena itu setiap agen sosial merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek, dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seorang buruh tani perkebunan yang ada dalam hubungan produksi didalam satu perusahaan perkebunan, adalah juga sebagai laki-laki atau perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Islam atau Kristen, suku Sunda atau Melayu, dan seterusnya. Subyektivitas seseorang bukanlah konstruksi yang hanya berdasarkan pada hubungan produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial, setiap posisi subyek, masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari kemungkinan berbagai konstruksi, sesuai dengan perbedaan wacana yang dapat mengkonstruksi posisi tersebut.

*Kedua*, menolak pandangan mengenai evolusi sosial yang diatur oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa kesatuan dari formasi sosial sebagai suatu hasil dari “*necessary effects*” yang diproduksi dalam *suprastructure* politik dan ideologi oleh *basicstructure* ekonomi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas logikanya sendiri, dan mengikuti logika tersebut. Logika yang secara absolut independen dari hubungan-hubungan yang

---

<sup>30</sup> Chantal Mouffe, “Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy” dalam Kate Nash (Ed), *Readings in Contemporary Political Sociology* (Oxford: Blackwell, 2000), hlm. 295.

akan dilihat determinan. Berbeda dari itu, Mouffe mengajukan konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu perangkat yang kompleks terdiri dari hubungan-hubungan sosial yang heterogen dan memiliki dinamikanya sendiri. Kesatuan suatu formasi sosial merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik, yang mana, pada gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek sosial yang memproduksi sebuah formasi hegemonik.

Ketiga, penjelasan tentang strategi formasi hegemonik. Menurutny, ini lebih merupakan materialisasi dari suatu artikulasi sosial, di mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi secara timbal-balik. Masing-masing saling menyediakan kondisi-kondisi eksistensi untuk saling membutuhkan, atau juga setidaknya menetralsir potensi dari efek-efek destruktif dari suatu hubungan-hubungan sosial dalam reproduksi dari hubungan-hubungan lain yang sejenis. Suatu formasi hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial tertentu. Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak mesti dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari hubungan-hubungan produksi sudah di berikan kepada kebijakan hegemonik. Meskipun demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan. Terlebih lagi, perkembangan kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang terus-menerus, yang secara periodik memodifikasi format-format sosial tersebut, melalui hubungan-hubungan sosial produksi yang memberikan garansi bagi pusat berlangsungnya perjuangan tersebut.

Keempat, semua hubungan-hubungan sosial dapat menjadi lokus antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai hubungan-hubungan subordinasi. Banyak format-format subordinasi yang berbeda dapat menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Hal ini dapat ditemukan dalam masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan anatagonisme kelas hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin untuk mereduksi semua format subordinasi dan perjuangan tersebut pada satu ekspresi logika tunggal yang ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi ini tidak dapat juga di abaikan dengan memposisikan sebuah mediasi kompleks antara antagonisme-antagonisme sosial dengan ekonomi. Ada banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat

yang tidak dapat direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.

Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan sosial bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi gerakan sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah satu-satunya, melainkan salah satu dari yang lainnya. Empat posisi teoritis inilah yang dijadikan dasar untuk melihat pemikiran Laclau dan Mouffe mengenai gerakan sosial.<sup>31</sup>

Koperasi Ciwangun, suatu studi kasus yang ingin dibahas dalam hasil penelitian ini adalah bagian dari gerakan petani. Gerakan ini akan diletakkan didalam berbagai bentuk dari gerakan sosial yang didefinisikan diatas. Teori-teori tentang pengelompokan “gerakan ini dan itu” didalam perdebatan yang ditampilkan diatas, tidak dapat menempatkan Koperasi Ciwangun ini hanya didalam satu kelompok teori tertentu didalam studi gerakan. Kadang, dia masuk kedalam bentuk-bentuk GSL yang memakai “kelas” sebagai basis perjuangan, tetapi untuk melanjutkan produksi di Koperasi, mereka seperti GSB, yang memakai cara-cara yang tidak berbasis “kelas” tetapi berbasis “budaya”, seperti yang akan dijelaskan pada bagian kedua dari tulisan ini.

#### 1.6 Signifikansi Penelitian

Pendefinisian Petani, gerakan sosial dan gerakan petani, telah banyak dilakukan dalam berbagai macam literatur, dari klasik hingga saat ini, seperti beberapa yang telah ditampilkan diatas, permasalahan yang berangkat dari tersingkirnya pemilik-pemilik tanah yang kemudian ditransformasikannya tanah dan tenaga mereka menjadi alat bagi perluasan model produksi kapitalisme, adalah salah satu titik berangkat persoalan tentang petani yang kemudian memunculkan *agrarian question*, yang dijawab, dipecahkan, dan dicari jalan keluar bagi persoalan tersebut.

Untuk Indonesia, penulisan dan pencatatan tentang bagaimana petani ini bergerak dan melawan suatu sistem yang menindas mereka, telah berkembang

---

<sup>31</sup> Pandangan mereka tentang gerakan sosial dan strategi apa yang harus diterapkan dalam menantang kebaruan situasi yang muncul itu di bahas didalam Laclau dan Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics* (Second Edition) (London: Verso, 2001)

demikian luas. Tetapi diskursus tentang gerakan petani, nampaknya mengerucut pada satu pembahasan yang sama, yaitu membicarakan petani-petani yang tergabung didalam organisasi tertentu, yang kemudian mendapatkan hubungan dengan kalangan aktivis di kota sebagai penghubung bagi masyarakat petani miskin dan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional, serta melakukan aksi-aksi kolektif dalam melakukan perlawanan terhadap situasi yang dimusuhi.

Penelitian ini, hendak mengangkat suatu bentuk gerakan petani yang bukan dianggap sebagai bagian dari *mainstream* didalam studi gerakan petani dan bukan juga bentuk "*daily resistance*" yang dirumuskan Scott, tetapi apa yang mereka lakukan, adalah suatu proses perlawanan terhadap cara-cara eksploitatif yang menyengsarakan mereka secara terorganisir didalam organisasi produksi dalam rangka menginterupsi model pelaksanaan pembangunan ekonomi kapitalis. Hanya saja, mereka tidak terhubung dengan kelompok-kelompok gerakan yang dibayangkan dalam diskusi tentang gerakan petani yang ada saat ini.

### 1.7 Metode dan Metodologi.

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah campuran antara cara-cara etnografi dan penulisan sejarah. Penelitian ini bukanlah sekedar sebuah pengumpulan informasi dan perekaman informasi dalam bentuk tertulis—melalui bahasa—setelah peneliti datang dan pulang dari lapangan, tetapi merupakan sebuah "dunia produksi" yang didalamnya terdapat proses penciptaan makna baru dalam proses dialog antara peneliti dengan informan-informannya.

Informasi yang kemudian menjadi catatan lapangan itu telah menjadi sebuah "penterjemahan" sebuah dunia, bukan cuma sekedar representasi dunia lain yang dikunjungi oleh seorang peneliti dalam proses penelitian mereka. Dalam kaitan inilah "pendefinisian gerakan petani oleh petani" dilakukan untuk menempatkan "petani sebagai pelaku sejarah", walaupun dalam banyak cerita, sejarah itu bukan seperti yang mereka inginkan".<sup>32</sup>

Sebagian keterangan dan informasi didalam penelitian yang dicari dan dikumpulkan didalam penelitian ini berasal dari lapangan, yang penulis

---

<sup>32</sup> Istilah ini dipopulerkan oleh Philip Mc Michael didalam tulisannya yang berjudul *Peasant Make Their Own History, But Not Just as They Please...* " Didalam Borras et.all. *Ibid.* Halaman 37.

kumpulkan sejak tahun 2008, 2009, dan 2010, 2011. Terutama pada tahun 2008 dan 2009, penulis mengumpulkan kembali catatan-catatan harian selama bergaul dengan aktivis, dan petani yang tergabung di dalam Serikat Petani. Catatan yang penulis kumpulkan adalah catatan-catatan perjalanan, dan hasil wawancara-wawancara non formal yang berhasil terekam, serta beberapa catatan yang sifatnya reflektif, catatan-catatan itu diambil kembali untuk keperluan penelitian ini karena dia dapat menggambarkan perkembangan “pengetahuan penulis” tentang pergaulan dengan gerakan tani.

Catatan-catatan ini, juga adalah hasil dari aktivitas yang penulis lalui di lembaga penelitian agraria dan pedesaan Sajogyo Institute, serta pergaulan dengan jaringan-jaringan *agrarianista* Indonesia (suatu sebutan terhadap aktivis dan pegiat isu agraria) yang berkantor di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Yogyakarta, catatan ini berupa hasil-hasil notulensi rapat-rapat yang diadakan dalam rangka menrespon isu konflik agraria di pedesaan, proses pengawalan kebijakan-kebijakan agraria, terutama kebijakan Reforma Agraria di Jawa Selatan (salah satunya Tasikmalaya), dan dari wawancara-wawancara yang sengaja dilakukan untuk penelitian tesis ini.

Dan sumber yang terakhir adalah penelusuran literature-literatur, terutama yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian sejarah tentang Indonesia, yang telah banyak dilakukan, baik dalam memaparkan secara histories sejarah perjalanan Indonesia dari waktu ke waktu, maupun tentang sejarah gerakan petani yang muncul sebagai respon atas kondisi-kondisi yang mereka hadapi sehari-hari di pedesaan. Didalam kepustakaan Antropologi tentang Indoneisa, Ann Stoller - menulis tentang perkebunan di Sumatera Timur –pernah memakai pendekatan seperti ini. Dia berhasil membawa realitas perkebunan Sumatera Timur –berikut cerita depresi orang-orang diperkebunan itu- menjadi aktual untuk dirasakan dan dipahami didalam ruang-waktu yang berbeda dari masa perkebunan itu ada.

Pendekatan yang penulis pakai juga diinspirasi dari apa yang dijelaskan oleh Charles Tilly dalam karyanya *The Vendee* (1976) tentang faktor-faktor ekologis radikalisasi petani yang terjadi selama revolusi Prancis pada abad ke-18. Tilly mengemukakan pentingnya menempatkan ekologi pertanian yang berbeda sebagai faktor yang melengkapi munculnya radikalisasi dan perlawanan keras

petani terhadap negara.<sup>33</sup> Di Asia Tenggara dan Indonesia, pendekatan serupa bisa dilihat dalam karya James C. Scott. Meskipun kajian Scott terbatas pada persoalan tentang kondisi-kondisi apa yang menyebabkan munculnya pemberontakan petani sehari-hari, namun ulasannya dengan menarik memberikan pemetaan terhadap ekologi pertanian yang berbeda dengan hasil radikalisme dan perlawanan yang berbeda pula di antara petani. Menurut Scott, struktur desa tradisional yang komunal di wilayah Annam, Tonkin, Dataran Tinggi Burma serta Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih mudah mengalami mobilisasi dan radikalisme, sebaliknya desa-desa yang terpecah secara struktural dan sosial seperti wilayah dataran rendah Burma dan Conchincina lebih sulit membangun kekuatan kolektif dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Pendekatan yang hampir sama juga pernah dilakukan oleh Marvis Bunker Taintor tentang *ekologi radikalisme petani di Indonesia pada tahun 1960-an*. Analisisnya menunjukkan bagaimana pola ekologi pertanian di Jawa memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk dukungan dan mobilisasi para petani di pedesaan terhadap Partai Komunis Indonesia. Menurut Taintor, PKI berhasil mendapatkan dukungan kuat dari para petani di wilayah dataran lembah yang terstruktur dalam hubungan penyakapan atau bagi hasil yang kuat.<sup>34</sup>

Pendekatan seperti ini membutuhkan upaya menjadi bersama dengan orang lain (*being with other people*) dalam menanggapi peristiwa sesuai dengan yang terjadi, dan 'memiliki pengalaman' seperti pengalaman orang-orang (*members experience*) yang terlibat di dalam kesatuan agro ekologi yang sama. Bagaimanapun, seperti dikatakan Emerson, etnografer adalah seorang 'pendatang luar' dengan cara dan situasi apapun. Kunjungan mereka sifatnya singkat saja, dan juga pemahaman-pemahaman mereka tentang dunia bagaimanapun telah terbentuk sejak awal dalam sebuah setting dan konteks masyarakat lain di luar subyek penelitiannya. Dalam kaitan ini hal pokok yang harus diperhatikan adalah kesadaran bahwa penelitian lapangan dan penulisan laporannya merupakan proses tak berhenti bagi setiap etnografer dalam

---

<sup>33</sup> Charles Tilly, *The Vendee*, Harvard University Press. London, 1976. Halaman 25.

<sup>34</sup> Marvin Bunker Taintor. *An Ecological Model of Peasant Revolution: The Indonesian Communist Experience, 1952-1965*. Ph.D. Dissertation. New York State University, 1979.

melakukan studi-studi mereka, dan selanjutnya adalah konstruksi pengetahuan mengenai 'the other' yang terus menuntut proses refleksi terus-menerus.

Penelusuran literature, sebagai bagian penting didalam pengkayaan analisa, penulis lakukan terutama terhadap literature yang telah mendokumentasikan tentang perlawanan-perlawanan petani di Indonesia yang muncul sejak dahulu sebagai respon mereka terhadap perlakuan yang membuat mereka kehilangan tanah dan kehilangan kesempatan menjadi sejahtera, literature tentang gerakan petani ini, juga penulis lengkapi dengan bacaan-bacaan terbaru yang memperlihatkan perbedaan karakteristik gerakan petani di Indonesia sejak dulu sampai sekarang.

Tersedianya informasi yang sampai diatas karya tulis ini, merupakan proses tawar-menawar yang sangat lama dengan orang-orang di lokasi penelitian. Berbagai keberatan, sanggahan, dan tanggapan, mengiringi proses negosiasi itu. Wawancara-wawancara yang dilakukan pun memiliki banyak kelemahan, terutama berkaitan dengan informasi umur dari informan yang diwawancarai dan kaitannya dengan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Tetapi walaupun begitu, beberapa informasi yang berhasil saya paparkan didalam tulisan ini telah melalui tahap pengkonfirmasi sumber informasi ke lebih dari satu orang informan.

## BAB II

### *Disana Tidak Ada Gerakan Petani, hanya Koperasi Petani.....*

#### **(Belajar dari Koperasi Buruh Tani Ciwangun)**

Bagian ini akan menjelaskan tentang perjalanan orang-orang di Ciwangun.<sup>35</sup> Dari mulai mereka menjadi buruh perkebunan yang datang sebagai buruh kuli kontrak pada akhir abad 19 –paska perang jawa- untuk program penanaman kopi di Priangan, hingga menjadi petani merdeka dengan Koperasinya yang tangguh. Orang-orang ini ikut didalam putaran roda zaman yang terus menerus berjalan. Mereka menjadi bagian dari sketsa yang diceritakan pada bab sebelumnya. Bergabung menjadi anggota SI *Afdeling B* yang kemudian menjadi bagian dari SI-Merah, ikut menjadi bagian dari orang-orang yang ditahan pada penangkapan besar-besaran tahun 1927, dan muncul kembali pasca kemerdekaan sebagai bagian dari Barisan Tani Indonesia-awal.

Pasca penangkapan besar-besaran tahun 1926 – 1933, sementara yang lain ditahan, sebagian yang lain telah mengkaitkan dirinya dengan guru-guru dari PNI-baru yang dipimpin oleh Syahrir-Hatta. Pada masa inilah pendidikan awal tentang perKoperasian didapatkan oleh buruh perkebunan Ciwangun, yang nantinya menjadi jalan bagi pembentukan Koperasi buruh kebun. Pada Zaman Jepang, buruh kebun Ciwangun yang bisa baca tulis direkrut menjadi tenaga pembantu administrasi perkebunan. Gabungan antara pendidikan bawah tanah Syahrir-Hatta dan pendidikan kedisiplinan dari Jepang ini, kemudian menjadi tuas selanjutnya yang dijadikan modal bagi mereka untuk pendirian Koperasi.

---

<sup>35</sup> Informan tertua dalam pengambilan wawancara ini berumur 80 tahun, dia tidak mengalami masa-masa awal (kuli kontrak), hanya mengalami masa penjajahan Jepang. Sementara cerita masa awal, diceritakan kembali oleh mereka yang didapat dari cerita orang-orang tua mereka.

Tahun 1947, pasca kongres Koperasi I di Tasikmalaya, mereka diajak oleh sebagian mantan-mantan PNI-Baru -yang pada waktu itu telah menjadi Partai Sosialis Indonesia- untuk ikut bergabung dengan Barisan Tani Indonesia-awal. Pendidikan perKoperasian terus dilanjutkan, terutama oleh aktivis-aktivis Partai Sosialis Indonesia. Hasil dari pengalaman belajar yang panjang itulah yang menuju pada berdirinya Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun pada tanggal 12 Maret 1952.

Mantan Buruh Tani ini, kemudian berpisah dengan BTI pada tahun 1953, ketika keputusan kongres BTI di Madiun memutuskan bergabung dengan PKI. Tahun 1954 mereka bergabung dengan pendidik-pendidik perKoperasian yang kemudian mendirikan Gerakan Tani Indonesia yang berada di bawah Partai Sosialis Indonesia. Koperasi ini melewati berbagai badai sejak itu, mulai dari pembubaran PSI oleh Soekarno, hingga polemik politik tahun 1965 yang membuat mereka berpikir keras untuk tetap bertahan. Penjelasan di bawah ini, akan mencoba untuk menjelaskan perjalanan Koperasi ini dari masa ke masa hingga bertahan sampai hari ini.

### 2.1 Kekalahan Perang Jawa, dan Suplai Tenaga Kerja ke Priangan.

Cerita ini berawal dari perang Jawa yang berkobar pada tahun 1825-1830 yang dipimpin oleh Diponegoro.<sup>36</sup> Keluarga Kraton Mataram ini gusar terhadap cara-cara kolonial merampas dan mengambil tanah-tanah rakyat dengan berkongkalingkong dengan keluarga kraton di Yogyakarta yang berhasil dipengaruhi Belanda. Pemberontakan ini kemudian menyebar luas hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti kebanyakan gerakan yang muncul pada masa ini dengan semangat *Messianism*-nya, gerakan Diponegoro juga begitu, dia memakai gelar *Erucakra*, yaitu gelar Ratu Adil yang dilekatkan kepada orang yang dianggap mampu menyelamatkan manusia Jawa dari kondisi ketertindasan. Mitos ini berkembang luas dikalangan para tokoh agama dan petani-petani di pedesaan.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan ND (63 tahun), JY (70 tahun), HK (76 tahun). Tanggal 5 April 2012. Mengenai asal-usul masyarakat di Ciwangun, hampir semua hasil wawancara menunjukkan kedatangannya dari sisa-sisa pasukan perang Jawa yang lari paska penangkapan Diponegoro.

Dalam catatan sejarah ketentaraan Belanda, perang ini adalah salah satu perang tersulit yang dihadapi oleh Belanda di Indonesia pada masa itu.

Pada tahun 1827, pihak Belanda telah berhasil menemukan satu strategi untuk memanfaatkan serdadu-serdadu mereka yang jumlahnya sangat terbatas. Mereka menerapkan benteng –stelsel, yaitu dengan cara menggerakkan satuan-satuan kecil pasukan bersenjata lengkap yang beroperasi secara terpisah-pisah di pos-pos yang terlepas dari benteng pusat di kota. Sehingga dengan cara ini, selain menghemat biaya, juga dapat langsung mengawasi pertumbuhan kaum pemberontak di desa-desa. Strategi ini berjalan efektif, pertumbuhan orang-orang yang bergabung dengan pemberontak mulai bisa diamati dan langsung dibasmi.

Strategi ini membuat gerak pasukan Diponegoro menjadi terbatas, hal ini ditambah dengan menyerahnya 2 orang panglima perang pendamping Diponegoro yang sangat terkenal yaitu Kyai Maja dan Sentot Alibasya. Pada Bulan Maret 1830, Diponegoro terpaksa mengikuti ajakan Belanda untuk berunding, kekuatannya yang sudah mulai melemah dimanfaatkan Belanda. Diponegoro ditangkap pada pelaksanaan perundingan itu, dia diasingkan ke Manado dan wafat disana pada tahun 1855. Perang Jawa telah berakhir dengan korban yang cukup banyak. Dipihak Belanda, perang ini menewaskan 8000 orang serdadu andalan mereka dan 7000 orang serdadu bayaran, sementara di pihak rakyat Jawa yang ikut Diponegoro, perang Jawa menewaskan hampir 200.000 orang, sehingga penduduk Yogyakarta menyusut separoh dari jumlah sebelum perang Jawa. Sisa-sisa pasukan Diponegoro yang tidak tertangkap kemudian melarikan diri ke Timur dan ke Barat. Sebagian orang-orang yang lari kearah Barat inilah cikal bakal dari kuli kontrak di perbukitan Selatan Tasikmalaya.<sup>37</sup>

Pekerjaan besar Belanda setelah perang Jawa adalah bagaimana cara mengeruk keuntungan sebagai bentuk dari dominasi kekuasaan mereka atas Jawa paska 1830. Pertanyaan ini menjadi rumit karena aktivitas VOC di Jawa Tengah

---

<sup>37</sup> Cerita ini adalah rekonstruksi saya dari wawancara di Ciwangun yang mengatakan bahwa mereka adalah turunan laskar perang Diponegoro yang lari dari Jawa Tengah. Pernyataan ini saya bandingkan dengan satu wawancara didalam agenda penelitian berbeda di Jember, Jawa Timur, mereka juga mengaku sebagai keturunan laskar perang Diponegoro yang lari karena tidak mau menyerah ke Belanda yang telah menguasai Mataram tahun 1830. Informasi ini saya gabungkan dengan cerita sejarah perang Diponegoro dari berbagai sumber.

dan Jawa Timur ternyata hanya menguntungkan oknum-oknum VOC yang terkenal sangat korup. Solusi yang paling tepat untuk biaya perang Jawa ini adalah menggenjot suatu program di Jawa Barat yang telah berlangsung sejak pertengahan 1700-an, yaitu program penanaman Kopi Priangan atau yang dikenal sebagai *Priangerstelsel*.<sup>38</sup>

Program penanaman kopi di Priangan ini terbukti telah berhasil mengeruk untung besar bagi penguasa kolonial.<sup>39</sup> Dan pada sepanjang tahun 1700-an membuat kopi dari Jawa Barat ini menjadi andalan VOC untuk menguasai pasar Eropa, dan Priangan menjadi produsen kopi terpenting bagi VOC. Ketika Perang Jawa selesai, program penanaman kopi ini sedang mengalami masa transisi kekuasaan dari VOC –yang telah dibubarkan pada 1799<sup>40</sup>-. Orang-orang yang datang setelah tahun 1830 (sisa-sisa pasukan diponegoro) ini kemudian diikutkan didalam program-program penanaman kopi baru dan pembukaan sawah-sawah baru di Priangan. Penguasa Kolonial yang bekerja dengan bangsawan-bangsawan lokal Priangan (menak) mengerti betul, bahwa mereka kedatangan tenaga tambahan dari sisa pasukan Diponegoro ini.<sup>41</sup>

Pada perjalanan sejarahnya, sisa-sisa pasukan Diponegoro ini harus ikut didalam penggalakkan penanaman kopi tahap kedua yang berada di bawah program *Tanam Paksa* yang diusulkan oleh Van Den Bosch. Tidak seperti masa ketika pemerintah Hindia Belanda bekerja melalui VOC, sistem Tanam Paksa ini dilakukan langsung oleh administrasi pemerintahan. Konsep dasar sistem ini menggunakan struktur desa sebagai tempat produksi, bahkan peran bupati ditiadakan oleh mereka.

---

<sup>38</sup> Artur van Schaik, “Banyak Pohon makan Lahan, Perkebunan kopi dan degradasi Lahan di Jawa abad ke-19”, *Prisma* 9, September 1994

<sup>39</sup> Mengenai informasi tentang keuntungan Kolonial pada program penanaman kopi ini dapat dilihat di Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Penerbit Aditia Media, 1994

<sup>40</sup> C.B. Boxer, *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602 – 1799*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

<sup>41</sup> Untuk lebih jelas tentang masa setelah 1830 dan hubungannya dengan kekuasaan *menak* atas keputusan pembukaan lahan-lahan persawahan baru, serta hubungannya dengan tenaga kerja yang datang dari Jawa, dapat dilihat pada: Tommy Svensson, *State Bureaucracy and Capitalism in Rural West java: Local Gentry versus Peasant Entrepreneur in Priangan in the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries*, 1991. Halaman 18.

Pada masa ini, untuk pertama kalinya, desa secara langsung menjadi unit peningkatan produksi yang secara langsung berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi Desa dijadikan wahana penggerak yang efektif, dengan kepemimpinan Kepala Desa, beserta segala perangkat kulturalnya seperti ikatan solidaritas (gotong royong), ketaatan pada pemimpin dan lainnya. Sistem Tanam Paksa ini didasarkan atas dua prinsip, yakni pertama, prinsip wajib/paksa seperti yang telah dilakukan dalam *Preanger* dan kedua, prinsip monopoli dimana hanya *Netherland Handels Maatchappij* yang diberi kewenangan untuk produksi, pengangkutan dan perdagangan hasil ekspor dari Jawa.<sup>42</sup>

Program penanaman kopi tahap kedua di Priangan ini menunjukkan hasilnya bagi keuntungan kolonial. Pada tahun 1837, di wilayah Priangan berhasil tumbuh 104 juta pohon kopi, yang berarti hampir 1/3 dari seluruh pohon kopi yang ditanam di Jawa.<sup>43</sup> Pada rentang antara 1837-1860, 86% dari seluruh penduduk pedesaan Priangan ikut serta dalam program tanam paksa ini.<sup>44</sup> Dan secara keseluruhan, hasil Tanam Paksa ini melebihi perkiraan sebelumnya. Nilai ekspor internasional dari Jawa yang di tahun 1830 adalah 11,3 juta guilder untuk 36,4 kg komoditas, melonjak menjadi 66,1 juta guilder di tahun 1840 untuk 161,7 juta kg komoditas.<sup>45</sup>

## 2.2 Berdirinya Perkebunan Ciwangun.

Tanam Paksa Priangan ini berakhir pada tahun 1870, ketika *Agrarische Wet* diberlakukan.<sup>46</sup> Mantan tenaga kerja tanam paksa yang bukan dari penduduk

<sup>42</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 – 1900, Dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: PT Gramedia, halaman 305 – 306

<sup>43</sup> R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System 1830 – 1870*, Sydney: Allen and Unwin, 1994. Halaman 86-87.

<sup>44</sup> Diambil dari tabel 5.1. Keterlibatan Penduduk Desa dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksadi Jawa, Periode 1837 – 1845, yang dimuat dalam Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Op Cit.*, halaman 58.

<sup>45</sup> C. Fasseur, “The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and The Indigenous Society in Nineteenth-Century Java”, dalam *Two Colonial Empires, Comparative Essays on the History of India and Indonesia in the Nineteenth Century*, C.A. Bayly and D.H.A. Kolff (Eds), Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1986, hal. 137.

<sup>46</sup> Ada 7 point penting dalam hukum agraria kolonial ini yang dicatat oleh Prof Singgih Praptodihardjo, yaitu: a. Gubernur Jendral tidak diperbolehkan menjual tanah. b. Larangan ini tidak termasuk terhadap tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa

asli setempat (seperti sisa pasukan perang Jawa yang diceritakan diatas) kemudian menempati daerah-daerah pinggiran di sepanjang Priangan, salah satunya adalah perbukitan Selatan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Masa ini didalam cerita turun temurun yang ada di Ciwangun, dianggap sebagai awal mula munculnya Desa di wilayah yang mereka tempati sekarang, seperti yang diceritakan oleh Eyang SRJ:

“nenek moyang kami berasal dari sisa-sisa pasukan Diponegoro yang kalah perang. Salah satu nama yang paling terkenal adalah Eyang Cakra, beliau dianggap sebagai pemimpin pertama orang Ciwangun. Dari cerita kakek saya, eyang Cakra adalah petani kontrak di perkebunan *Menak*, yang berada di Garut. Setelah kontrak nya habis, lalu dia berjalan untuk kembali kearah Timur-kembali ke Jawa Tengah-. Di tengah perjalanan, dia kehabisan perbelakan, dan bertemu dengan seorang perempuan puteri bangsawan di Singaparna (Tasikmalaya). Eyang Cakra akhirnya menikah dengan perempuan itu. Karena tidak mungkin untuk kembali ke Jawa, akhirnya dia diberikan tanah oleh penguasa di Singaparna, tempatnya ya.... Di Ciwangun ini....”<sup>47</sup>

Cerita tentang kampung Ciwangun berubah ketika *Agrarische Wet* ditetapkan. Hukum Agraria yang baru ini mengancam tanah-tanah yang ditempati oleh mantan-mantan tenaga kerja tanam paksa yang datang ke wilayah seperti di

---

demi kepentingan investasi perusahaan. c. Gubernur Jendral boleh menyewakan tanah menurut aturan undang-undang, dalam hal ini tidak termasuk tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli. d. boleh memberikan hak erpacht paling lama 75 tahun. e. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak-hak rakyat. f. Gubernur Jenderal tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau yang masuk lingkungan desa untuk penggembala ternak umum ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133; dan untuk keperluan perkebunan yang diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pengganti kerugian yang layak. g. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu Hak Eigendom, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda eigendom itu. Yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada negara dan desa; dan pula tentang hal menjualnya kepada orang yang tidak masuk golongan rakyat asli.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Eyang SRJ (80 tahun) tanggal 12 Desember 2011.

Ciwangun ini. Karena menurut hukum baru kolonial itu “bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak kepemilikannya adalah milik negara (*staatsdomein*)”.<sup>48</sup> Selain itu, undang-undang ini juga mengenalkan jenis-jenis hak yang baru, diantaranya adalah hak *erpacht*, yaitu hak penguasaan sejumlah wilayah untuk usaha perkebunan yang berlaku selama 75 tahun. Penguasaan wilayah yang dimaksud tentu saja terhadap tempat-tempat strategis yang dinyatakan cocok sebagai tempat penanaman komoditi perkebunan tertentu.

Wilayah yang kemudian dinamakan dengan Ciwangun ini adalah salah satu dari tempat strategis yang kemudian menjadi milik perusahaan Belanda. Tempat ini adalah bagian dari perbukitan yang membelah kawasan Selatan Pulau Jawa. Jika dilihat didalam peta geologi Jawa, perbukitan Selatan ini merupakan gugusan raksasa dari perbukitan Batu Kapur (Kars), tetapi gugusan ini akan terputus di bagian Priangan Timur, karena bukit Kars ini mengarah ke Utara dan menuju Pati (Jawa Tengah) dan baru kemudian turun lagi ke selatan menuju Gunung Kidul.

Lanjutan perbukitan yang menuju ke Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis) adalah perbukitan subur yang pernah dijadikan areal penanaman kopi oleh VOC. Desa Ciwangun ini berada di kawasan Selatan-tengah Kabupaten Tasikmalaya. Berada di ketinggian antara 700-790 dpl, dengan kelembapan yang sedang. Topografinya berbukit tetapi landai. Bukit yang seperti berlapis-lapis antara satu bukit dengan bukit yang lain itu dihubungkan oleh aliran-aliran sungai kecil yang berasal dari air tanah yang bermunculan di banyak tempat di sepanjang bukit-bukit ini. Wilayah Ciwangun jauh dari akses jalan besar yang menghubungkan pusat kota Tasikmalaya dengan kecamatan-kecamatan di Selatan, sehingga jarang didatangi oleh pejabat-pejabat kolonial dan menak-menak priangan yang ingin memungut pajak atau merampas hasil panen petani. Faktor inilah alasan kenapa daerah ini dipilih oleh nenek moyang orang Ciwangun sebagai tempat bermukim saat tanam paksa kopi mulai berakhir.

Tahun 1900-an awal, seorang peneliti Belanda datang ke Ciwangun. Dari wawancara dengan sesepuh yang masih ada di Ciwangun, mereka hanya ingat

---

<sup>48</sup> Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1952. Halaman 142-143

“orang Belanda yang membawa peralatan teropong dan alat ukur” tanpa mengetahui siapa nama dari peneliti itu. Dari informasi tentang alat yang dia bawa, sepertinya orang Belanda yang datang ini adalah tukang ukur yang bertugas memetakan daerah-daerah calon yang akan dijadikan tawaran ke perusahaan perkebunan. Cerita selanjutnya yang diingat oleh sesepuh di Ciwangun adalah, tahun 1905 (3 tahun sebelum perkebunan Ciwangun beroperasi) (dicocokkan dengan atlas perkebunan Hindia Belanda tahun 1900 – 1940) mereka kedatangan rombongan pejabat Belanda dan Residen Tasikmalaya yang dikawal oleh sejumlah polisi.<sup>49</sup>

Rombongan pejabat dan polisi ini kemudian mengumpulkan orang-orang disebuah lapangan di sebelah utara Ciwangun. Diantara yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah, pemberitahuan bahwa tanah-tanah di Ciwangun yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa “cap singa” atau bukti lain berupa surat dari pemerintah akan diambil untuk dijadikan perkebunan. Karena mereka adalah pendatang yang statusnya membuka wilayah baru paska tanam paksa, tentu saja mereka tidak memiliki sertifikat yang dimaksud, dan lanjutannya adalah, tanah-tanah yang mereka tempat harus diserahkan ke negara. Inilah bentuk operasional dari prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum kolonial Belanda yang telah dijelaskan diatas, terutama bagi pembangunan perkebunan-perkebunan besar milik Belanda yang bermunculan pada awal abad-20 di sebagian wilayah Jawa.

Akibatnya bagi sebagian besar penduduk yang telah tinggal di Ciwangun adalah, mereka harus menyerahkan tanah mereka untuk perusahaan perkebunan yang akan masuk ke Ciwangun. Dalam masa ini, sebagian penduduk kemudian meninggalkan Ciwangun, sementara yang lain tetap tinggal di Ciwangun setelah diiming-imingi dengan pekerjaan sebagai buruh perkebunan dengan gaji 3 gulden/bulan. Sebelum perusahaan perkebunan ini benar-benar beroperasi, pihak perusahaan mendatangkan sekitar 200 orang pekerja baru yang berasal dari beberapa wilayah di sekitar Jawa Barat.

Tahun 1908, perusahaan yang dimaksud diatas mulai beroperasi dengan nama *Straat Sunda Syndicaat N.V Cultuur Mij Ciwangun*. Dengan luas kebun sekitar 800 Ha, dan jumlah buruh 500 orang serta mengusahakan tanaman Teh,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pak HR (75 tahun) tanggal 5 April 2012.

Karet, dan sedikit Kina. Administrateur pertama perusahaan perkebunan ini dikenal oleh masyarakat Ciwangun dengan panggilan “Mister Bur”. Menurut cerita dari orang Ciwangun yang masih hidup saat ini – generasi ketiga-, Mr Bur seorang Jerman bertubuh tinggi besar dengan kumis tebal. Dia datang dengan rombongan polisi Belanda dan dikawal oleh sejumlah pejabat keresidenan Priangan Timur, dan membawa nyonya serta seorang noni. Sebelum Mr Bur datang, pihak perusahaan telah membuatkan dia rumah beton besar yang terletak di pinggir jalan. Rumah itu berada bersebrangan dengan kompleks perkantoran perusahaan yang dibangun bersamaan dengan rumah gedung tersebut.

Mr Bur memimpin perusahaan *Mij Ciwangun* ini selama hampir 10 tahun. Jika dihitung sejak tahun 1908, maka masa menjabat Mr Bur sekitar sampai tahun 1918. Peristiwa yang membuat Mr Bur berhenti adalah kasus pembunuhan terhadap salah seorang Nyai Mr Bur yang dilakukan oleh sekelompok orang dari kalangan buruh kebun.<sup>50</sup> Cerita tentang pembunuhan Nyai Mr Bur ini menjadi cerita yang sampai saat ini masih sering di tuturkan oleh masyarakat Ciwangun. Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap beberapa orang yang menceritakan kembali peristiwa pembunuhan Nyai Mr Bur ini, ternyata dilakukan oleh sekelompok buruh kebun yang saat itu sering belajar ke sebuah pesantren yang ada di Karangnunggal (5 Km dari Ciwangun). Mereka tidak hanya membunuh Nyai Mr Bur, tetapi juga orang-orang Belanda yang bekerja sebagai asisten-asisten perkebunan yang sering mengambil anak gadis sebagai perempuan simpanan di rumah mereka.

Sekelompok orang ini kemudian ditangkap pada tahun 1919 sebagai bagian dari penangkapan yang dilakukan pihak pemerintah kolonial terhadap aktivis-aktivis *SI Afdeling B*, -seperti yang diceritakan sebelumnya-. Walaupun tidak ada dokumen resmi yang berhasil didapatkan tentang keterlibatan orang-orang di Ciwangun ini dalam peristiwa pemberontakan *SI Afdeling B* di Garut

---

<sup>50</sup> Nyai didalam budaya masyarakat perkebunan adalah pelayan yang hampir mirip dengan gundik. Praktek pergundikan ini lazim bagi tuan-tuan Belanda yang datang ke Indonesia. mereka biasanya memilih perempuan lokal yang mereka sukai dan meminta perempuan itu tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Saat si perempuan sudah tidak disukai lagi, karena sudah tua atau tidak menarik, si tuan berhak memulangkan dia kerumah orang tuanya atau ke keluarganya, dan si tuan akan mencari lagi perempuan baru untuk dijadikan Nyai.

(Cimareme), dari wawancara yang dilakukan di antara sesepuh masyarakat Ciwangun, mereka meyakini bahwa kelompok orang yang ditangkap pada masa itu adalah bagian dari gerakan itu. Bukti lain yang meyakinkan tentang keterlibatan ini adalah, pernyataan dari salah seorang sesepuh yang telah hidup sejak zaman Jepang (1942), menurutnya: hingga tahun-tahun penjajahan Jepang, beberapa orang tua di Ciwangun, selalu mengingatkan anak-anak muda mereka untuk tidak melawan Jepang, agar tidak di tangkap seperti “*barudak-barudak Sarikat apdeling*”.<sup>51</sup>

Ada kebingungan di dalam menelusuri peristiwa sejarah keterlibatan buruh kebun Ciwangun didalam gerakan SI. Terutama tentang melihat kelanjutan gerakan SI di Ciwangun paska peristiwa penangkapan *barudak Sarikat apdeling* ini. Menurut beberapa cerita yang lain dari sesepuh di Ciwangun, hingga tahun 1930-an, menurutnya, bapak-bapak mereka masih sering mengikuti pertemuan-pertemuan di sebuah pesantren di Karangnunggal. Selain belajar agama, di dalam pertemuan-pertemuan itu juga sering diajarkan tentang kewajiban menjalankan Jihad dan berperang dengan Belanda. Dan orang-orang yang ikut didalam pertemuan-pertemuan itu sering membawa selebaran-selebaran untuk di berikan secara sembunyi-sembunyi kepada buruh-buruh kebun yang lain.

Terlepas dari simpang siur tentang cerita diatas, keikutsertaan buruh kebun di Ciwangun didalam aktivitas pergerakan awal SI tidak dapat diragukan. Apalagi jika dikaitkan dengan aktivitas SI Jawa Barat yang terkenal sangat berkiblat pada SI-Semarang pimpinan Semaun. Kelompok ini adalah bagian dari orang-orang yang aktif melakukan pendidikan-pendidikan politik di massa rakyat dengan menerbitkan brosur-brosur dan tulisan-tulisan pendek tentang pentingnya “melawan pemerintah kolonial”.

Memasuki periode tahun 1930-an, perkebunan ini ditimpa krisis finansial, akibat dari krisis keuangan Global yang melanda sebagian besar daratan Eropa. Produksi perkebunan mengalami penumpukan dan tidak bisa dijual, jikapun ada yang terjual, harganya sangat rendah. Pada tahun ini Ciwangun terkena wabah penyakit yang menewaskan hampir setengah dari populasi mereka. Akibat yang paling nyata setelah itu adalah, perkebunan ini kekurangan tenaga kerja untuk

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Pak HR (lebih kurang 80 tahun) tanggal 5 April 2012.

melanjutkan produksi perkebunan. Masa krisis ini, membuat sebagian kecil kelompok buruh perkebunan kemudian melarikan diri dari Ciwangun, mereka pergi mencari kerja ke lokasi lain di wilayah Bandung sebagai pekerja suruhan di kantor-kantor pemerintahan yang ada di Bandung. Kelompok kecil yang pergi ke Bandung inilah yang kemudian membuka jalan hubungan Ciwangun dengan kelompok PNI-Baru yang aktif melakukan pendidikan/perkaderan di Jawa Barat.

Kelompok kecil yang pergi ke Bandung ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Warsidi, seorang buruh perkebunan Ciwangun yang pintar, dia salah satu dari sedikit buruh kebun yang bisa baca-tulis pada masa itu. Setelah beberapa tahun (sekitar 3 tahun) pergi dari Ciwangun, Ahmad Warsidi balik ke Ciwangun, dan berhasil masuk menjadi pegawai administrasi di Perkebunan Ciwangun. Kembalinya Ahmad Warsidi tidak lepas dari pertolongan salah seorang pegawai Residen Priangan yang memiliki hubungan dekat dengan administratur perkebunan Ciwangun.

Kepulangan Ahmad Warsidi yang kemudian disusul oleh beberapa orang yang dulu bekerja di Bandung ini memberi jalan bagi masuknya aktivis-aktivis PNI-Baru yang pada masa itu sedang giat melakukan pendidikan tentang “bagaimana cara mengatasi dampak depresi ekonomi”. Dari penelusuran dokumen-dokumen PNI-Baru di Perpustakaan Indonesia Menggugat Bandung, diantara materi pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan tentang PerKoperasian (seperti yang akan di ceritakan pada bab ke IV didalam tulisan ini).

Tahun 1940, perkebunan ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda, karena dinilai tidak dapat menghasilkan setoran bagi pertumbuhan keuntungan. Semua tanaman teh dan kina dimusnahkan, diganti semua dengan tanaman karet. Sementara, karet-karet tua yang berasal dari sisa-sisa tahun 1908 diremajakan secara bertahap. Pada periode ini, telah terjadi perubahan peta politik global di dalam perang besar yang telah dimulai di Eropa dan Pasifik (perang dunia kedua), Jepang mulai menguasai daratan Asia. Proses peremajaan perkebunan Ciwangun, hanya berlangsung 2 tahun, karena pada 1942, Jepang telah masuk ke Indonesia dan memusnahkan semua yang berbau Belanda, termasuk membongkar kawasan-kawasan perkebunan di seluruh Jawa dan Sumatera, hanya beberapa yang disisakan untuk tetap beroperasi. Sebagian buruh-

buruh perkebunan yang dulu berasal dari daerah sekitar Tasikmalaya meninggalkan Ciwangun, sebagian yang lain, karena telah tinggal 2 generasi di daerah tersebut, tetap bertahan.

Tahun 1942, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, dikeluarkan undang-undang militer No. 22/1942. Dalam undang-undang itu dinyatakan, bahwa *gunseikan* (kepala pemerintahan militer) langsung mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, teh. Pelaksanaan mengawasi perkebunan tersebut diserahkan kepada sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh *gunseikan*. Badan pengawas itu bernama Saibai Kigyo Kanrikodan (SKK) yang bertugas selain mengawasi juga memegang monopoli pembelian dan menentukan harga jual hasil perkebunan.

*Gubseikan* dan *Saibai Kigyo Kankirodan* dibantu oleh staf-staf yang terdiri dari orang-orang pribumi yang telah lama bekerja di bekas-bekas kebun milik Belanda. Di Ciwangun, ada enam orang yang diambil bekerja membantu Jepang untuk mengurus perkebunan yang telah hampir binasa ini. Mereka adalah kelompok Ahmad Warsidi yang telah lama belajar dan memiliki hubungan dengan aktivis-aktivis PNI-Baru yang pada masa Jepang, mereka telah berpencar-pencar didalam berbagai organisasi. Tetapi yang paling diingat oleh masyarakat Ciwangun –hingga saat ini- adalah, kelompok yang dipimpin oleh Sutan Syahrir yang kelak mendirikan Partai Sosialis Indonesia, dan kelompok Hatta yang kemudian mendirikan SOKSI (Serikat Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) pada kongres koperasi pertama di Tasikmalaya.

Seperti kebanyakan daerah perkebunan lain yang ada di Indonesia, Jepang mewajibkan peruntukan lahan perkebunan sebagai tempat menanam komoditi tertentu yang dibutuhkan oleh Jepang. Terutama tanaman-tanaman pangan dan tanaman Jarak. Di Ciwangun, sebagian besar tanaman karet dimusnahkan dan diganti dengan tanaman Jarak, sementara untuk daerah yang landai, diubah menjadi persawahan. Gedung perkantoran perusahaan diubah menjadi gudang-gudang penyimpanan hasil panen. Beras dan Jarak itu akan diambil secara rutin oleh truk-truk besar untuk dibawa ke gudang penyimpanan di Tasikmalaya.

Kondisi sebagian besar mantan buruh perkebunan Belanda itu semakin lama tambah mengkhawatirkan. Setiap hari selalu ada yang melaporkan tentang

kematian warga Ciwangun yang sakit atau karena kelaparan. Hal ini membuat sekelompok pemuda Ciwangun gusar. Pada rentang antara tahun 1943-1944, mereka sering melakukan pencurian terhadap gudang-gudang penyimpanan beras di Ciwangun. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh Jepang dan berujung dengan penangkapan 30 orang pemuda Ciwangun, yang hingga saat ini tidak diketahui bagaimana nasibnya.

Melihat semakin terpuruknya kondisi masyarakat Ciwangun, dan ditambah dengan kejadian penangkapan 30 orang pemuda. Ahmad Warsidi dan rekan-rekannya di jajaran administrasi perkebunan mulai berpikir untuk mengatasi kondisi buruk itu. Mereka akhirnya mendapat dukungan dari kelompok bawah tanah PNI-Baru, dan mendorong dibuatnya koperasi konsumsi bagi buruh kebun Ciwangun. Hanya berlangsung 3 Bulan, koperasi konsumsi ini dibubarkan oleh Jepang. Pembubaran ini disebabkan oleh terungkapnya pengiriman barang dari Bandung yang didalam pakatnya berisi selebaran-selebaran anti Jepang. Cerita inilah yang memperkuat indikasi bahwa Buruh Kebun di Ciwangun menjalin kedekatan dengan kelompok Syahrir yang terkenal sangat anti dengan Jepang.

Masa Penjajahan Jepang, walaupun tidak lama, tetapi meninggalkan luka yang sangat dalam bagi orang-orang Ciwangun. Terutama bagi kalangan perempuan yang dijadikan bahan pemuas nafsu tentara-tentara Jepang. Di Ciwangun, ada sekitar 20 orang perempuan muda yang dibawa Jepang ke kota Tasikmalaya untuk dijadikan pemuas nafsu mereka di barak militer. Setelah Jepang kalah perang, sebagian berhasil pulang ke Ciwangun dengan membawa anak hasil pemerkosaan tentara Jepang, sementara sebagian yang lain tidak kembali ke Ciwangun. Selain itu, penjajahan Jepang juga meninggalkan kerusakan yang sangat parah di perkebunan Ciwangun, karena sebagian besar karet yang seharusnya menghasilkan, dirusak untuk kepentingan penanaman Padi dan Jarak.

### 2.3 Berdirinya Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun.

Ketika Jepang kalah, perkebunan Ciwangun telah kacau dan binasa, tumbuhan-tumbuhan karet muda yang belum menghasilkan telah merangas karena tidak dirawat. Walaupun masih ada karet yang menghasilkan, jumlahnya sangat

sedikit, dan umumnya terdapat dilokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman. Pada saat inilah tanah-tanah yang tidak terawat ini diolah oleh mantan-mantan buruh perkebunan disana menjadi lahan pertanian, terutama sawah dan tanaman palawija. Hasilnya sebagian mereka simpan di lumbung desa dan yang lainnya dijual ke Tasikmalaya secara berkelompok. Pola seperti ini terus berlanjut hingga tahun 50-an.

Situasi awal, paska penjajahan Jepang –awal kemerdekaan itu- diceritakan kembali oleh Pak ND, salah seorang tokoh masyarakat Ciwangun:

“perkebunan ini sudah tidak terawat, dibagian sebelah selatan (yang agak jauh dari pemukiman) sudah seperti hutan, gimana mau mengurus perkebunan ini, waktu zaman Jepang, kita kan tidak bisa bebas beraktifitas di kebun. Pokoknya seperti hutan lah.... Baru setelah Jepang pergi, kita mulai sedikit-sedikit menggarap kembali lahan-lahan itu. Tanah itu kan seperti makhluk hidup juga, kalau kita perlakukan dengan baik, dia akan mendatangkan hasil yang baik juga buat kita, tapi kalau kita terlantarkan, kita jauh lebih terlantar kehidupannya. Waktu awal jepang kalah, dan kita mendengar Bung Karno dan Bung Hatta sudah memproklamasikan Indonesia, saya dan beberapa orang rekan-rekan sesama buruh kebun mulai menggerakkan masyarakat untuk menggarap lahan-lahan terdekat yang ada di sekitar rumah mereka, sementara ada beberapa lain yang pergi meninggalkan Ciwangun, terutama yang ingin belajar, sekolah ke Bandung, nah itu yang mendirikan koperasi juga termasuk mereka itu... Pak Warsidi dan kawan-kawannya. Kalau saya ini penjaga kampung”<sup>52</sup>

Rentang antara tahun 1945 hingga 1950, beberapa orang tokoh buruh perkebunan –termasuk Ahmad Warsidi- terus melakukan hubungan dengan jaringan mereka yaitu kelompok Syahrir yang ada di Bandung. Terutama dengan seorang tokoh gerakan sosialis yang mempelopori kongres Petani pada November 1945 dan pendiri Barisan Tani Indonesia-awal yaitu M. Tauchid. Hubungan ini berupa pendidikan-pendidikan keorganisasian yang sering diadakan di

---

<sup>52</sup> Wawancara Pak JD (80-an tahun). 8 Mei 2012.

Tasikmalaya. Puncaknya adalah, dilibatkannya tokoh-tokoh mantan buruh perkebunan Ciwangun ini sebagai panitia persiapan kongres koperasi pertama yang diadakan di Tasikmalaya pada tahun 1947. Kongres koperasi di Tasikmalaya begitu membekas diingatan orang Ciwangun hingga saat ini, terutama generasi kedua yang pada waktu itu datang untuk mendengarkan pidato Syahrir dan Hatta di lapangan Dadaha Tasikmalaya. Pak ND menceritakan suasana pada waktu itu sebagai berikut:

“ jam 1 siang, selepas lohor saya dipanggil oleh Pak Warsidi, dia kebetulan waktu itu sedang pulang dari Bandung, karena sedang mengurus untuk persiapan acara di Tasikmalaya-kongres koperasi-. Dia memanggil saya untuk diminta menjadi seperti pembantu dia lah tapi kerjanya bukan pembantu di rumah, tapi menemani dia kalau ada acara-acara di Tasikmalaya. Saya kaget juga, karena kok bisa pak Warsidi meminta saya menjadi pembantu nya, padahal saya termasuk pemuda yang bandel lah kalau di kampung, waktu itu saya berumur sekitar 19 tahun. Orang-orang disini, mengerti semua, saya suka mencuri singkong warga, suka mengambil padi di lumbung.. (Pak ND mulai berkaca-kaca menceritakan pengalamannya waktu itu). Setelah saya di panggil, pak Warsidi mengelus kepala saya dan bilang “kita harus buat maju kampung kita ini, jangan mau menjadi anak turun buruh seumur hidup”, kata-kata itu tidak pernah saya lupakan sedetikpun hingga saat ini. Tugas pertama saya waktu itu yang masih saya ingat adalah mengumpulkan orang Ciwangun sebanyak-banyaknya untuk ikut ke lapangan Dadaha Tasikmalaya. Pak Warsidi bilang “Bung Syahrir mau datang besok ke Tasikmalaya” kita harus datang mendengar pidatonya. Saya tidak tahu siapa yang dia maksud Bung Syahrir itu. Selepas asar (sekitar jam 4) saya berhasil mengumpulkan sekitar 60 orang pemuda dan pemudi Ciwangun di rumah Pak Warsidi. Lalu pak Warsidi menyampaikan tentang kedatangan Bung Syahrir yang dia katakana tadi. Bung Syahrir itu guru kita, begitu katanya. Selepas sholat Isya, kami bersiap berangkat ke Tasik, jalan kaki, kira-kira 50 Km lah dari Ciwangun. Saya sudah tidak ingat, berapa orang yang ikut pada waktu itu, mungkin ada sekitar 100 orang. Jam 3 subuh kami sampai di

Tasik, menginap di sebuah gudang di dekat mesjid agung sekarang itu. Dan jam 8 kami telah siap di lapangan Dadaha, mendengar Bung Syahrir pidato. Wah.... Luar biasa... berbicaranya tenang, dia menjelaskan tentang kenapa kita harus menjalin kekuatan dengan koperasi, nah disana saya baru tahu, ternyata itu pembukaan kongres koperasi pertama di Tasik itu.”<sup>53</sup>

Setelah kongres koperasi di Tasikmalaya, 150 orang mantan buruh perkebunan di Ciwangun, bersepakat untuk mendirikan perkumpulan buruh perkebunan Ciwangun. Diantara hasil kesepakatan yang paling penting adalah, mereka akan mengambil alih seluruh area perkebunan bekas hak erpacht Belanda itu menjadi milik mantan buruh perkebunan yang masih ada di Ciwangun. Lahan seluas 745Ha itu –atas anjuran dari aktivis PSI dan BTI awal-dibagikan/redistribusi secara merata kepada seluruh keluarga buruh perkebunan di Ciwangun. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1949, atau tepatnya 11 tahun sebelum Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA ditetapkan. Sebanyak 400-an Ha diredistribusi kepada keluarga mantan buruh perkebunan dan sisanya dikelola secara kolektif oleh kelompok kerja yang kemudian terbentuk pada tahun 1950.

Pada periode ini, tidak banyak inisiatif yang dapat dilakukan. Setelah redistribusi pertama di Ciwangun ini, Belanda menyerang Indonesia melalui Agresi pertama dan kedua. Perkebunan Ciwangun segera menjadi tempat bagi pengungsi-pengungsi dari kota yang ketakutan akibat serangan militer itu. Paska perjanjian Linggarjati, daerah Perkebunan Ciwangun sempat dijadikan sebagai tempat singgah bagi pasukan *wingate* Divisi Siliwangi yang terpaksa “pulang kampung” akibat penciutan daerah Republik Indonesia. Menurut cerita yang sampai saat ini masih diingat, pasukan divisi Siliwangi yang dipimpin oleh A.H Nasoetion ini sempat sekitar 1 minggu tinggal di perkebunan Ciwangun. Mereka ikut dalam kegiatan-kegiatan gotong royong di kebun, dan setelah kondisi pasukan pulih, mereka diberikan perbekalan oleh masyarakat Ciwangun untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung.

---

<sup>53</sup> Wawancara Pak ND (78 tahun). 8 Mei 2012.

Emak RH, Salah seorang di Ciwangun yang ikut mempersiapkan bekal pasukan Siliwangi ini menuturkan pengalamannya sebagai berikut:

“setelah perang usai, dan pengungsi-pengungsi balik ke kampung mereka di kota, kami kedatangan pasukan pak Nasution (maksudnya Pasukan Siliwangi) kami diminta oleh pak Kuwu (kepala kampung) untuk membantu pasukan ini, mereka sudah lelah, berjalan dari Jawa kearah Bandung. Kami waktu itu, bekerja dengan semua perempuan yang ada di wanguwatie ini, tidak ada kelompok-kelompok an waktu itu, kalau sudah untuk perjuangan, apapun kami lakukan, karena kami merasakan betul bagaimana rasanya jadi orang terjajah. Sekitar satu minggu di Wagnunwatie, rombongan pasukan ini berangkat lagi ke Bandung. Semua penduduk disini memberikan sumbangannya, ada beras, ketela, kelapa, macam-macam. Pakaian mereka juga di cucikan, kalau ada yang bolong-bolong ditambalkan. Nah.. hasil bantuan kita itu lah yang berbuah dengan kebun ha ga u (HGU) itu.”<sup>54</sup>

Setelah kondisi mulai membaik dengan berakhirnya perang fisik di KMB. Kelompok kerja mulai dibentuk di Ciwangun. Bersamaan dengan itu, Menteri Pertanian -Mr Sadjarwo- mengeluarkan Surat Keputusan No.05/KPTS/1950 pada tanggal 2 agustus 1950. Surat itu mengatakan bahwa sisa-sisa perkebunan Ciwangun kembali dikelola/diusahakan oleh para mantan buruh yang masih ada di lokasi perkebunan dengan cara bergotongroyong. Momentum ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Ciwangun, diantaranya Pak Abdul Abbas dan Ahmad Warsidi, serta dibantu beberapa orang petugas administrasi (yang pernah menjadi staff di *Gubseikan* dan *Saibai Kigyo Kankirodan*). Mereka membentuk Komite Pemulihan Kesejahteraan Buruh Ciwangun (KPKBC).

Sementara untuk urusan perkebunan yang tersisa dari redistribusi tahun 1949 dibentuklah DPKC (Dewan Penyelenggara Kebun Ciwangun). DPKC ini bertugas untuk menghidupkan kembali sisa perkebunan yang masih bisa digarap. Keputusan untuk membentuk DPKC ini karena instruksi yang diberikan oleh

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Emak RH (79 tahun) tanggal 7 Mei 2012.

Presiden RI kepada Penyelenggara Perkebunan Negara untuk mengurus Perkebunan Ciwangun tidak dapat dilaksanakan berhubung karena situasi yang masih belum stabil di pemerintahan Nasional RI. lewat Surat Wakil Kepala Djawatan Perkebunan Kementrian Pertanian tertanggal 24 Mei 1951 No. E.1309/PKB.<sup>55</sup> maka perkebunan Ciwangun diserahkan pengurusannya kepada mantan buruh tani yang ada disana.

Setelah urusan Redistribusi selesai, DPKC yang bekerja atas mandat dari KPKC mengadakan survey yang dibantu oleh tenaga dari Inspektorat Agraria Jawa Barat. Survey ini bertugas untuk mengidentifikasi luas perkebunan yang masih bisa dimanfaatkan, dan mengidentifikasi tanaman karet yang masih bisa menghasilkan. Pada akhir tahun 1951 diputuskanlah hasil dari tim survey KPKC ini, yaitu tanah sisa hasil redistribusi sebanyak 280 Ha, tanaman karet yang masih menghasilkan sekitar 40 Ha, untuk peremajaan dan ditanam ulang berjumlah 150 Ha, sementara sisa yang lain sebanyak 90 Ha berupa tanah keras dan lereng yang tidak bisa di tanami. Selain itu, survey ini juga membuka jalan bagi Inspektorat Agraria Jawa Barat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Redistribusi yang terwujud ditahun 1962.

Perjalanan awal menuju pembentukan kelembagaan koperasi ini bukan dilewati dengan mulus. Keputusan redistribusi yang dilakukan diawal, dan hasil kerja tim survey KPKC mendapat protes dari sebagian kalangan, terutama beberapa mantan buruh perkebunan yang merasa mendapatkan bagian tanah redistribusi lebih sedikit, atau yang mendapatkan bagian di lokasi yang sulit dijangkau dan jauh dari pemukiman. Momentum inilah yang kemudian membuat DPKC mengumpulkan ulang mantan buruh perkebunan Ciwangun yang mendapatkan tanah redistribusi. Dalam pertemuan ulang itu, Abdul Abbas dan beberapa tokoh Ciwangun yang lain, menawarkan opsi untuk pembentukan koperasi sebagai wadah untuk pengelolaan kebun kolektif.

Selanjutnya tanggal 2 Mei 1952 berdasarkan hasil musyawarah para anggota DPKW, maka secara resmi berdirilah sebuah koperasi dengan nama

---

<sup>55</sup> Inti dari surat tersebut berisi tentang: Kebun Ciwangun yang masih ada karetnya diberikan kepada bekas pegawai-pegawai kebun Ciwangun untuk diusahakan, Modal kerja dicari sendiri oleh pegawai-pegawai tersebut, Hasil kebun disalurkan kesaluran yang legal dan syah, Semua peraturan tersebut diatas bersifat sementara dan pemerintah berhak merubahnya sedang semua yang berkepentingan harus tunduk padanya.

Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun (KBPC) dengan bentuk usaha perkebunan karet. Tiga bulan setelah koperasi didirikan, dilakukan pengukuran secara manual oleh kelompok koperasi ini dan menemukan bahwa tanah yang dapat diusahakan untuk perkebunan seluas 280.20Ha dari 748,35. Sementara sisa yang 468,15 Ha lainnya telah menjadi garapan mantan buruh tani yang juga sekaligus menjadi anggota koperasi yang didirikan.

Berdasarkan RAT pertama Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun pada tanggal 3 Juli 1953, dicapai kesepakatan, bahwa tanah seluas 468,5 Ha itu adalah hak anggota koperasi dan hanya diperbolehkan menggarap dan atau memiliki tanah tidak lebih dari 2 Ha saja. Jika ada yang menggarap lebih dari 2 Ha, maka sisanya harus diberikan kepada petani penggarap dengan lokasi garapan terdekat yang memiliki kurang dari 2 Ha, atau hasil dari kelebihan tanah 2 Ha tersebut menjadi modal koperasi.<sup>56</sup> Tentu saja ada yang tidak mau ikut didalam Koperasi, dan mereka dipersilahkan memilih. Dalam RAT pertama ini ada 160 orang yang ikut sebagai anggota, sementara sisanya sekitar 120 orang tidak ikut didalam Koperasi Ciwangun. Untuk mantan buruh penerima redistribusi tanah yang tidak ikut Koperasi, diberikan kelebihan tanah masing-masing 0.5 Ha sebagai kompensasi bahwa mereka tidak berhak menerima hasil dari kebun kolektif Koperasi.

Berdirinya Koperasi Buruh Perkebunan Karet Ciwangun (KBPKC) ini, tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh banyak pihak yang bersimpati pada perjuangan mereka. BTI melalui M.Tauchid adalah salah satu pendukung gerakan awal KBPKC dalam menata pondasi organisasi produksi mereka. Menurut Ketua Koperasi Ciwangun sekarang (Pak ND), dukungan M.Tauchid terhadap Koperasi Produksi di Ciwangun ini karena menurutnya ini adalah contoh dari bentuk perjuangan tani yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1950-an itu.

Perjuangan tani serentak yang dimaksud, jika dihubungkan dengan penguatan kelembagaan gerakan Koperasi di Indonesia pada masa-masa itu, berhubungan dengan politik pemerintah Soekarno yang ingin mengeluarkan

---

<sup>56</sup> Hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun, tanggal 3 Juli 1953. Dalam daftar hadir, rapat anggota ini dihadiri oleh 215 orang anggota koperasi, dan 3 orang peninjau dari organisasi Gerakan Tani Indonesia.

kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Tetapi polemik politik tingkat nasional yang begitu rumit membuat usaha-usaha perjuangan ini tersendat, walaupun usaha-usaha menuju kearah persiapan nasionalisasi tetap dilakukan di tingkatan massa rakyat oleh aktivis-aktivis dari berbagai organisasi pendukung Revolusi Indonesia.

Pengaruh dari polemik politik tingkat nasional diatas terhadap perjuangan BTI adalah pecahnya kelompok Komunis dengan Sosialis yang terdapat didalam tubuh BTI. Untuk di Ciwangun sendiri, pada tahun 1953, datang 4 orang utusan dari Partai Sosialis Indonesia yang juga aktifis di BTI, mereka datang sebagai utusan dari M.Tauchid, untuk menceritakan hasil dari Sarasehan petani di Jakarta yang baru saja berlangsung. Salah satu hasil sarasehan itu adalah bergabungnya BTI bersama dengan Sakti dan RTI (lihat pada bab sebelumnya) a dengan Partai Komunis Indonesia.

Pada hari itu, semua pengurus KBPKC dikumpulkan di gedung pertemuan koperasi (bekas gudang Jepang). 4 orang utusan dari PSI yang sengaja dikirim oleh M.Tauchid ini bertugas menanyakan kepada KBPKC apakah mereka masih tetap ingin bergabung dengan BTI yang telah menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia, atau keluar dari BTI ?.<sup>57</sup> Jika keluar, kemana afiliasi organisasi tani KBPKC ? Pertanyaan ini terjawab 2 Bulan setelah pertemuan itu, pada tanggal 17 September 1953, M.Tauchid bersama dengan beberapa orang yang tidak setuju meleburnya BTI dibawah Partai Komunis Indonesia mendirikan Gerakan Tani Indonesia (GTI), dan KBPKC resmi bergabung dengan Gerakan Tani Indonesia yang dipimpin oleh M.Tauchid.

Model organisasi yang dibangun oleh GTI adalah penguatan landasan wadah organisasi tani yang berorientasi pada perjuangan hak atas tanah serta pendidikan. Jika dilihat didalam pasal-pasal yang dituangkan didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga GTI.<sup>58</sup> Organ ini sangat mirip dengan tujuan PNI-Baru yang dibangun oleh Syahrir dan Hatta pada tahun 1933, yaitu perkaderan. Rumusan-rumusan tentang strateginya juga cukup

---

<sup>57</sup> Wawancara Pak JJ (62 tahun) tanggal 2 Mei 2012.

<sup>58</sup> Untuk lebih detail, dokumen-dokumen GTI tentang masalah agraria dapat dilihat di <http://tokohitamblackchamber.blogspot.com/2011/06/dokumen-kumpulan-agraria-partai.html>.

beragam, seperti menempatkan perjuangan petani sebagai produsen, kelas sosial, kelompok politik dan ekonomi, dengan melakukan perbaikan kondisi kaum tani melalui cara produksi modern dan politik agraria yang membebaskan.<sup>59</sup>

Pendidikan GTI seperti yang diuraikan diatas, semakin membuka jalan terang bagi KBPKC untuk melaksanakan proses produksi selanjutnya. Setelah PEMILU tahun 1955 -yang di Ciwangun dimenangkan oleh PSI-, mereka melakukan program peremajaan tanaman karet secara bertahap. Utusan KBPKWC dikirimkan ke Bandung yang difasilitasi oleh pengurus GTI agar mendapatkan bantuan bibit unggul karet dari Djawatan Pertanian. Tahun 1956, atas dukungan dari M.Tauchid yang pada waktu itu telah menjalin hubungan dengan DKI (Dewan Koperasi Indonesia), KBPKC mengadakan pendidikan kader gerakan Koperasi di Tasikmalaya.

Rentang antara tahun 1956 – 1959, adalah masa-masa sulit bagi KBPKC, karena ditingkat nasional, hubungan antara pemerintah pusat dan kelompok PSI Syahrir telah memburuk. Retaknya hubungan ini tidak terlepas dari terlibatnya Soemitro Djojohadikoesoemo<sup>60</sup> –menteri kesejahteraan rakyat dan seorang aktivis PSI- pada pergolakan PRRI di Sumatera. Keterlibatan Soemitro ini dijadikan salah satu alasan bagi presiden Soekarno untuk membubarkan PSI lewat surat Penetapan Presiden No.7/KPTS/1960. Tetapi sebelum pembubaran PSI, KBPKC telah mendapat Badan Hukum dengan Nomor 2108 dari dinas Koperasi pada tahun ke-7 berdirinya Koperasi ini, yaitu pada tanggal 6 April 1959. Sejak itu secara legal, Koperasi ini mulai mengembangkan usahanya bermodalkan kebersamaan para anggota yang ada, dengan tetap mengusahakan perkebunan karet sebagai inti usahanya.

Pembubaran PSI, berakibat terhadap organisasi-organisasi yang berada dibawahnya termasuk GTI. Untuk itu, melalui keputusan Rapat Anggota tahun 1960, Anggota KBPKC bersepakat untuk melepaskan atribut-atribut GTI – walaupun GTI tidak ikut dibubarkan-. Semua atribut-atribut GTI kemudian diganti dengan hanya atribut Koperasi untuk mengelabui persengketaan elit

---

<sup>59</sup> Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian. *Almanak Pertanian 1954*. Jakarta. Gerakan Tani Indonesia. halaman 146 -147.

<sup>60</sup> Soemitro dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, idenya yang paling terkenal pada masa kabinet Syahrir adalah pemberian penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil dan Koperasi.

nasional antara PSI dan Soekarno. Bersamaan dengan itu lahirlah Undang Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) sebagai Produk hukum agraria baru menggantikan produk hukum agraria kolonial.

Pada tahun ini Karet hasil peremajaan mulai mendatangkan hasil, KBPKC segera menindak lanjuti hasil ini untuk mencari pembeli di Bandung, tetapi karena kualitasnya kurang bagus, penjualan karet ini tersendat hingga tahun 1961. Seorang pengusaha di Bandung yang dulunya menjadi simpatisan PSI, melihat peluang kerja sama untuk memasarkan karet Ciwangun ini. Tanggal 15 April 1961 KBPKC mengirimkan karet mentah sebanyak 2000 Kwintal untuk dijual kepada pengusaha di Bandung itu yang dibeli dengan harga diatas rata-rata harga pasar. Pengusaha inipun kemudian mengusulkan kepada KBPKC agar memikirkan cara bagaimana menjual karet bukan dalam bentuk mentah, tetapi setengah jadi. Usulan ini akhirnya terwujud 15 tahun kemudian, tetapi penjualan karet mentah terus dilanjutkan, hasil dari penjualan itu, selain di simpan menjadi tabungan Koperasi, juga dijadikan modal bagi pengembangan kelanjutan peremajaan pohon Karet. Sementara untuk biaya hidup anggota, mereka mengandalkan dari hasil tanah redistribusi. Tahapan awal ini, tabungan anggota bukanlah uang, tetapi tenaga.

Perjalanan berat selanjutnya telah menunggu dihadapan mata KBPKC. Paska penetapan UUPA, Partai Komunis Indonesia telah berhasil menarik perhatian banyak massa rakyat yang sebagian besar berada di kawasan-kawasan perkebunan, dan pedesaan. Momentum ini telah dimanfaatkan oleh PKI melalui BTI sebagai upaya bagi pelaksanaan tujuan pemakmuran kaum tani. Inilah dikemudian hari disebut sebagai *Aksi Sepihak*. Untuk Ciwangun, karena disana telah berdiri kelembagaan yang kuat oleh KBPKC, propaganda PKI untuk melakukan pengambilan tanah tidak dapat dilakukan, karena, semua tanah telah diperuntukkan bagi mantan-mantan buruh tani, dan sebagian yang lain di kelola secara kolektif melalui Koperasi.

Menurut penuturan dari Pak YY di Ciwangun:

Pada masa itu, memang ada utusan dari BTI mendatangi Ciwangun, mereka mengatakan tentang pembentukan panitia landreporem-maksudnya

Land Reform- di tingkat kecamatan. Utusan dari KBPKC diminta ikut didalam kepanitian tersebut. Dalam perjalanannya, kok kami tidak pernah lagi diundang, ya sudah.... Kami biarkan saja. Ciwangun sudah lanreporem duluan daripada BTI, jadi tidak menjadi masalah. Ketakutan kami waktu itu hanya, kalau BTI sampai menyerang KBPKC dengan kekuatan senjata.... Nah itu.. jika kejadiannya begitu, mungkin ceritanya menjadi lain... kami tidak akan bertahan sampai sekarang, mungkin kami ikut BTI dan ikut ditangkap oleh tentara Soeharto, atau kami malah mati dibunuh oleh aksi BTI itu.<sup>61</sup>

Menjelang kondisi politik nasional benar-benar menuju kearah pemburukan yang lebih serius, pada tanggal 4 Juni 1965, keluar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. LR.249/D/VIII/60/1965. Surat itu menyatakan tentang redistribusi tanah bekas perkebunan karet Ciwangun seluas 468,15 Ha kepada 240 KK petani. -yang sebagian nya merupakan anggota dari Koperasi KBPKC-. SK yang dikenal dengan nama SK KINAG ini disimpan di kantor KBPKC dengan alasan keamanan.<sup>62</sup> Momentum ini semakin menguatkan posisi mantan buruh perkebunan Ciwangun terhadap tanah yang mereka kuasai. Izin Koperasi telah resmi dikeluarkan tahun 1959, dan sekarang, pengakuan terhadap kepemilikan tanah pribadi pun telah disahkan pemerintah.

Ketika terjadi peralihan kekuasaan yang dramatis di Indonesia pada akhir 1965 yang kemudian disusul dengan pembantaian dan penangkapan terhadap simpatisan PKI di berbagai wilayah di Indonesia, Ciwangun termasuk wilayah yang aman. Justru dia dijadikan tempat perlindungan bagi simpatisan PKI yang terancam ditangkap oleh pemerintahan baru pimpinan Soeharto. Kondisi ini tidak terlepas dari situasi regional Jawa Barat pada tahun 1965 – 1967 yang berada

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Pak YY (78) tanggal 5 April 2012.

<sup>62</sup> SK yang dikenal dengan nama SK KINAG ini disimpan di kantor Koperasi untuk menghindari razia ketika terjadi polemik tahun 1965. Dibeberapa wilayah pedesaan Jawa Barat terjadi pengambilan kembali SK KINAG ini oleh aparat pemerintah Orde Baru karena mereka menginginkan agar tanah-tanah bekas perkebunan yang telah diredist dijadikan perkebunan kembali untuk diusahakan oleh Perkebunan Pemerintah (PTPN) dan Perkebunan Swasta. Pengambil alihan oleh negara ini terjadi hingga tahun 70-an ketika dimulainya kembali bermunculan perkebunan-perkebunan besar milik pemerintah dan swasta, seperti kondisi yang sama pada zaman kolonial.

dibawah kendali pengaruh kuat dari Divisi Siliwangi pimpinan Ibrahim Adjie. Dan tentu saja pengaruh kedekatan personal masyarakat Ciwangun dengan petinggi-petinggi divisi Siliwangi yang pernah singgah dalam perjalanan longmarch mereka dari Jawa Tengah ke Jawa Barat pada tahun 1949 dahulu.

#### 2.4 Masa Pengembangan Koperasi Ciwangun

Memasuki dasawarsa ketiga (tahun 1970), dimana kekuasaan politik Indonesia dikuasai oleh rezim Orde Baru dengan corak yang sama sekali berbeda dari masa Soekarno. Hal paling penting yang dilakukan oleh Koperasi Buruh Perkebunan Ciwangun adalah melakukan perubahan nama dari Koperasi Buruh Perkebunan Karet Ciwangun menjadi Koperasi Karyawan Perkebunan Karet Ciwangun (KKPKC).

Perubahan nama ini adalah bagian dari strategi Koperasi Ciwangun untuk menghindari “stigmatisasi” Orde Baru terhadap hal yang berbau Orde Lama yang dianggap Komunis. Penggantian kata-kata “Buruh” menjadi “karyawan” ini melalui perdebatan sengit yang terjadi pada RAT tahun 1969. Berbagai pertimbangan dan usulan sebenarnya mengarahkan agar tidak terjadi pergantian nama, tetapi karena alasan keamanan, Rapat Anggota akhirnya menyetujui perubahan nama itu. Sementara produksi karet mengalami kemacetan karena sulitnya pengiriman barang dari Tasik ke pelabuhan Jakarta.

Untuk mengatasi dampak kemacetan penjualan, pada RAT tahun 1970, KKPKC memutuskan untuk memperluas unit usaha Koperasi mereka ke bentuk simpan pinjam. Perluasan model usaha ini telah memungkinkan untuk dilakukan, karena uang yang tersimpan di kas Koperasi sudah mencukupi untuk diputar sebagai modal simpan pinjam. Tetapi jenis usaha ini tidak dapat berkembang, karena tidak banyak anggota Koperasi yang meminjam, justru simpanan di Kas Koperasi semakin menumpuk. Pada akhir tahun 1970 itu, atas inisiatif dari beberapa orang pengurus, diputuskanlah untuk segera mencari pasar baru bagi penjualan karet.

Produksi karet Ciwangun, sedikit demi sedikit mulai membaik, karena mereka sekarang telah mendapat pembeli yang berani menandatangani perjanjian kontrak jual beli hingga 3 tahun. Pada Bulan Agustus 1973 atas anjuran dari

pemerintah daerah, mereka bergabung dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia<sup>63</sup> yang telah didirikan pada tanggal 27 April 1973 di Jakarta. Bergabungnya KKP KC dengan HKTI membukakan jalan bagi mereka untuk kegiatan perluasan produksi karet. Selain itu, pada masa ini juga telah diberlakukan kebijakan intensifikasi tanaman pangan melalui program revolusi hijau, yaitu –salah satunya- dengan membentuk kelembagaan Koperasi Unit Desa di hampir semua desa di Indonesia. Anggota KKP KC pun ikut bergabung dengan KUD yang ada disana, tetapi mereka mengerti bahwa KUD bukanlah koperasi sungguhan yang dapat mereka andalkan seperti Koperasi yang telah mereka dirikan di Ciwangun.

Setelah mereka bergabung dengan HKTI, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi partai politik menjadi 3 partai untuk Pemilu 1977. Partai-partai nasionalis dan agama selain Islam menjadi Partai Demokrasi Infonesia, partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan, dan satu Golongan Karya yang sesungguhnya adalah mesin politik Soeharto. Pengurus-pengurus KKP KC mengambil kesempatan itu untuk bergabung dengan Golkar, strategi ini disadari oleh pengurus KKP KC pada waktu itu yang menyebut sebagai “masa-masa menjadi bunglon”, alasan mereka hanya satu, agar KKP KC tidak diacak-acak oleh aparat-aparat pemerintah Orde Baru.

Tahun 1977, ketika keadaan politik nasional mulai distabilkan paksa oleh rezim Orde Baru, koperasi yang berhasil melewati masa krisis politik tahun 60-an itu kemudian melakukan pembenahan. Arsip-arsip Koperasi yang sempat disembunyikan mulai ditata kembali. Sebagian keuntungan penjualan karet mulai

---

<sup>63</sup> HKTI adalah organisasi tani bentukan pemerintah Orde Baru, menyusul setelah dibentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia, Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Korps wanita Indonesia, dan organ-organ lainnya. Pembentukan ini, adalah strategi pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan ideology yang Pancasila, serta untuk memudahkan pengawasan terhadap rakyat Indonesia agar tidak lagi memakai nama-nama warisan dari politik Orde Lama khususnya Partai Komunis Indonesia. Pada waktunya, strategi ini efektif untuk menjadi mesin politik dari Golongan karya yang memobilisasi kantong-kantong masa yang ada di dalam organ bentukan pemerintah ini. Untuk HKTI, dia adalah gabungan dari 14 organisasi tani yang diantaranya adalah sisa pasca razia Orde Baru tahun 1965, mereka adalah Pertani (PNI), Perta (MURBA), GTI (PSI), Gertami (PERTI), Gertasi (PSII), Pertakin (PARKINDO), Sakti (Non Partai Politik), Pertanu (NU). Kata Pancasila (IPKI), Petisi (Non Partai Politik), IP Pancasila (Partai Katolik), Warga Tani Kosgoro (Kosgoro – Golkar), Tani MKGR (MKGR – Golkar), SOKSI (SOKSI – Golkar).

diperuntukkan bagi perbaikan bangunan-bangunan tua yang sudah mulai rapuh. Bekas gudang Jepang yang telah dijadikan aula dibongkar dan diganti dengan bangunan permanen, sementara perkantoran bekas perkebunan Belanda yang hampir roboh, di pindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis. Pembenahan infrastruktur ini berlangsung hingga tahun 1980.

Masalah selanjutnya yang harus diselesaikan KKP KC adalah persoalan legalitas hak kepemilikan atas tanah. Semua bukti kepemilikan tanah di Ciwangun, belum memiliki posisi yang benar-benar kuat didalam sistem pertanahan yang ditetapkan oleh Orde Baru, atau dengan kata lain, semua pengakuan hak kepemilikan di Ciwangun adalah produk Orde Lama yang tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Tanah milik pribadi masih berupa SK KINAG tahun 1965, sementara tanah kolektif hanya berupa surat keputusan Menteri Pertanian tahun 1950. Kerawanan itu disadari oleh pengurus KKP KC dan sejak tahun 1983, mereka mulai merintis jalan kearah penguatan hak pribadi dan kolektif di Ciwangun.

Birokrasi Agraria pada masa Orde Baru, seperti yang dijelaskan oleh Noer Fauzi Rachman didalam buku *Land Reform dari Masa ke Masa*, adalah “pengerdilan urusan agraria untuk kepentingan administrasi pertanahan”. Model pengelolaannya dipusatkan di Kementrian Agraria yang pada tahun 1987 dijadikan sebagai bagian dari kementrian Dalam Negeri. Konsekuensi yang harus dijalani oleh KKP KC adalah, mereka harus berurusan dengan birokrasi pertanahan Orde Baru yang sangat anti dengan produk perizinan Orde Lama yang saat itu masih dipakai oleh KKP KC. Kesulitan ini akhirnya ditempuh dengan jalan pintas “ala Orde Baru” yaitu gaya “main belakang”. Memanfaatkan kedekatan orang-orang Ciwangun dengan Divisi Siliwangi, pada akhir tahun 1988, 4 orang utusan KKP KC –dengan alasan silaturahmi- mendatangi rumah Jendral (purnawirawan) AH Nasoetion di Jakarta. Kedatangan utusan KKP KC ini berkepentingan untuk menindak lanjuti pengurusan hak atas tanah seperti yang dijelaskan diatas.

Atas usaha dari pengurus KKP KC yang dibantu oleh Ikatan Legiun Veteran Siliwangi yang sangat dekat dengan rakyat di Ciwangun, Pak Nasution (Jendral AH Nasution) memberikan secarik kertas kecil yang ditujukan ke Sony

Harsono (menteri agraria), kertas itu berisi kalimat pendek yang isinya “*Pak Sony, Tolong berikan izin kepada Koperasi Rakyat ini mengelola Kebun Karet mereka di Tasik, syarat-syarat sementara sudah dilampirkan, yang lain akan disusul*”. Sobekan kertas kecil itu kemudian menjadi “surat sakti” bagi KKPKC. Pada 20 Juli 1989, keluarlah keputusan untuk memberikan Hak Guna Usaha dengan nomor 47/HGU/BPN/1989 kepada Koperasi Karyawan Perkebunan Karet Ciwangun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Pemberian HGU itu secara hukum formal Orde Baru tidaklah memenuhi persyaratan, tetapi karena HGU itu langsung diberikan oleh pimpinan Badan Pertanahan Nasional-Sony Harsono-, tidak satupun aparat pemerintah di Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat yang memprotes pemberian HGU itu.

Sejak dikeluarkannya HGU, mulailah produksi diarahkan untuk dinaikkan kapasitas produksinya, kebun yang tidak produktif mulai diremajakan kembali, sementara untuk pembibitan, Koperasi Ciwangun mengirimkan anggotanya belajar di kebun-kebun karet sekitar desa, dan beberapa kali ikut belajar di sekolah-sekolah yang diadakan oleh dinas pertanian dan perkebunan di balai pelatihan pertanian. Dari pengalaman belajar yang diikuti ini, kemudian diterapkan di perkebunan Koperasi Ciwangun.

Tahun 1990, satu tahun setelah BPN memberikan satu-satunya HGU di Indonesia yang dimiliki oleh Koperasi rakyat ini, KKPKC (Koperasi Karyawan Perkebunan Karet Ciwangun) menukar nama menjadi Koperasi Produksi Perkebunan Karet Ciwangun (KPPKC). Penghilangan kata “karyawan perkebunan karet” ini adalah manifestasi dari “rasa merdeka” yang telah utuh dimiliki dalam pengelolaan hak kolektif mereka. Momentum ini juga membuat Pengurus Koperasi menjadi percaya diri menampilkan diri didalam pasar Karet Tasikmalaya. Tuntutan untuk bisa menghasilkan karet yang bagus sebagai kompensasi bagi “kebun yang tidak punya izin” selama hampir 30 tahun membuat banyak pembeli yang puas dengan produksi Ciwangun.

Pada Rapat Anggota Tahun 1993, berdasarkan hasil kesepakatan dengan semua anggota, Koperasi Ciwangun menegaskan untuk tidak lagi menjual karet mentah keluar, tetapi harus berupa olahan setengah jadi yang biasa disebut Shet (dibaca shit). Untuk mendirikan pabrik pengolahan karet mentah menjadi shet ini,

dibutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena pengolahannya pasti membutuhkan infrastruktur untuk penampungan karet mentah, penggilingan karet mentah menjadi lembaran, dan tungku pembakaran.

Akhir tahun 1993, KPPKC mengajukan peminjaman kredit di salah satu bank besar di Tasikmalaya. Setelah menunggu hampir 1 bulan, bank yang dimaksud memberi kabar ke KPPKC bahwa mereka tidak dapat mengabulkan permohonan peminjaman uang, karena KPPKC tidak memiliki aset berharga di kota. Penolakan itu disambut KPPKC dengan Rapat Anggota kedua pada tahun yang sama, mereka bersepakat untuk tidak meminjam ke Bank atau meminta bantuan pemerintah, tetapi mengusahakan agar dapat membeli sendiri semua kebutuhan. Untuk itu, mereka kemudian membentuk tim kerja yang bertugas untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan agar dapat mewujudkan pabrik pengolahan karet sendiri.

Selain itu, menurut Pak ND, alasan untuk tidak meminjam ke Bank karena:

“kalau kita meminjam ke Bank, tangan dan kaki kita akan diikat dengan bunga bank yang harus dibayar. Kalau hasil produksi kita untuk bayar bunga bank, wah, itu sama dengan memberi makan pengusaha bank. Dan kalau kita setiap bulan terdorong untuk memacu produksi membayar bunga bank, nah.. disana munculnya pemerasan keringat anggota.. ya sudah lah... kami tidak akan meminjam ke bank, solidaritas kita selama ini ternyata bisa diandalkan untuk melanjutkan produksi kok, ngapain mengandalkan bank”<sup>64</sup>

Setelah tim kerja berjalan lebih kurang sebulan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPPKC, diputuskan untuk segera menindak lanjuti hasil RAT 1993 itu. Kas Koperasi yang berjumlah Rp. 43.000.000,- yang berasal dari tabungan anggota dan keuntungan penjualan karet segera di belikan ke mesin penggilingan di sebuah pabrik besi bekas di Kota Bandung. Mesin itu dibeli dengan harga yang sangat murah, tetapi membutuhkan proses perbaikan yang sangat mahal. Sisa dari

---

<sup>64</sup> Wawancara Pak ND, tanggal 6 Mei 2012.

perbaikan itulah yang dijadikan sebagai modal pembelian semen, dan batu untuk membuat gedung pengolahan.

Untuk tungku dan pembakaran, mereka mendirikan bangunan bambu yang dibuat sesederhana mungkin. Sementara untuk pembakaran, mereka menggunakan ranting-ranting dari pohon karet yang selalu ada setiap hari. Mereka menyebutnya dengan “memutar energi”, yaitu semacam perputaran bahan-bahan alam dari proses-proses alam hingga ke produksi komoditi. Awal tahun 1994, setelah melewati berbagai cara untuk mewujudkan pengolahan sendiri, akhirnya KPPKC berhasil menjual produksi shet pertama mereka. Penjualan shet ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi KPPKC, karena harga karet shet bisa 3 atau 4 kali lebih tinggi dari pada harga karet mentah.

Penguatan produksi ini diikuti dengan semakin kuatnya posisi KPPKC didalam politik perkebunan di Jawa Barat yang sangat didominasi oleh pejabat-pejabat PTPN. Ketua KPPKC yang sekaligus menjadi administrator perkebunan Ciwangun diajak oleh Solihin GP (mantan gubernur Jawa Barat pada masa Orde Baru) untuk ikut di Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat. Ajakan ini segera dimusyawarahkan didalam Rapat Bulanan pengurus, dan mereka bersepakat untuk menerima. Sejak tahun 1995, KPPKC menjadi anggota resmi Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat. Sisa-sisa sejarah lama KPPKC yang sangat dikhawatirkan mengancam posisi KPPKC semakin ternetralisir.

Momentum penting yang juga patut dicatat dalam sejarah Ciwangun adalah ketika krisis Moneter 1998 melanda sebagian daratan Asia. Pada tahun ini harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Harga nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika (sebagai mata uang standar) merosot drastis dari Rp.2500 per \$ 1 menjadi sekitar Rp. 9.000 – 10.000 per \$ 1. Tetapi kondisi ini justru menguntungkan penjualan karet shet Ciwangun. Stok gudang yang telah diproduksi sejak sebelum ongkos produksi naik –April, Mei 1998-, terjual dengan harga sangat tinggi pada bulan Juli 1998. Keuntungan Koperasi yang melimpah ruah ini segera dialihkan ke peremajaan total seluruh areal perkebunan karet Ciwangun dan pembelian armada pengangkutan tambahan. Disamping itu, dalam rapat RAT tahun 1999, diputuskan untuk menaikkan gaji karyawan -baik itu yang

harian di kebun, maupun yang bulanan di kantor- menjadi 3 kali lipat dari jumlah semula.

Selama menjalankan produksi perkebunan, Koperasi ini tetap menjaga azas “sama rata sama rasa” terbukti dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani disana dari tahun ketahun, yang paling jelas terlihat adalah berhasilnya masyarakat desa ini menghadang laju *booming* migrasi internasional (pemberangkatan buruh-buruh migran sebagai Tenaga Kerja Wanita) yang terjadi pada rentang tahun antara 1994 hingga tahun 2000 di Jawa Barat. Sementara itu, Koperasi ini mendorong dibuatnya Sekolah Menengah Umum didalam desa, yang diperuntukkan bagi generasi-generasi muda penerus usaha perkebunan Koperasi ini, dan menyediakan bea siswa seperti “ikatan dinas” terhadap pemuda dan pemudi di desa untuk kuliah dan kembali ke desa untuk menjaga-menghidupkan Koperasi.<sup>65</sup>

Pada tahun 1999, KPPKC terpilih menjadi Koperasi terbaik di Jawa Barat dan mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi Adi Sasono. Penerimaan penghargaan ini kemudian membuka jalan bagi KPPKC untuk aktif di organisasi Koperasi kabupaten dan provinsi yang pada masa-masa sebelum itu tidak pernah diikuti oleh KPPKC kecuali KUD. Hingga tahun 2005, KPPKC telah mendapatkan 14 buah penghargaan tingkat daerah, provinsi, dan Nasional sebagai Koperasi berprestasi. Sementara itu Ketua Koperasi KPPK pada tahun 2003 dinobatkan sebagai tokoh Koperasi Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Puteri.

Perjuangan Koperasi ini juga terlihat dari dorongan mereka kepada BPN RI pada proses pensertifikatan tanah-tanah redistribusi tahun 1965. Seperti yang dijelaskan diatas, SK KINAG yang dulu dibagikan oleh Inspektorat Agraria Jawa barat kepada penerima redistribusi di Ciwangun belum disertifikatkan akibat kendala pada masa Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang, pengurus KPPKC mulai menjajaki kemungkinan pensertifikatan tanah di Ciwangun itu di BPN. Tahun 2002, melalui upaya loby yang cukup alot, BPN kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan semua sertifikat tanah redistribusi 1965 itu kepada semua daftar

---

<sup>65</sup> Sejak tahun 2000 – 2007, hampir 50 orang muda-mudi pedesaan di Ciwangun yang mengabdikan bekerja di Koperasi, mereka memilih kembali ke desa setelah menamatkan studi di sekolah-sekolah dan universitas di kota.

penerima redistribusi. Semua proses pensertifikatan itu dilakukan oleh KPPKC dengan biaya sendiri, tanpa meminta iuran dari masyarakat penerima redistribusi tanah.

Untuk proses *on farm*, KPPKC melakukan kerja sama dengan LPP (lembaga Pelatihan Pertanian) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, terutama tentang cara-cara pembibitan dan pemilihan *klon* unggulan. Tahun 2005 dibuatlah kebun pembibitan jenis bibit unggulan di areal perkebunan. Kawasan kebun bibit ini menjadi tempat sekolah lapang bagi para pekerja-pekerja KPPKC. Mereka belajar sendiri tanpa instruktur, dan tahun 2010 kebun bibit ini telah menghasilkan berbagai jenis bibit unggulan berbagai jenis yang siap ditanam. Proses pembibitan inilah yang mengawali niat KPPKC mengadakan suatu program kemitraan karet rakyat di desa-desa yang berdekatan dengan Ciwangun.

Prestasi yang ditunjukkan ini berbuah bagi kemajuan KPPKC, salah satunya adalah kesepakatan perjanjian jual beli karet shet Ciwangun antara KPPKC dengan PT Bridgestone Int Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2007 di Jakarta. Bridgestone melalui agen pengirimannya langsung menjemput Karet Shet ke Ciwangun setiap waktu yang telah ditentukan. Perjanjian kontrak dengan Bridgestone ini juga diikuti dengan introdusir teknologi pengolahan dari pabrik ban terbesar di dunia ini. Sejak tahun 2007 -2009, Bridgestone telah mengadakan 4 kali pelatihan pengolahan karet shet bagi pekerja-pekerja pengolahan di KPPKC.

Hingga sekarang, Koperasi ini terus berkembang. Bahkan dalam tahun 2011, mereka melakukan kebijakan “penertiban tanah terlantar” di Ciwangun. Kebijakan ini dihasilkan pada RAT tahun 2011, yaitu melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah redistribusi 1965 dan sertifikat 2002 yang tidak digarap oleh pemiliknya. Pada tahun 2011 tim yang dibentuk oleh Koperasi berhasil menemukan 6 bidang tanah dengan luas totalnya kira-kira 11 Ha yang tidak digarap oleh pemiliknya, dengan rincian keterangan 4 bidang pemiliknya tinggal dan bekerja di Jakarta, dan 2 bidang pemiliknya sudah meninggal dan ahli warisnya tinggal di Luar Jawa.

Pemilik/Ahli waris tanah-tanah terlantar ini kemudian dihubungi oleh Koperasi dan disarankan untuk dijual kepada Koperasi. 4 bidang tanah yang

pertama diizinkan untuk dijual kepada Koperasi dengan harga Rp.50.000/meter persegi, sementara 2 bidang tanah yang lain belum mendapat persetujuan. Pembelian tanah terlantar oleh Koperasi ini dilakukan untuk menambah asset Koperasi diluar HGU. Menurut ketua KPPKC, ini dalam rangka “mengamankan posisi Koperasi agar dapat diwariskan”. Jadi, jika HGU Koperasi mengalami masalah dan bangkrut, setidaknya mereka masih memiliki asset tanah diluar HGU yang bisa dimanfaatkan.

Selain terobosan penertiban tanah terlantar ini, KPPKC juga melakukan program kemitraan karet rakyat. Kegiatan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab KPPKC sebagai Koperasi yang tidak hanya memakmurkan anggota, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar Koperasi. Program kemitraan ini adalah kerja sama yang dibangun dengan petani-petani yang memiliki tanah kurang dari 2 Ha untuk penanaman karet. Petani kemitraan dibentuk menjadi kelompok-kelompok yang bidang tanahnya berdekatan. Satu kelompok beranggota 10 orang pemilik lahan. Koperasi akan memberikan bibit karet dan melakukan pelatihan berupa sekolah lapang, mulai dari persiapan lahan, hingga ke perawatan. Menunggu panen (sekitar 4 tahun) petani pemilik lahan kemitraan juga dilatih untuk menanam tanaman tertentu yang cocok untuk tumpang sari. Setelah panen, petani akan dibimbing lagi untuk pemanenan dan dimasukkan ke bagian pengolahan. Sehingga petani kemitraan tidak menjual karet mentah lagi, karena telah dibantu oleh Koperasi untuk mengolahnya menjadi shet. Hasil penjualan, akan dibagi tiga. 70% untuk petani pemilik lahan, 20 % untuk Koperasi, dan 10% untuk kas kelompok kemitraan.

Design kemitraan ini terus dikembangkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Belum ada yang bisa dijadikan contoh tentang keberhasilan kemitraan ini. Bahkan KPPKC pun belum berani mengeluarkan klaim bahwa kemitraan ini berhasil atau tidak. Tetapi semangat untuk memajukan perekonomian rakyat dengan modal kekeluargaan dan azas sama rata sama rasa, diperlihatkan dalam cara KPPKC berhubungan dengan petani-petani kemitraan ini.

### **BAB III**

#### **LATAR SEJARAH**

#### **MUNCUL DAN TENGGELAMNYA GERAKAN TANI DI INDONESIA**

Penjelasan ini akan dimulai dari melihat bentangan sejarah penindasan terhadap petani yang ada di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejarah penindasan itu, berhubungan dengan munculnya respon dari petani-petani yang dimasukkan didalam sistem model ekonomi baru tersebut berupa perlawanan dalam berbagai bentuk yang kemudian disebut sebagai bagian dari gerakan sosial di Indonesia. Pembahasan ini berguna untuk memberikan alas bagi pembahasan tentang naik turunnya praktek dan tuturan tentang gerakan petani.

Koperasi Ciwangun, didalam sejarahnya, telah mengambil posisi didalam cerita penindasan panjang dan perlawanan panjang itu. Penjelasan pada bagian ini akan meletakkan konteks sejarah perjuangan petani dari awal mula penindasan panjang zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), tumbuhnya gerakan besar komunisme dan Sarekat Islam hingga kongres petani 1945. Setelah itu akan dilanjutkan dengan babakan lahirnya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), serta bertukarnya penguasa Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi dan sekarang ini. Bentangan cerita didalam periode-periode tersebut, berhasil dilalui dari waktu ke waktu oleh koperasi Ciwangun, hingga saat ini.

#### 3.1. Gerakan Petani dan Penindasan VOC.

VOC adalah rombongan pedagang “bersenjata” yang bertujuan untuk memperluas area dagang mereka ke dunia-dunia baru diluar Eropa, hal pertama yang dilakukan VOC adalah menguasai kantong-kantong ajaib yang menjadi pusat dari keberadaan sumber daya produktif rakyat di kepulauan Indonesia dengan cara menjadikan struktur lama feodal sebagai perpanjangan kaki tangan VOC di wilayah-wilayah produktif tersebut.<sup>66</sup> Tindakan VOC ini dilakukan dengan mengeruk sumber daya alam dan menjadikan rakyat di kepulauan

---

<sup>66</sup> Sartono Kartodihardjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500 – 1900, dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia, 1987, halaman 150 – 154.

Indonesia sebagai tenaga kerja bagi keuntungan perdagangan mereka. Berjalannya cara-cara kerja VOC ini erat kaitannya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tentang SDA ditetapkan di kepulauan Indonesia pada waktu itu dengan berbagai bentuk dan dinamika.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda pada awalnya adalah mereka mentransformasikan suatu pola baru produksi pertanian yang awalnya berupa pertanian rakyat (skala kecil, subsistensi, berpindah, kepemilikan komunal masih ada) menjadi pola pertanian kehutanan dan perkebunan yang penguasaannya ditujukan untuk sebuah perputaran modal dan kapital luas dengan kebijakan teritorialisasi dan sistem produksi khusus bagi keuntungan berlipat oleh kongsi dagang VOC.<sup>67</sup>

Untuk beberapa daerah di kepulauan nusantara, kebijakan teritorialisasi dan sistem produksi khusus yang dimaksud diatas tampak dalam ditegaskannya pola produksi yang dinamakan dengan perkebunan dan kehutanan.<sup>68</sup> Pada beberapa wilayah di kepulauan Indonesia, kebijakan ini biasanya mengikuti temuan-temuan peneliti-peneliti VOC yang menemukan kecocokan suatu wilayah agro ekologi untuk pemusatan produksi komoditi tertentu. Hal ini berlaku untuk kawasan yang nantinya disebut sebagai kawasan hutan dan perkebunan, misalnya, penemuan jenis tembakau *Nga ogst* di Jember pada tahun 1850-an, mengawali proses perampasan brutal tanah-tanah di Jember dari petani-petani desa oleh perusahaan perkebunan Belanda dan menjadikan wilayah Jember sebagai perluasan wilayah administrasi keresidenan Besuki, afdeling Bondowoso.

Begitupun di wilayah hutan di pantai utara Jawa, ketika kayu jati ditemukan pada tahun 1670-an sebagai jenis kayu yang baik untuk industri kapal dan pengembangan pelabuhan, maka dilakukanlah penaklukan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kesultanan Cirebon pada tahun 1681, bahkan setelah itu VOC melakukan penaklukan hingga ke daerah jawa Tengah yang dikuasai oleh

---

<sup>67</sup> Untuk lebih detail tentang bagaimana VOC bekerja dalam logika pengumpulan keuntungan ini, Noer Fauzi Rachman, seorang guru Reforma Agraria di Indonesia, menjelaskan secara detail terutama untuk kawasan Priangan, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah di Tatar Priangan*, dalam Gunawan Wiradi, *2 Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: YOI. 2009.

<sup>68</sup> Noer Fauzi Rachman. *Ibid*.

penguasa Mataram.<sup>69</sup> Di Priangan yang sekarang daerahnya meliputi provinsi Jawa Barat, perubahan yang besar disana terjadi ketika pada tahun 1707 (100 tahun lebih dulu dari Jember dengan tembakau Nga ogst) ketika VOC menemukan kecocokan tanah disana untuk penanaman kopi yang kemudian mengawali sejarah pahit petani disana dengan dimulainya apa yang disebut sebagai Tanam Paksa di Priangan atau *Priangerstelling*.<sup>70</sup>

Setelah VOC bangkrut akibat korupsi yang terjadi dalam perusahaannya, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih semua penguasaan yang sebelumnya dimiliki VOC setelah membubarkannya pada tahun 1799.<sup>71</sup> Pada tahun 1830 dengan alasan permasalahan biaya perang dengan Belgia dan biaya pertempuran di Hindia Belanda (kepulauan Indonesia) serta peningkatan industri dalam negeri Belanda, pemerintah kolonial melalui gubernur Jendralnya Van Den Bosch menerapkan apa yang dikenal dengan *Forced Cultivation System* (tanam paksa).<sup>72</sup> Kebijakan ini berakhir pada tahun 1870 ketika kelompok liberal Belanda memenangkan pertarungan politik dan mengusulkan sebuah regulasi baru pada pengelolaan negara jajahan. Khusus untuk Hindia Belanda, dikeluarkanlah suatu Undang-Undang Agraria yang dikenal dengan *Agrarische Wet*.

*Agrarische Wet* terkenal dengan prinsip *Domein Verklaring* (atau *Domein Theory*). Hukum ini memunculkan jenis hak baru dalam penguasaan tanah di Indonesia yaitu: *eigendom* adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh penuhnya dan untuk menguasai seluas luasnya, *tanah partikelir*, yaitu tanah *eigendom* yang mempunyai sifat dan corak istimewa, dengan adanya hak hak pada pemilikinya yang bersifat kenegaraan seperti; dapat turut menentukan kepala kampung, dapat menuntut Rodi, mengadakan pungutan-pungutan atas jalan, *hak opstal*, adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan

<sup>69</sup> Peter Boomgard, "Forest and Forestry in Colonial Java 1677 – 1942", makalah yang dipresentasikan pada *Conference on Environmental History of Pacific*, Canberra, Australia, 1987.

<sup>70</sup> Situasi pahit penanaman kopi di Priangan ini, dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo pada buku *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Penerbit Aditia Media, 1994. hal. 33. Sumber lain adalah karya terbaru dari Professor Jan Bremen yang berjudul *Koloniaal Profijt van Onvrije Arbeid*.

<sup>71</sup> C.B. Boxer, *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602 – 1799*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

<sup>72</sup> Djoko Suryo, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu dan Masa Datang" dalam *Prospek Pedesaan 1990*. Yogyakarta, P3PK-UGM. 1991.

atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain, hak ini diberikan untuk paling lama 30 tahun. *Erfpacht* diberikan untuk pertanian besar, tempat tempat kediaman di pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedang di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.<sup>73</sup>

Hukum baru ini, justru menambah penderitaan mayoritas rakyat di kepulauan Indonesia. Dengan dibuatnya peraturan baru ini, dimulailah pemberian hak penguasaan-penguasaan aset Sumber Daya Alam ibeserta manusia yang ada di atasnya kepada perusahaan-perusahaan Negara dan Swasta. Untuk kawasan hutan, *domeinverklaring* bekerja dengan klaim bahwa “setiap tanah (termasuk hutan) yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya hak di atasnya (berupa sertifikat ala Belanda/Cap Singa), maka tanah itu menjadi milik pemerintah.”<sup>74</sup> Karena itulah, pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan Belanda membagi organisasi teritorial kehutanan menjadi 13 wilayah yang masing-masingnya memiliki luas 70.000 untuk hutan jati, dan 80.000 Ha untuk Hutan Non Jati.<sup>75</sup>

Untuk sektor perkebunan, muncul perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda di Jawa, seperti *De Landbouw Maatschappij Soekowono* (DLMS), *De Landbouw Maatschappij Jelbuk* (DLMJ), *De Landbouw Maatschappij Soekokerto Ajong* (DLMSA) yang menjadi pemain-pemain dalam perdagangan tembakau jenis ngaogst, *Straat Sunda Syndicaat n.v Cultuur Mij Ciwangun* dan beberapa perusahaan lainnya di Jawa Barat juga bermunculan pada masa-masa itu. Di Sumatera, berdiri perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Langkat, Serdang, dan Asahan. Perkebunan-perkebunan ini tidak hanya dijalankan dengan modal yang datang dari pengusaha-pengusaha Belanda, tetapi, disana ada pengusaha Jerman, Belgia, dan Amerika.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> M. Tauchid. 2010, *Op cit.* Halaman 56

<sup>74</sup> Nancy Pelusso menjelaskan prinsip inilah yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan kehutanan hingga sekarang di Jawa dan Madura. dalam Nancy Pelusso. *Rich Forest Poor People. Resource Control an Resistance in Java.* Univ California Press. 1992. Telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan Judul “Hutan Kaya Rakyat Melarat”.

<sup>75</sup> Laporan kehutanan, Departemen Kehutanan, 1986.

<sup>76</sup> Dalam Ann Stoler. *Capitalism and Confrontation in Sumatra Plantation Belt. 1870-1979.* University of Michigan Press. 1995. Ann Stoler, dengan sangat jelas memaparkan bagaimana formasi modal yang masuk setelah *Agrarische Wet* khususnya di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur (sekarang wilayah Sumatera Utara) tidak hanya dari Belanda, tetapi dari berbagai negara Eropa dan Amerika.

Cerita tentang masuknya perusahaan swasta lewat regulasi baru *Agrarische Wet* dengan semua paket kebijakan yang mengiringinya, tentu saja melalui penaklukan-penaklukan terhadap manusia yang ada di area yang akan dijadikan kawasan perkebunan. Karena keuntungan akan didapat oleh pemilik perusahaan itu kalau mereka menguasai sepenuhnya areal tempat dimana mereka melakukan aktivitas produksi. Setelah manusianya ditaklukkan dan ditutup baginya akses ke wilayah itu, segera setelah itu mereka ditransformasikan menjadi tenaga buruh upahan untuk kepentingan akumulasi keuntungan dari perkebunan yang dikuasai Belanda.<sup>77</sup>

Penguasaan model kolonial yang diterapkan dalam skala besar dan dalam jangka waktu yang lama, sumber daya alam yang begitu banyak di kepulauan Indonesia hampir tidak sempat dinikmati manfaatnya oleh manusia yang hidup di atas sumber daya itu karena penguasaan dan kontrol atas Sumber-sumber tersebut berada bukan ditangan rakyat Indonesia melainkan di atas kontrol kekuasaan pemerintahan kolonial, sementara, manusia-manusia yang ada di atas dan disekitar Sumber Daya Alam itu diubah seketika menjadi kaum pekerja dan buruh yang diperuntukkan bagi berjalannya modus kolonial seperti yang dimaksudkan di atas.

Cerita tentang berubahnya pemilik tanah di kepulauan Indonesia menjadi tenaga kerja dan buruh untuk Kolonial, dilakukan dengan cara dan bentuk yang beragam antara satu tempat dengan yang lainnya. Ketika masuknya Kolonial ke kepulauan Indonesia, mereka memakai cara yang sesuai dengan kondisi setempat untuk menaklukkan bentuk penguasaan sebelumnya yang ada di wilayah tersebut,<sup>78</sup> tetapi hasil akhir dari proses perubahan itu, selalu berujung pada cerita

---

<sup>77</sup> Penjelasan konseptual dari praktek seperti ini, berasal dari Karl Marx, dengan menyebutnya sebagai *Previous Accumulation* atau *Primitive Accumulation*. Lihat Karl Marx. *Capital*. Bagian ke 8, bab 26. Untuk penerapan cara baca melalui pendekatan ini, lihat Noer Fauzi Rachman, *Nyageurkeun Nu Paremeun*. Dokumen pendidikan Paguyuban Guru Reforma Agraria. *Tidak diterbitkan*. 2008.

<sup>78</sup> Misalnya; ekspansi kolonial Belanda di kawasan-kawasan ber-Sumber Daya Alam di Sumatera mempunyai bentuk yang berbeda dari bentuk kolonial di Jawa. Jika di Jawa biasanya dilakukan lewat aturan *domain verklaring*, penaklukan di Sumatera melalui kontrak politik dan apa yang dinamakan dengan *korte verklaring* atau *pernyataan pendek*. Pada 1850-an dilakukan beberapa kali ekspedisi militer di Sumatera. Biasanya setelah ekspedisi militer, menyusul *pernyataan pendek* dengan pengakuan sultan atau penguasa pribumi terhadap kekuasaan kolonial Belanda. perjanjian kontrak politik *plakat pendek*

tragis tentang menurunnya kualitas hidup mayoritas rakyat Indonesia yang berada diatas kekayaan bumi yang ada di sekitar mereka. Jika dahulu, mayoritas rakyat itu hidup didalam sistem lama kerajaan dan tuan-tuan tanah tetapi mereka masih terikat dengan cara-cara system pengetahuan tradisional yang mengeksploitasi, ketika kolonial datang, mereka betul-betul di pisahkan sepenuhnya, dan menjadi tenaga yang bisa di perjual belikan untuk penguasa-pernguasa perkebunan kolonial.

Dalam situasi ditekan dan ditindas dibawah sistem kolonial tersebut, sebagian kecil rakyat Indonesia kemudian melakukan proses perlawanan, pencatatan perlawanan dari eks pemilik tanah (para petani-petani yang tanahnya dijarah oleh kolonial) itu seperti yang dipaparkan oleh Sartono Kartodiharjo untuk di Jawa<sup>79</sup> berlangsung seiring dengan dilakukannya secara terus menerus juga aksi pemadaman perlawanan itu oleh pihak penguasa kolonial. Sementara, sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia lainnya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu nasib terkungkung dibawah penindasan rezim kolonial dan tetap hidup dalam kondisi yang tragis

Ada banyak literature yang dapat melacak kembali gerakan petani pada masa-masa ini, pertama, dan yang paling populer, datang dari Prof Sartono Kartodirdjo.<sup>80</sup> Menurutnya gerakan petani di Jawa dibedakan atas tiga jenis, yaitu pertama gerakan protes yang menentang pemaksaan baik dari tuan tanah maupun pemerintah, kedua gerakan yang menginginkan terciptanya dunia baru yang serba

---

untuk mendapatkan konsesi tanah tidak hanya berlaku di daerah swapraja Sumatera tetapi juga berlaku di swapraja di Sulawesi dan Sunda kecil. Namun demikian, masing-masing mempunyai hubungan sendiri dengan kontraknya masing-masing yang berbeda-beda. Lihat didalam Mochammad Tauhid. *Masalah Agraria. Sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*. (Jogjakarta: Sajogyo Institute dan STPN Press, 2009), halaman 91-92.

<sup>79</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, membahas tentang peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon, tulisan aslinya adalah berupa disertasi Prof Sartono yang berjudul *The Peasant's Revolt of Banten in 1888, It's Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, tulisan ini bercerita tentang pemberontakan-pemberontakan awal petani di Banten yang merupakan salah satu daerah strategis pada zaman kolonial dimana disana terdapat pelabuhan besar dan tambang batubara yang banyak diperlukan oleh pemerintah kolonial.

<sup>80</sup> Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1973.

*adil-messianistis*, dan ketiga gerakan yang ingin membangkitkan kejayaan atau kesentausaan jaman lampau *revivalistis*. Cara baca seperti ini kemudian tertuang didalam tulisan-tulisan Prof Sartono tentang beberapa pemberontakan petani di Indonesia, dan menjadi bentuk untuk menjelaskan banyak literature yang muncul setelah nya.

Studi Prof. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1988: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, membahas tentang peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Geger Cilegon, tulisan aslinya adalah berupa disertasi Prof Sartono yang berjudul *The Peasant's Revolt of Banten in 1888, It's Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. Tulisan ini bercerita tentang pemberontakan-pemberontakan awal petani di Banten yang merupakan salah satu daerah strategis pada zaman kolonial. Disana terdapat pelabuhan besar dan tambang batubara yang diperlukan oleh pemerintah kolonial untuk proses alat angkut kapal mereka. Yang paling menarik didalam studi ini adalah upaya Prof Sartono mengimbangi wacana Nasionalisme dan kebangsaan yang seolah-olah hanya milik kelas menengah terdidik saja-yang muncul pada tahun 1920-an-.

Menurutnya, pemberontakan petani di Banten juga dialasi rasa kebangsaan dan nasionalisme karena tidak ingin dijajah. Pemberontakan yang dipimpin oleh gabungan antara jawara dan ulama (H. Wasid dan Jaro Kajuruan) di Banten ini kemudian berlanjut beberapa kali pada tahun 1926 (dipimpin K.H. Achmad Chatib-seorang Ulama Komunis) dan tahun 1945 ketika petani-petani ikut dalam pengambil alihan kekuasaan Jepang di daerah.<sup>81</sup>

Dalam catatan Arsip Nasional Indonesia, gerakan perlawanan yang bercermin kepada semangat mileniarisme-ratu adil- ini, banyak terjadi di beberapa tempat. Misalnya gerakan Haji Rifangi di Pekalongan pada tahun 1860, gerakan mangkuwijoyo di Merbung Klaten pada 1865, gerakan Tirtowiat alias Raden Joko di Kartosuro pada 1886, pemberontakan di Srikaton, desa Girilayu, Karang anyar pada 1888, dan beberapa catatan lainnya. Bahkan, gerakan modern Sarekat Islam

---

<sup>81</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1988: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.

pun pada masa awal berdirinya seringkali menggunakan ideologi *Ratu Adil* untuk mengorganisir massa rakyat.<sup>82</sup>

Tulisan M. Tauchid, dalam *Masalah Agraria*, juga sempat mencatat secara ringkas pemberontakan petani yang muncul di Jawa Barat sebagai bentuk dari penindasan berkepanjangan yang dialami oleh petani-petani di wilayah tersebut.<sup>83</sup> Pemberontakan Langen, yang terjadi di Banjar, Ciamis. Pemberontakan ini terjadi di daerah perkebunan besar Belanda yang dibuka pada tahun 1905 dengan luas 1837 Ha, sementara perkampungan dan tanah milik rakyat yang tersisa di areal perkebunan itu hanya 40 Ha, akhirnya petani-petani yang tidak sudi tanahnya di jadikan kawasan perkebunan ini tetap bertahan dan melakukan aksi-aksi pengrusakan tanaman perkebunan, pada tahun-tahun itu, cerita tentang kriminalisasi petani, pemenjaraan oleh penguasa perkebunan, dan penyiksaan oleh bangsawan-bangsawan setempat menjadi cerita yang umum.

Didalam literature lain seperti Mohammad Said dalam *Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Dengan Derita dan Kemarahannya* (1977), Karl J. Pelzer (1985) dalam *Toeun Kebun dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947* dan *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (1991), serta Jan Breman dalam *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20* (1997), mereka mengetengahkan tentang bentuk perlawanan gerakan petani yang berhubungan dengan masalah penguasaan Sumber Daya Alam dan manusia yang ada di atasnya. Karena begitulah, sejarah wilayah-wilayah ber-Sumber Daya Alam di kepulauan Indonesia selalu dihiasi oleh sejarah pahit yang dialami oleh petani, dan didalam perjalanan sejarah Indonesia, gerakan petani adalah salah satu yang paling penting untuk disandingkan dengan perjuangan kemerdekaan yang dirintis oleh elit-elit nasional dari kalangan terpelajar.

---

<sup>82</sup> Firmasnyah, Aritonang, Hegel Terome, Nanang Hari, Syaiful Bahari, dalam *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia*, Sekretarian Bina Desa dan YAPPIKA, 1999. Halaman 30. Laporan-laporan ini dapat juga dilihat didalam Arsip Nasional Republik Indonesia. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. Jakarta Arsip Nasional RI. 1973.

<sup>83</sup> M. Tauchid, *op cit*, halaman 239. Didalam naskah tersebut, M. Tauchid menceritakan pemberontakan petani di Langen, Rawa Lakbok (Ciamis) dan Plered, Subang.

Literature berbeda yang sangat berpengaruh dalam studi gerakan petani di Indonesia pada masa awal ini adalah paparan hasil penelitian dari S. Dingley<sup>84</sup>, dalam *Gerakan Petani di Indonesia*. Dia menyatakan bahwa pemberontakan-pemberontakan petani yang terjadi di Indonesia yang menjadikan gerakan keagamaan dan identitas agama sebagai selubung, sebenarnya adalah kekusaran mereka terhadap praktek penindasan –biadab- yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Dalam buku ini Dingley memberikan beberapa contoh pemberontakan yang terjadi, misalnya di Ternate, Tidore pada tahun 1856 dan di Minangkabau pada 1841. Perlawanan petani disana bukanlah muncul dari rasa kebencian terhadap orang Belanda yang Kristen, tetapi bentuk dari kebencian dan kekusaran petani terhadap “pajak tanah” yang diterapkan oleh penguasa kolonial yang bekerja sama dengan penguasa lokal di wilayah itu.

Begitupun perlawanan petani-petani yang terjadi di Yogyakarta pada 1825 dibawah pimpinan Diponegoro, menurut Dingley, itu bukanlah perang karena ketersinggungan terhadap identitas “kekratonan”, tetapi karena kemarahan petani akibat pembangunan jalan yang melibatkan tenaga kerja paksa petani, pematokan lahan-lahan garapan rakyat untuk kepentingan kolonial dan pengenaan pajak tanah yang tinggi kepada petani-petani di Jawa Tengah.<sup>85</sup>

Pemberontakan-pemberontakan di tingkat lokal yang tercatat didalam dokumen-dokumen laporan-laporan dari studi-studi diatas, adalah cerminan dari kekusaran terhadap politik agraria kolonial. Perjalanan gerakan petani ini, kemudian berlanjut pada masa-masa awal abad 20. Terutama ketika munculnya organisasi-organisasi modern dari kalangan kelas elit terpelajar di Indonesia yang melakukan proses pengorganisasian di basis-basis massa rakyat.

### 3.2 Peran Komunisme di Indonesia hingga 1933.

Menempatkan gerakan petani, sebagai bagian dari gerakan sosial di Indonesia, tidak dapat dihindarkan dari satu pembahasan tentang munculnya

---

<sup>84</sup> S. Dingley adalah nama pena dari Iwa Sumantri, seorang intelektual Indonesia yang diminta oleh oleh *Krestintern* (Red Peasant International) yang berpusat di Moskow untuk menulis sebuah ulasan umum mengenai gerakan petani di Indonesia. Dia menulis naskah ini sekitar tahun 1926.

<sup>85</sup> S. Dingley, *Gerakan Sosial di Indonesia*, tidak di terbitkan. Dalam versi aslinya *Peasant Movement in Indonesia*.

radikalisasi pasca gerakan-gerakan *millenarian*, yaitu masuknya ideologi komunisme ke Indonesia pada awal abad ke-20. Penelaahan ini penting karena bertujuan untuk menghubungkan keterputusan literature tentang gerakan petani diawal abad 20, dan peranannya didalam merintis jalan menuju Indonesia merdeka, kebanyakan literature sejarah, awal abad 20 ditandai dengan munculnya organisasi modern yang diprakarsai oleh intelektual indonesia yang mulai menyadari pentingnya menjadi bangsa yang berdaulat,<sup>86</sup> sementara jikapun ada literatur yang menceritakan tentang gerakan petani, itu terjadi setelah mobilisasi politik oleh gerakan radikal dimulai oleh Partai Komunis Indonesia, dan organisasi-organisasi penentang kolonial lainnya.

Koperasi Ciwangun, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, memiliki asal-usul yang berkaitan dengan proses radikalisasi yang dilakukan pada periode ini. Walaupun cerita yang muncul di Ciwangun tidak menjelaskan Si faksi apa yang didukung, tetapi setelah saya telusuri lebih jauh dari wawancara-wawancara dengan sesepuh-sesepuh di Ciwangun, SI yang dimaksud adalah kelompok SI- *Afdeling B*, yang didalam sejarahnya terkenal dengan kolaborasi ide-ide pembebasannya bersama kelompok Komunis yang berada di SI Semarang. Inilah relevansi penjelasan konteks kemunculan komunisme dengan asal-usul radikalisasi yang terjadi di banyak wilayah di Jawa, termasuk di Ciwangun.

Didalam dokumen-dokumen sejarah tentang Komunis di Indonesia -yang kemudian menjadi partai politik radikal pertama di dalam sejarah Indonesia- berawal dari seorang sosialis Belanda bernama Sneevliet,<sup>87</sup> dia adalah bekas buruh kereta api yang tergabung didalam organisasi radikal di Belanda dan penganut Sosialisme Demokrat yang sangat taat, ketika organisasi ini pecah, dia kemudian keluar dari pekerjaannya dan pergi ke Hindia Belanda.

Awal karir nya di Hindia Belanda, dimulai dari bekerja pada staf editorial di *Soerabajaacsh Handelsbad*, sebuah koran di Jawa Timur, yang menjadi corong

---

<sup>86</sup> R.E. Elson. *Constructing the Nation: Ethnicity, Race Modernity and Citizenship in early Indonesian Thought*, dalam *Asian Ethnicity*, 2005, halaman 145 - 160

<sup>87</sup> Nama lengkapnya adalah Hendricus Josephanus Franciscus Marie Sneevliet. Untuk lebih lengkap tentang riwayat Sneevliet, dapat di lihat didalam karya W. Van Ravesteyn, *De Wordng van het Communisme in Nederland* (Perkembangan Komunisme di Belanda), Amsterdam, 1928, halaman 128 – 129.

penting dari perusahaan gula yang marak tumbuh di Hindia Belanda pada waktu itu. Setelah bekerja di Surabaya, Sneevliet pindah ke Semarang, menggantikan salah seorang teman sesama aktivis sosialis Belanda yang bekerja sebagai sekretaris di Asosiasi Dagang (*Semarang Handelsvereniging*).

Secara politis, kepindahan dia ke Semarang ini menjadi awal bagi hubungannya dengan kelompok penentang pemerintah kolonial yang telah ada di Hindia Belanda, disana dia bertemu dengan kelompok Serikat Buruh Kereta Api atau *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP) yang telah berdiri sejak tahun 1908, VSTP adalah salah satu dari organisasi Serikat Buruh yang pertama di Indonesia, anggotanya terdiri dari berbagai kalangan dari orang-orang Eropa dan Pribumi Hindia Belanda.<sup>88</sup> Sneevliet kemudian ikut masuk kedalam organisasi ini, karena memang, dia berasal dari organisasi yang sama di negeri Belanda yaitu *Netherland Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel*.<sup>89</sup>

Pada tanggal 9 Mei 1914, bersama dengan 60 orang anggota Sosialis Demokrat Belanda, Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) di Surabaya. Anggota ISDV awal adalah orang-orang yang dulunya tergabung di kelompok sosialis di Belanda dan menjadi migran baru di Hindia Belanda, hampir semuanya orang Euroasia dan Eropa, dan mereka memiliki perbedaan dalam menanggapi kondisi di daerah jajahan Belanda ini, sebagian mereka sependapat dengan politik etis, sebagian yang lain membuang tesis Marxisme tentang evolusi sosialisme hanya dapat terjadi pada negara industri berkembang bukan negara pra kapitalis seperti Indonesia, sebagian yang lain berpendapat ISDV tidak perlu ikut campur didalam politik di Indonesia, tetapi diujung perdebatannya, ISDV kemudian dikuasai oleh kalangan kelompok kiri radikal yang dipimpin oleh Sneevliet, yang beranggapan bahwa tugas ISDV adalah memberikan propaganda prinsip-prinsip sosialisme di Indonesia dan

---

<sup>88</sup> Tahun 1908, VSTP memiliki 200 orang anggota dari Eropa, dan 10 orang Indonesia, pada tahun 1914 terdapat 900 orang Indonesia dan 1500 orang Eropa, dan pada tahun 1917 terdapat 3000 orang Indonesia, dan 700 pekerja Eropa. Anggotanya terdiri dari pegawai perusahaan kereta api swasta SCS (*Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij*) dan NIS (*Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij*). Setelah VSTP berdiri, organisasi serikat pekerja untuk pegawai SS (*Staatsspoorwegen*) yang berada di bawah pimpinan pegawai Belanda pada tahun 1912 akhirnya ditutup karena kalah bersaing dengan VSTP.

<sup>89</sup> D.N Aidit, *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia*, Jakarta, 1952. Halaman 37.

menyatukan kaum sosialis Hindia Belanda untuk mengkampanyekan penolakan terhadap imperialisme, tetapi hingga tahun 1915, organisasi ini tidak dapat berkembang, kecuali hanya dapat mengumpulkan 134 anggota pada tahun itu.<sup>90</sup>

Tahun 1915, ISDV menerbitkan koran berbahasa Indonesia dan Belanda bernama *Het Vrije Woord*, penerbitan koran ini kemudian mendapat tanggapan positif dari kelompok radikal Indonesia yang sebagian besar diorganisir oleh Sarekat Islam.<sup>91</sup> Kelompok SI menganggap ISDV dapat menjadi corong perjuangan melawan kolonial Belanda. Salah satu momentum pembuka hubungan intens antara ISDV dengan SI adalah ketika *Het Vrije Woord* yang waktu itu dieditori oleh salah seorang tokoh ISDV yaitu Adolf Baars memuat tulisan tentang kritik terhadap penahanan salah seorang tokoh SI yaitu Marco Kartodikromo. Dia ditahan karena mengkritik pemerintah kolonial yang menerapkan sistem penindasan di atas tanah-tanah perkebunan yang mulai dibuka di daerah Jawa dan Sumatera.

SI merupakan organisasi yang terlibat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat di Jawa. Seperti wilayah koloni lainnya, Jawa adalah pusat dari kekuasaan kolonial, tetapi kondisi masyarakatnya -seperti digambarkan oleh Peter Boomgard didalam *Anak Jajahan Belanda*- mengalami masalah kelebihan penduduk, dan sempitnya lahan pertanian karena telah banyak yang digunakan untuk *onderneming* (perkebunan besar) pasca penerapan *Agrarisch Wet*.<sup>92</sup>

Sementara itu, di pedesaan Jawa telah terjadi perubahan mendasar pada hubungan antara rakyat pemilik tanah dan perusahaan gula. Terutama didaerah-daerah seperti di Yogyakarta, Surabaya, Jember, dan tempat lainnya. Sistem sewa

<sup>90</sup> Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University press, 1965. Halaman 15.

<sup>91</sup> Sebuah organisasi yang didirikan oleh Raden Mas Tirtoadisurjo pada tahun 1908 yang awalnya memakai nama Sarekat Dagang Islam, tetapi pada 1912, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan untuk dirubah menjadi Sarekat Islam. Pertumbuhan organisasi ini tidak sama antara satu tempat dengan yang lain, dan sulit mengidentifikasi mana yang disebut pusat, karena dalam tahap awal ini muncul 4 Kantor Pusat SI. Untuk lebih lengkap mengenai Sejarah SI terdapat didalam karya Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, Den Hagg, 1960. Halaman 89 – 95.

<sup>92</sup> Mengenai kondisi kependudukan pada masa itu, diulas dengan sangat detail oleh Peter Boomgard dalam *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1886*. PT Djambatan.2004

lahan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan gula ini kepada masyarakat telah mendidik kebiasaan masyarakat untuk tergantung kepada hasil dari penyewaan tanah (yang jumlahnya rendah) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gula ini, tetapi sekaligus membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. *Booming* tebu ini telah membuat sektor modern dan tradisional semakin terkait yaitu meluasnya lahan tebu dan disekitarnya muncul pedesaan-pedesaan padat akibat banyaknya pendatang pekerja yang mencari pekerjaan di kebun.

Tumbuh pesatnya penduduk dilahan-lahan sempit tersebut menciptakan kondisi yang sangat rawan bagi terjadinya pertikaian dan kekerasan antara pemilik tanah dan pemilik perusahaan gula. Pemerintah kolonial, dengan politik etisnya mulai mengatur hubungan antara pemilik tanah dan penyewa (perusahaan) ini terutama tentang harga sewa. Alasan lain adalah, pengaturan ini diperlukan bagi pengembangan ekonomi sebuah wilayah agar tebu tetap bisa ditanam tanpa dirusak oleh pemilik tanah. Namun, aturan tersebut tidak dapat mengubah keadaan, yaitu semakin merosotnya kehidupan petani-petani yang tidak lagi menguasai tanah, dan munculnya kampung-kampung miskin di sekitar perkebunan, dengan kondisi yang sangat parah.<sup>93</sup>

Disisi yang lain, peran tokoh traditional di pedesaan telah lemah untuk menjadi perantara antara penduduk desa dan pihak perkebunan. Disatu sisi mereka tidak berdaya dihadapan penguasa Eropa, dan disisi lain, mereka kehilangan legitimasi kekuasaan terhadap pemilik tanah yang kecewa. Didalam situasi ini, penduduk di pedesaan mulai mencari tokoh lain di luar pemimpin traditional (yang pernah populer sebagai pemimpin pada cerita tentang gerakan millenarian), dan SI datang memberikan tawaran untuk dijadikan pemimpin petani-petani dipedesaan ini.

Pertemuan ISDV dengan SI, adalah pertemuan antara organisasi-organisasi gerakan awal di Hindia Belanda yang memang pada waktu itu tidak diniatkan sebagai organisasi partai politik, sehingga pada waktu itu,

---

<sup>93</sup> Cerita tentang suatu daerah di Bojonegoro, tentang kegagalan politik etis yang malah memunculkan wabah penyakit sehingga kampung itu di tutup untuk umum, dijelaskan didalam CLM Penders. *Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapore. Gunung Agung. 1984. Halaman 22- 36 dan halaman 126-137.

dimungkinkan bagi orang-orang yang menjadi anggota di salah satu organisasi gerakan untuk menjadi anggota pula pada organisasi yang lain, apalagi setelah Gubernur Jendral Belanda Idenburg melegalkan organisasi SI pada tahun 1916 sebagai organisasi yang dapat melakukan kegiatannya di seluruh tempat di Jawa, maka kesempatan tersebut di manfaatkan oleh aktivis ISDV untuk masuk ke SI.

Adalah Semaun, seorang tokoh muda yang berasal dari latar belakang gerakan buruh kereta api di Surabaya yang dibina oleh Sneevliet, dia menjadi perwakilan ISDV pada kongres SI tahun 1916 dan menjadi pengurus Central Serikat Islam yang berkantor di Surabaya, setelah kongres 1916 dia pindah ke Semarang, dan menjadi bagian dari SI Semarang yang telah bekerja bersama dengan aktivis ISDV. Kepindahan ke Semarang ini menjadi awal bagi Semaun untuk meniti karir nya melakukan kegiatan politik yang lebih dinamis dikemudian hari, karena Semaun, dengan kemampuan orasi yang sangat bagus telah berhasil membesarkan SI Semarang dengan mengembangkan perekrutan ke desa-desa di Jawa Tengah, dan pada tahun 1917 (satu tahun pasca kongres) di SI Semarang terdapat 20.000 orang anggota yang sebelumnya hanya 1700 anggota saja.<sup>94</sup>

Pertumbuhan yang sangat pesat ini, kemudian menjadikan SI Semarang memainkan peran penting didalam perpolitikan nasional. Terutama ketika mereka menentang dukungan Kantor Pusat SI yang dipimpin oleh Abdul Muis terhadap rencana pembentukan *Indie Werbaar* (Milisi Hindia Belanda) dan keikutsertaan SI didalam perwakilan pribumi pada Dewan Perwakilan atau Volksraad. Kelompok Semarang ini kemudian diancam oleh Kantor Pusat SI. Abdul Moeis mengeluarkan pernyataan, “jika SI Semarang tidak mau mendukung, maka Kantor Pusat akan memutuskan hubungan dengan mereka”, sementara itu SI Semarang menjawab, “jika Kantor Pusat tidak ikut didalam perlawanan yang sedang dibangun, maka mereka lebih memilih membentuk Kantor Pusat sendiri”.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ruth T Mc Vey. *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010. Halaman 33 (buku ini versi bahasa Indonesia dari , *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University press, 1965

<sup>95</sup> Ruth T Mc Vey, *Ibid*, halaman 34. Pada masa-masa ini lah muncul faksi-faksi didalam tubuh SI. Faksi yang paling terkenal adalah SI Jawa Barat yang diberi nama “Afdeling B” yang didirikan oleh Sosrokardono yang kemudian melakukan pemberontakan di kawasan perkebunan Belanda di Garut.

Sementara itu, proses radikalisis yang dilakukan oleh SI Semarang mulai dilakukan dengan penyebaran brosur-brosur yang dikeluarkan oleh Semaun dan Snevliet, aktivitas ini telah mempengaruhi massa rakyat hingga ke pedesaan-pedesaan di Jawa.<sup>96</sup> Pengaruh ini ditambah dengan bergabungnya satu orang tokoh saudagar dan tokoh Islam yang bernama H. Misbach, mereka melakukan pendidikan terutama tentang “kesadaran kondisi ketertindasan” yang dialami akibat penjajahan Belanda, dan “janji *ratu adil*” melalui komunisme.

Di pedesaan, kerja-kerja propaganda ini memperlihatkan hasilnya dalam bentuk yang sangat nyata. Pada tahun 1917, didirikan organisasi petani dan buruh tidak terampil yang bernama *Porojitno*. Awal tahun 1918 organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani yang dipimpin oleh Suharijo, seorang aktivis SI-ISDV asal Demak. Tujuan organisasi ini adalah menyatukan petani-petani perkebunan tebu yang menginginkan pembayaran sewa lebih tinggi untuk tanah mereka yang dipakai pabrik gula, serta menuntut upah yang lebih tinggi pada masa panen dan penggilingan. Organisasi ini juga berfungsi sebagai Koperasi pemasaran beras dari petani-petani yang tergabung di SI dan ISDV.<sup>97</sup>

Proses radikalisis ini kemudian mendapatkan momentum ketika revolusi oktober di Rusia tahun 1917. Peristiwa ini dijadikan salah satu klaim oleh pemimpin SI Semarang untuk meleburkan organ ini menjadi Partai Komunis Indonesia yang langsung terhubung dengan *Communism International* di Moskow. Semangat Revolusi Rusia ini kemudian diterjemahkan didalam kerja-kerja pengorganisasian SI Semarang dan ISDV dikalangan massa rakyat. Antara tahun 1918-1921, Serikat-Serikat Buruh di Hindia Belanda yang diorganisir oleh SI Semarang dan ISDV meraih kemenangan dalam meningkatkan kondisi dan upah anggota-anggotanya, di beberapa tempat, mereka berhasil melakukan negosiasi penambahan bayaran sewa tanah perkebunan tebu oleh perusahaan gula.

---

<sup>96</sup> Didalam brosur-brosur itu, Semaun dan Snevliet menulis tentang penolakan terhadap sistem kuli kontrak yang dilakukan oleh perkebunan-perkebunan besar Belanda. Tulisan ini mendapat banyak simpati dari kalangan buruh-buruh kebun yang mendapatkan brosur dari aktivis-aktivis SI yang berada di desa-desa. Mereka biasa membacakan brosur itu seperti membaca khotbah di tempat-tempat ibadah. Pola penyebaran informasi melalui brosur-brosur ini terbukti sangat efektif membesarkan gerakan SI, termasuk yang sampai di Ciwangun pada tahun 1920-an, ketika buruh perkebunan disana bergabung dengan Sarekat Islam.

<sup>97</sup> Ruth T Mc Vey, *Ibid.* halaman 71 – 73.

Seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah lain, pertumbuhan SI kemudian berkembang luas, inilah yang disebut sebagai SI Lokal. Khusus untuk di Jawa Barat, pertumbuhan SI lokal ini dihubungkan dengan satu pemberontakan kecil di Garut yang dikenal dengan peristiwa Cimareme.<sup>98</sup> Organisasi ini perlu disinggung didalam pembahasan ini karena berkaitan dengan proses radikalisasi yang terjadi di Desa Ciwangun (seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya). SI Lokal yang dimaksud adalah SI *Afdeling B*, yaitu organ lokal yang dibentuk oleh Sosrokardono, seorang pengurus Kantor Pusat SI yang melakukan kerja-kerja pendidikan di kampung-kampung di kawasan-kawasan perkebunan di Jawa Barat.

Kelompok ini mulai melakukan kegiatan sejak bulan April 1918. Pada mulanya gerakan SI *Afdeling B* mendapat restu dari SI Pusat, yang telah pula membentuk organisasi lokal yang disebut “Wargo Bekerja”. Ketua SI Pusat HOS. Tjokroaminoto, melihat *Afdeling B* yang waktu itu dipimpin oleh H. Ismail semacam “Wargo Bekerja”. Pada pertemuan SI di Desa Manonjaya, Tasikmalaya pada bulan Januari 1919, Sosrokardono yang menjabat sebagai sekertaris SI Pusat, menyetujui gerakan itu dan sejak saat itu menyebarlah didaerah Priangan. *Afdeling B* pada dasarnya merupakan perluasan dari proses transformasi SI lokal kedalam satu gerakan yang menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. Mereka bekerja dengan menggabungkan semangat *mesianis* “ratu adil” dengan pola organisasi modern yang berjejaring dan memiliki struktur kepemimpinan yang jelas.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Mengenai keterlibatan SI *Afdeling B* pada pemberontakan Cimarema terdapat berbagai versi. Versi pertama yang dikeluarkan oleh kantor pusat SI mengatakan pemberontakan Cimareme tidak ada hubungannya dengan SI, karena pada waktu pasukan SI datang membantu petani di Cimareme, pemimpin petani di Cimareme yaitu H. Hasan telah tewas tertembak, jadi itu hanya solidaritas SI Priangan kepada H. Hasan. Versi yang lain dijelaskan oleh pemerintah Hindia Belanda bahwa SI *Afdeling B* terlibat karena H. Hasan memiliki jaringan dengan kelompok SI Priangan, terutama Sasrodarsono yang pernah beberapa kali datang ke Cimareme (sebagai bagian dari pendidikan yang dilakukan Sasrodarsono). Untuk lebih jelas tentang perdebatan ini dapat dilihat di Chusnul Hajati. “The Tragedy of Cimareme: the Resistance of Haji Hasan to the Colonial Power in 1919”. *SI* vol 3. No. 2. 1996. Halaman 59-84.

<sup>99</sup> Untuk ulasan mengenai pertumbuhan gerakan SI Lokal dapat dilihat didalam Dick Kooiman, Otto van Den Muijzenberg, dan Peter Van Der Veer (ed). *Conversion, Competition, and Conflict: Essays on the role of Religion in Asia*. Amsterdam: Free University Press. 1984.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Afdeling B* yaitu penjualan jimat dan pelaksanaan sumpah rahasia. Kegunaan jimat itu telah menjadi kepercayaan sebagian rakyat, sehingga penjualannya laku sekali. Jimat yang berupa tulisan Arab, pada kertas dan kain putih, di jual oleh H.Soelaeman dari Ciawi. Hasil penjualan jimat itu seluruhnya disetorkan kepada H.Ismail. pada umumnya yang boleh membeli jimat itu hanya anggota SI, selain itu para pemimpin *Afdeling B* juga menjual tanda pengenal berupa medali yang diikat pada tali jam dan sebuah kancing kerah hem dari perak. Kedua benda itu yang dilengkapi dengan inisial SI dibeli oleh masing-masing anggota seharga 1.5 gulden.<sup>100</sup>

Untuk melancarkan pemberontakan seperti yang telah direncanakan, dibuat sandi-sandi baik berupa simbol dan lambang. Misalnya tanda waktu dilakukan pemberontakan menggunakan kode-kode sebagai berikut: angka pertama menunjukkan jam, angka kedua tanggal, angka ketiga bulan, dan angka keempat tahun (Arab). Adanya tanda hitam dan putih pada kertas telegram menunjukkan bahwa pemberontakan akan dilakukan pada malam dan siang hari. Tempat dimulainya gerakan adalah tempat telegram berasal. Seminggu sebelum tanda dimulainya pemberontakan maka kawat-kawat telepon akan diputus, pohon-pohon akan ditebangi untuk merintang jalan dan jembatan akan dihancurkan agar polisi tidak dapat mengirim bantuan. Anggota-anggota *Afdeling B* terdapat di Bandung, Batavia, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi.<sup>101</sup> Jadi gerakan itu sudah berada di seluruh Priangan termasuk di Ciwangun sendiri.

Pada Bulan Februari 1919, Tjokroaminoto memerintahkan H.Ismail membubarkan gerakan itu. Dia berpendapat bahwa gerakan *Afdeling B* akan membahayakan perjuangan SI secara keseluruhan. Tapi himbauan Tjokro itu sudah terlambat karena *Afdeling B* sudah bergerak dibawah tanah, terutama diantara tokoh-tokoh agama di pesantren-pesantren yang memiliki santri yang banyak. Mereka berkeliling di seluruh Priangan di sekolah-sekolah agama, pesantren dan madrasah untuk menyebarkan *Afdeling B*. Selain Tjokroaminoto yang melarang gerakan itu, polisi dan pemerintahan colonial Belanda sudah mulai

<sup>100</sup> William A. Oates. "The Afdeeling B: an Indonesian Case Study". *Journal of Southeast Asian History*. Vol 9. No. 1. Maret 1968. Halaman 107-16.

<sup>101</sup> Else Ensering. "Afdeeling B of Sarekat Islam; a rebellious Islamic Movement" dalam Dick Kooiman, Otto van Den Muijzenberg, dan Peter Van Der Veer (ed). 1984. Halaman 99-122.

dapat mencium gerakan yang dilakukan *Afdeling B* sehingga mereka memperkuat penjagaan dan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap mencurigakan. Selanjutnya polisi dan militer ditempatkan di daerah Priangan Timur terutama di daerah Ciamis, Tasikmalaya dan Garut.<sup>102</sup>

Pada tahun berikutnya penyelidikan mengenai gerakan *Afdeling B* membuktikan bahwa Sosrokardono terlibat karena kehadirannya dalam rapat-rapat anggota *Afdeling B* di Manonjaya dan Ciamis. Dia ditangkap dan kemudian dipenjara selama 4 tahun. Dalam tahun itu juga Tjokroaminoto juga ditahan dan dituduh memberikan keterangan palsu pada pengadilan Sosrokardono dan ditahan selama beberapa bulan serta baru dibebaskan pada tanggal 5 April 1922. Upaya penangkapan lain kepada orang-orang yang dianggap terlibat pada gerakan *Afdeling B* juga dilakukan di Batavia, dua orang pimpinan SI -Alimin dan Musso-ditangkap, mereka berdua baru dibebaskan pada tahun 1923.

Di Priangan, terjadi penangkapan dan terror pemerintah terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan *Afdeling B*, bahkan SI Garut membubarkan diri, meskipun pembubaran itu tidak disetujui oleh SI pusat.<sup>103</sup> Akibat peristiwa Garut, SI mengalami penurunan jumlah anggota. Jumlah anggota yang pada waktu itu dinyatakan sebanyak 1 juta pada tahun 1920 mengalami penurunan hingga 50%. Hal ini karena kesukaran-kesukaran yang timbul berhubungan dengan razia pemerintah.

Momentum ini diiringi dengan semakin menegangnya hubungan antara SI Semarang dan SI Pusat Surabaya, ketegangan ini berujung pada perpecahan di tubuh Sarekat Islam pada tahun 1920 menjadi SI Merah yang dipimpin oleh Semaun & Darsono, dan SI Putih yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Moeis. SI Priangan beserta seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya ikut kedalam kubu SI Merah yang berpusat di Semarang. Ini disebabkan karena ketidakpuasan mereka melihat para pimpinan-pimpinan SI Pusat yang masih mau berkompromi dengan pemerintah kolonial Belanda.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Else Ensering, *Ibid.*

<sup>103</sup> Verklaring Wedana Banjar 14 Juli 1919 dalam Mailrapporten Geheim No. 510X/19, *Algemeene Rijksarschieff (ARA)*, Den Haag, Netherland.; dan *Kaoem Moeda* No.27, 9 Februari 1920.

<sup>104</sup> Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001. Halaman 56.

Akhirnya tahun 1924, setelah melewati polemik panjang perdebatan ideologis antara Islam dan Komunisme, SI Semarang yang kemudian dikenal sebagai SI-merah bergabung menjadi Sarekat Rakyat yang langsung berada dibawah kendali Partai Komunis Indonesia. Sementara itu Kantor Pusat SI mulai memisahkan diri dari kelompok komunis, terutama setelah H. Agus Salim, memimpin organ ini.<sup>105</sup>

Pada periode ini, muncul suatu perkembangan baru di Hindia Belanda, yaitu munculnya berbagai organisasi pergerakan masyarakat pribumi pasca Boedi Oetomo (1908). Terutama Perhimpunan Indonesia di Belanda dan Studie Club di Surabaya oleh Soetomo dan Bandung oleh Soekarno. Organisasi-organisasi ini telah menjadi suatu ancaman tersendiri bagi penguasa kolonial. Jika SI-Semarang dan PKI telah berhasil membangun jaringan di sebagian kalangan massa rakyat yang ada di kota (buruh transportasi, pedagang), dan desa (petani dan buruh tani), maka Perhimpunan Indonesia dan Studie Club Bandung, telah berhasil membangun jaringan yang lebih luas di tingkat elit terpelajar Indonesia yang kuliah di Belanda dan di pusat kota Hindia Belanda (Bandung, Batavia). Tetapi suatu kesulitan tersendiri untuk memisah-misahkan orang-orang yang terlibat didalam organisasi ini, karena banyak yang menjadi anggota di Perhimpunan Indonesia, juga anggota di SI, dan juga aktif di Studie Club Bandung dan Surabaya.

Kebangkitan organisasi gerakan massa rakyat (petani, buruh, elit terpelajar) pada masa ini kemudian mendapat pukulan besar pada tahun 1930-an

---

<sup>105</sup> Pertentangan ini terutama terjadi setelah *Het vrije word*, koran ISDV menerbitkan tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan, yang mengecam Pan Islamisme dan Pan-Asianisme. Publikasi ini melahirkan ketegangan antara Kantor Pusat SI dan ISDV. Kongres Si bulan Oktober 1921 mengeluarkan keputusan tentang “disiplin Partai”, anggota SI tidak boleh berorganisasi lain (terutama ISDV/Komunis). Keputusan inilah yang memunculkan SI Merah (Semarang) dan SI Putih (Surabaya). Setelah itu Semaun pergi ke Uni Sovyet, sementara Cokroaminoto ditangkap Belanda akibat pemberontakan SI Afdeling B di Garut. Tan Malaka, seorang penggagas dan pendorong Pan-Islamisme untuk melawan Imperialis Barat berusaha mendamaikan ketegangan ini. Usahanya berhasil dan mendorong Abdul Moeis memimpin pemogokan Serikat Buruh Penggadaian Hindia Belanda. Tetapi pemerintah Kolonial dengan mudah memadamkan pemogokan itu, dan akhirnya Tan Malaka dan Abdul Moeis diasingkan. Sementara perpecahan di tubuh SI tidak terelakkan. Perdebatan ini dapat dilihat di Erni Hayanti Kahfi. “Islam and Indonesian Nationalism: The Political thought of Haji Agus Salim”. *SI* vol 4, no 3. 1997. Halaman 1-63.

awal. Pukulan ini berawal dari suatu perencanaan pemberontakan yang ingin dilakukan oleh kader-kader Partai Komunis di beberapa tempat di Jawa, dan Sumatera.<sup>106</sup> Rencana ini sebenarnya menjadi polemik tersendiri di tubuh organisasi komunis tentang “masalah kesiapan”<sup>107</sup>, tetapi di beberapa tempat akhirnya pemberontakan kecil itu terjadi juga. Kemudian menjadi moment bagi pemerintahan kolonial membat habis semua orang-orang pergerakan, termasuk aktivis-aktivis Perhimpunan Indonesia dan studie Club Bandung yang telah mendeklarasikan PNI.

### 3.3. Masa Depresi Politik, Penjajahan Jepang hingga 1945

Pemukulan telak terhadap organisasi pergerakan ini, membawa implikasi luas kepada massa rakyat yang ada diberbagai tempat di Indonesia. khususnya untuk gerakan tani, peristiwa penangkapan besar-besaran pasca pemberontakan kecil 1926, telah berhasil membuat semacam terror ketakutan untuk melakukan aktivitas pergerakan. Pada periode inilah, gerakan Koperasi yang dipelopori oleh sisa-sisa aktivis pergerakan yang tidak ditangkap (seperti Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri, Hatta) mulai bergerak. Mereka melakukan aktivitas perkaderan yang berbeda dari yang selama ini dilakukan oleh PKI, SI, PI, dan PNI. Dibawah organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) yang didirikan oleh Hatta dan dipimpin oleh Syahrir, mereka aktif membuat pendidikan-pendidikan dikalangan massa rakyat, hingga penghujung dasawarsa 1930-an. Model kerja mereka berbeda dari “aksi massa” yang selama ini menjadi andalan bagi cara kerja kelompok Soekarno, mereka memakai “perkaderan” sebagai cara kerjanya. yang akan dijelaskan pada bagian tentang sejarah Koperasi dibagian keempat.

Pasca penangkapan besar-besaran dan pembungkaman aktivitas politik pribumi oleh pemerintah Kolonial, hampir tidak pernah ada studi yang menyebutkan munculnya gerakan petani. Kecuali gerakan pembangkangan sehari-

---

<sup>106</sup> Rencana ini berawal dari kepercayaan diri yang tinggi dari pemimpin komunis di Indonesia yang telah merasa memiliki kekuatan untuk melawan kekuasaan kolonial. Tetapi pada pelaksanaannya, setelah melewati polemik diinternal partai, yang meledak hanya di Banten dan di Silungkang (Sumatera Barat)

<sup>107</sup> Polemik itu terutama datang dari salah seorang pemimpin Komunis di Indonesia, yaitu Tan Malaka. Dia berpendapat, aksi pemberontakan itu belum bisa dilakukan. Dia menuliskan argumentasinya tentang ini didalam Tan Malaka, *Aksi Massa*. Teplok, Jakarta. 2003.

hari yang dilakukan secara terpisah-pisah berupa pembakaran ladang tebu, pencabutan bibit-bibit tanaman dan tindakan pencurangan setoran hasil panen oleh buruh-buruh kebun.<sup>108</sup> M.C Ricklefs, didalam bukunya yang berjudul *Sejarah Indonesia Modern*, bahkan menyebutkan secara eksplisit tentang kondisi ini:

“antara tahun 1927 hingga runtuhnya jajahan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, kebangkitan nasional Indonesia mulai bergaya kurang semarak. Dalam masalah politik, gerakan anti penjajahan melanjutkan langkah-langkah yang tidak menghasilkan apa-apa. Rezim Belanda memasuki tahapan yang paling menindas dan paling konservatif dalam sejarahnya pada abad 20. Rakyat daerah pedesaan tidak lagi memainkan peranan politik yang aktif karena dikecewakan oleh pengalaman mereka dengan PKI dan SI pada tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, pada tahun-tahun itu, sebagian massa rakyat Indonesia disibukkan oleh urusan-urusan menangani masa depresi ekonomi”<sup>109</sup>

Walaupun kondisi depresi ekonomi dan depresi politik ini berakibat bagi hilangnya kesempatan massa rakyat untuk mengadakan gerakan-gerakan terbuka, sebenarnya, muncul satu faksi yang sangat kuat didalam gerakan sosial yang lebih umum di Indonesia. Gerakan ini muncul dari aktivis-aktivis pelajar yang bersekolah agama islam di Kairo yang kebanyakan berasal dari Minangkabau. Mereka menjalin jejaring dengan aktivis-aktivis PNI-Baru yang dipimpin oleh Syahrir. Kelompok ini sangat konsern menggabungkan ide nasionalisme Indonesia dengan ide modernisasi Islam yang diilhami dari kegagalan perlawanan kelompok Islam di Mesir yang tidak ditopang oleh semangat kebangsaan.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Sebuah novel yang bercerita tentang pembangkangan ini dipaparkan oleh Pramoedya Ananta Toer (ed) didalam H. Mukti. *Hikayat Siti Mariah*. Jakarta. Dipantara. 2001.

<sup>109</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi. Jakarta. 2001. Pada bab 16 “Represi dan Krisis Ekonomi 1927-1942” halaman 374. Keterangan mengenai usaha-usaha mengatasi depresi ekonomi inilah yang menjadi latar penjelasan, maraknya gerakan Koperasi pada masa itu, yang akan dijelaskan nanti pada bab ke IV didalam tulisan ini.

<sup>110</sup> Karel. A. Steenbrink. *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP3ES. Jakarta. 1986.

Terlepas dari polemik yang terjadi diantara kelompok-kelompok ini.<sup>111</sup> Mereka yang memilih pulang ke Indonesia dan menjalin hubungan dengan kelompok PNI-Baru, telah menyokong dengan sangat kuat “pola perekaderan” yang diusulkan PNI-baru dan aktivis-aktivis Sarekat Rakyat/PKI yang masih tersisa. Pada tahun rentang antara 1930 hingga 1935, muncul sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi pendidikan rakyat pribumi. Sekolah-sekolah ini dijalankan oleh aktivis-aktivis yang bergiat di organisasi-organisasi penentang kolonial. Didalam mata ajar sekolah ini diajarkan semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan kaum tertindas, yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat.<sup>112</sup>

Pada masa ini muncul pendidikan Sumatera Thawalib di Minangkabau yang dipimpin oleh alumni-alumni Universitas Al-Azhar Kairo<sup>113</sup>, Taman Siswa di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, dan beberapa sekolah-sekolah lain yang didirikan aktivis pergerakan nasional. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan pendisiplinan “sekolah liar” yang didirikan oleh aktivis ini. Peraturan yang dikenal dengan *Wilden Scholen ordonantie* ini mengharuskan surat izin untuk sekolah-sekolah yang didirikan di Hindia Belanda, agar pemerintah dapat mengawasi kurikulumnya.

Pada akhirnya, sekolah-sekolah ini ditutup paksa oleh pemerintah kolonial pada rentang antara tahun 1932 dan 1935, dan pemimpin-pemimpinnya di tangkap. Terutama setelah terjadi pemberontakan kecil di atas kapal *Zeven Provincien* yang diindikasikan sebagai hasil propaganda kaum nasionalis. Phobia yang muncul di pihak pemerintahan kolonial terhadap kaum pergerakan semakin menjadi-jadi. Intimidasi, penangkapan, dan pembuangan ke daerah-daerah

---

<sup>111</sup> Polemik yang dimaksud adalah perdebatan tentang strategi, apakah Islam bisa dimasukkan didalam bagian yang menentang imperialisme yang sejajar dengan paham-paham lain seperti komunisme dan nasionalisme, atau apakah Islam membuat suatu kekhalfahan sendiri seperti masa lalu.

<sup>112</sup> Misalnya: disekolah-sekolah Islam, mereka mengajarkan tentang nilai islam yang menentang penindasan, Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa mengajarkan keharusan penentangan terhadap imperialisme Belanda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Timur.

<sup>113</sup> Untuk ulasan mengenai kebangkitan di Minangkabay dapat dilihat didalam Taufik Abdullah. *Schools and Politics; the Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Ithaca; Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1971.

terpencil menjadi andalan pemerintah kolonial untuk menghentikan gerak mereka.<sup>114</sup>

Ketika kaum terpelajar kota sedang sibuk mencari bentuk baru bagi organisasi politik yang semakin ditekan oleh otoritas pemerintahan kolonial, sesungguhnya gerakan massa rakyat di bawah tetap bermunculan. Diantara yang paling terkenal adalah suatu gerakan yang dipimpin oleh tokoh kharismatik “kurang berpendidikan” dari Yogyakarta. Bulan Juni 1930, Pangeran Surjodiningrat mendirikan Pakempalan Kawula Ngayogyakarta (PKN). Perpaduan antara keluhan kaum tani selama masa depresi dan daya tarik seorang pemimpin bangsawan Kraton Yogyakarta, telah memberi PKN kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh organ-organ di perkotaan yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Pada Bulan Mei 1931, PKN menyatakan mempunyai anggota lebih dari 100.000 orang di Yogyakarta yang sebagian besar adalah petani pedesaan dan buruh pabrik Gula di Bantul.<sup>115</sup>

Gerakan PKN kemudian menjalin hubungan dengan beberapa tokoh pergerakan Indonesia yang memilih jalan aman dengan memakai politik gerakan bawah tanah (seperti yang akan dijelaskan pada bab IV tentang Koperasi) dan “kerja sama” dengan pemerintah. Penerapannya kemudian berimplikasi pada pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan dengan Volksraad. Kalangan elit terpelajar moderat yang tidak terkena razia pada pemberangusan gerakan tahun 1926 – 1930-an memakai jalan ini dalam perjuangan mereka.<sup>116</sup> Sementara PKN dipaksa untuk hanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang terbatas di Yogyakarta, kegiatan sosial PKN yang paling besar adalah mereka mendirikan 650 buah Koperasi di Sleman, Bantul, Kulonprogo, Klaten, dan Kota Yogya.

Pada Bulan Desember 1935, kelompok-kelompok moderat yang bersepakat memakai jalur kerja sama dengan Belanda, mendirikan Partai Indonesia Raya (PARINDRA). Partai ini adalah fusi antara kelompok Boedi Oetomo dan Perhimpunan Bangsa Indonesia yang diketuai oleh Soetomo dan M.

---

<sup>114</sup> Jean Gelman Taylor. *Social World of Batavia: European and Euroasian in Dutch Asia*. Madison. Univ of Wisconsin Press. 1983. Halaman 64.

<sup>115</sup> Tentang PKN, dapat dilihat didalam M.C Ricklefs. *Op cit.* halaman 389-390.

<sup>116</sup> Susan Abeyasekere. *One Hand Clapping: Indonesian Nationalist and the Dutch, 1939 – 1942*. Monash Papers on Southeast Asia No. 5, Tahun 1976.

Husni Thamrin. Kelompok ini masuk kedalam mekanisme kerja sama dengan Kolonial karena mulai menyadari akan datangnya ancaman dari pertumbuhan Fasisme Jepang, mereka berpendapat bahwa untuk melawan itu, kaum gerakan harus bekerja sama dengan Belanda.<sup>117</sup>

Didalam periode ini, terdapat suatu peristiwa penting didalam perkembangan gerakan sosial di Indonesia. Soetardjo Kartohadikoesoemo, seorang nasionalis yang telah sejak 10 tahun terakhir meniti karir didalam birokrasi pemerintah Kolonial. Dia tidak tergabung didalam kelompok-kelompok nasionalis moderat yang ada, tetapi dia memberikan apresiasi pada perjuangan dengan cara “kerja sama” yang diterapkan oleh kelompok moderat ini. Pada tahun 1937, Soetardjo membuat sebuah petisi tentang usulan bagi pembentukan otonomi Indonesia didalam suatu Uni-Indonesia Belanda selama kurun waktu sepuluh tahun. Bentuk ini terinspirasi dari perjuangan rakyat di Filipina yang akhirnya mendapatkan otonomi dari Amerika Serikat sebagai negara pesemakmuran. Petisi Soetardjo ini mendapat dukungan dari sebagian besar kalangan di Volksraad, tetapi membuat polemik panjang di kelompok nasionalis, terutama PARINDRA kecuali Thamrin.<sup>118</sup>

Soetardjo mendapat dukungan penuh dari kelompok agamis (terutama kelompok Islam) yang pada tahun 1937 baru saja mendirikan Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)<sup>119</sup>. Dukungan ini dimanfaatkan oleh Soetardjo, dengan merekrut tokoh Islam yang dulu tergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia yaitu Wiwoho Poerbohadidjojo. Bersama dengan Thamrin dan Wiwoho, dia kemudian membuat lanjutan dari petisi yang telah diusulkan pada tahun 1936. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengganti kata *Inlander* mejadi kata Indonesich (orang Indonesia) didalam dokumen-dokumen resmi pemerintah,

---

<sup>117</sup> Susan Abayasekere. “Partai Indonesia Raja, 1936 – 1942: A Study in Cooperative Nationalism” dalam *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol 3, no. 2, September 1972. Halaman 262-276.

<sup>118</sup> Susan Abayasekere. “The Soetardjo Petition” dalam *Journal of Indonesia*. no. 15. April 1973. Halaman 81-107.

<sup>119</sup> MIAI adalah organisasi gabungan yang dipelopori oleh gerakan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Pada perjalanannya organisasi-organisasi Islam lain seperti Al-Irsyad, Persis, dan lainnya, mulai bergabung. MIAI adalah organisasi terakhir sebelum perang dunia kedua yang masih mengupayakan untuk membentuk solidaritas kebangsaan yang berlandaskan Islam.

menetapkan kewarganegaraan Indonesia, dan mengubah Volksraad agar menjadi parlemen yang bebas dari intervensi kerajaan Belanda.

Walaupun telah banyak dukungan dari MIAI dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang dibentuk pada 1939 oleh partai-partai nasionalis (kecuali PNI-Baru), hingga tahun 1940, usulan ini tidak pernah di proses oleh pemerintah kolonial. Sementara itu, perkembangan politik International telah mengarah pada perang terbuka yang sangat luas. Setelah pendeklarasian pakta tiga pihak pada bulan September 1940 oleh koalisi negara fasis yaitu Jerman, Jepang, dan Italia, pihak sekutu yang dikomandoi oleh Amerika Serikat mulai mempersiapkan perang terbuka. Peristiwa ini mengawali perang besar yang kemudian terkenal dengan perang dunia kedua.

Tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbour, Hongkong, Filipina, dan Malaysia. Belanda sebagai bagian dari persekutuan besar negara penentang fasis melibatkan diri didalam perang dengan Jepang. 10 Januari 1942, tentara Jepang mulai menyerang pangkalan Belanda di Singapura, dan setelah melewati perang panjang selama dua bulan, akhir Februari, Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris dan Amerika di Laut Jawa. Bulan Maret 1942, Gubernur Jendral Starckenborgh ditahan oleh tentara Jepang di Jakarta, moment ini disusul penyerah terimaan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, atas wilayah Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Sumatera ditempatkan dibawah angkatan darat ke-25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah angkatan Darat ke-16, sementara untuk Kalimantan dan Indonesia bagian Timur berada di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang.<sup>120</sup>

Politik penjajahan Jepang diarahkan pada mobilisasi untuk pemenuhan ekonomi perang mereka yang menelan biaya tinggi.<sup>121</sup> Walaupun mereka

---

<sup>120</sup> Waseda University, Okuma Memorial Social Sciences Research Institute. *Japanese Military Administration in Indonesia*. Washington DC. US Department of Commerce. 1963. Halaman 34.

<sup>121</sup> Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi perang mereka. Penanaman bahan makanan digiatkan dengan mewajibkan rakyat menggunakan pengetahuan dan teknik pertanian yang baru, perluasan areal pertanian, dan penanaman komoditi baru, seperti kapas, yute-rosela dan rami. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, halaman 3-52

menghadapi kendala karena sebagian besar sumber-sumber strategis ini telah dibumi hanguskan oleh penguasa Belanda sesaat sebelum Jepang masuk di Indonesia, kawasan-kawasan strategis seperti perkebunan dan pertambangan di pertahankan sedemikian rupa agar tetap beroperasi. Untuk sektor pertambangan, pada periode ini, walaupun Jepang hanya menjejakkan kaki selama lebih kurang 3 setengah tahun, tetapi investasi Jepang di sektor-sektor industri ekstraktif cukup menonjol. Grup perusahaan pertambangan Jepang khususnya minyak bumi, seperti *Zaibatsu* berhasil mengekstraksi minyak sebanyak 3.250.000 metrik ton (1942), 6.500.00 metrik ton (1943), 3.750.000 metrik ton (1944), dan 850.000 metrik ton (1945).<sup>122</sup> Semua usaha-usaha itu dilakukan dengan mengorbankan ratusan ribu tenaga kerja yang dimobilisasi dari pedesaan-pedesaan di seluruh kepulauan Indonesia untuk dipaksa melayani kepentingan perang Jepang.

Begitupun dengan pengelolaan hutan, Jawatan Kehutanan Belanda yang mengurus hutan di Jawa dan Madura ditukar menjadi *Ringyo Tyuoo Zimusyo*, sementara untuk diluar Jawa diserahkan kepada pemerintah Pusat Jepang di Jakarta dan sebagian diurus oleh Pemerintah Swapraja. Pengelolaan hutan pada masa ini boleh dikatakan tidak ada, kecuali hanya untuk kepentingan perang Jepang. Departemen Perkapalan Jepang (*Zoosen Kyo Ku*) menghabisi hutan jati di Jawa.<sup>123</sup> Sementara untuk diluar Jawa, mereka mengerahkan tenaga kerja yang dimobilisasi melalui sistem kerja paksa *Romusha* untuk membuat goa-goa persembunyian didalam hutan dan jalur-jalur transportasi untuk kepentingan perang dengan sekutu.<sup>124</sup>

Sementara untuk sektor perkebunan -kecuali perkebunan tebu- Jepang memaksa masyarakat perkebunan yang telah ditinggal oleh pemiliknya untuk menggalakkan penanaman tanaman pangan. Pembongkaran perkebunan-perkebunan bekas Belanda ini, membuat turunnya produksi komoditi andalan perkebunan. Tetapi, penggarapan kembali tanah-tanah perkebunan Belanda ini

---

<sup>122</sup> Arianto Sangaji, *Buruk Inco Rakyat di Gusur., Ekonomi Politik Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2002. Halaman 47.

<sup>123</sup> I Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. Dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No.1, Maret 2005; halaman 33 – 55.

<sup>124</sup> Alfred Mc Coy (ed). *Southeast Asia Under Japanese Occupation*. Yale University Southeast Asian Studies. Working Paper no.41.1986.

menghidupkan kembali perasaan massa tani di pedesaan untuk bisa memiliki tanah yang dulunya diperuntukkan bagi perkebunan Belanda.<sup>125</sup>

Cerita tentang perkebunan Ciwangun, ikut berjalan didalam sketsa seperti diatas. Ketika Jepang masuk ke Ciwangun, perkebunan ini dalam tahap peremajaan tanaman tua, dan pergantian komoditi ke jenis tanaman Karet. Sementara, buruh-buruh perkebunan yang jumlahnya cukup banyak, sebagian telah lari berpencar ke beberapa daerah, dan sebagian yang lain tetap bertahan di lokasi perkebunan. Orang-orang yang bertahan inilah yang kemudian di pekerjakan oleh militer Jepang untuk menghidupkan kembali perkebunan ini, yang pada masa setelah penjajahan Jepang berakhir, mereka menggabungkan diri dengan Barisan Tani Indonesia atas ajakan tokoh pendirinya yaitu M. Tauchid. Tanaman yang semula berupa Kina dan Karet, diubah sebagian menjadi tanaman pangan, dan sebagian lagi tetap dipertahankan sebagai kebun karet.

Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, telah terjadi pemulangan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda sejak tahun 1933-1935. Terutama M. Hatta dan Sutan Syahrir, mereka bersepakat membagi tugas. Hatta bekerja sama dengan Jepang, dan Syahrir membangun gerakan bawah tanah bersama dengan mantan-mantan aktivis PNI-Baru yang masih tersisa. Sementara itu, Soekarno –yang tidak terlalu mepedulikan urusan teoritis tentang demokrasi dan fasis- mulai bergabung dengan Hatta, mereka bekerja sama dengan Jepang agar pemerintahan Jepang tidak terlalu semena-mena memperlakukan kaum pergerakan nasional dan gerakan-gerakan politik Indonesia.<sup>126</sup> Salah satu usaha mereka adalah mendorong Jepang agar tidak memberikan hukuman mati kepada salah satu tokoh pergerakan nasional, Amir Syarifudin, yang mencoba melakukan pemberontakan kecil pada Bulan Desember 1942.

Pendekatan-pendekatan ala Koperatif Hatta ini kemudian bertarung dengan kepentingan mobilisasi Jepang untuk mempersiapkan perang yang lebih besar dengan Sekutu. Jepang membentuk organisasi-organisasi kepemudaan untuk kepentingan perangnya, tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah suatu jalan

---

<sup>125</sup> Noer Fauzi Rachman. 2012. *Land Reform Dari Masa ke Masa*. Bogor: Tanah Air Beta.

<sup>126</sup> Benedict Anderson. "Japan: The light of Asia". Dalam Josef Silverstein (ed). *Southeast Asia in World War II: Four Essays*. Yale University, Southeast Asian Studies Monograph Series no.7. 1966. Halaman 13-50.

untuk mempermudah konsolidasi gerakan rakyat yang lebih besar pada saat Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik.

Pada Bulan Agustus 1942, Jepang membuka sekolah-sekolah latihan bagi para pejabat dan guru di Jakarta. Bulan April 1943, untuk pemuda usia 14 – 25 tahun didirikan hingga ke desa-desa sebuah korps pemuda (*Seinendan*) yang bersifat semi militer. Sementara untuk pemuda 25 – 35 tahun Jepang mendirikan *Keibodan* sebagai organisasi pembantu polisi. Pada tahun yang sama Jepang juga membentuk pasukan yang dikenal dengan *Heiho*, untuk membantu angkatan darat dan laut Jepang, pada akhir perang 25.000 orang pemuda Indonesia terdaftar menjadi anggota *Heiho*.<sup>127</sup>

Pada akhir tahun 1943, Jepang mendirikan organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), mereka memanfaatkan 2 tokoh nasionalis (Soekarno Hatta), dan 2 tokoh pendidikan (Ki Hajar Dewantara-Taman Siswa, dan KH. Mas Mansyur-Muhammadiyah. Organisasi ini terlalu elit untuk bisa di jadikan tempat mobilisasi bagi kepentingan Jepang. Akhirnya di akhir tahun 1943 Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yaitu Pembela Tanah Air (PETA). Organisasi inilah yang kemudian banyak melahirkan langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan Jepang sebagai batu loncatan menuju proklamasi 1945.

Aspirasi gerakan petani yang pernah dihilangkan pada masa depresi politik tahun 1926 -1933 (seperti yang dijelaskan diatas) kemudian muncul kembali pada periode ini. Dari dokumen Arsip Nasional RI, beberapa pemberontakan terjadi terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Pemberontakan ini tidak muncul dari massa rakyat yang terkait dengan kelompok elit gerakan nasional di Jawa –seperti pada masa sebelumnya-, tetapi mereka muncul dari basis-basis lokal yang menolak perlakuan kejam Jepang terhadap mereka.

Pada Bulan November 1942, petani-petani di Aceh melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Jepang dan mencegat patroli-patroli mereka di daerah perkebunan-perkebunan yang ada di daerah Pidie. Di Kalimantan Barat, persekongkolan pejabat-pejabat dan kalangan pedagang Cina melakukan boikot terhadap pengiriman beras dan hasil tanaman untuk Jepang. Pemboikotan ini

---

<sup>127</sup> Aiko Kurosawa. "Propaganda Media on Java Under the Japanese 1942-1945". Dalam *Jurnal Indonesia*. No. 44. Oktober 1987. Halaman 59-116.

didukung penuh oleh kesultanan-kesultanan kecil yang ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, muncul aspirasi untuk membentuk negara Islam yang diawali dengan penolakan terhadap kewajiban semua institusi pendidikan untuk memakai cara-cara penghormatan Jepang kepada Dewa Matahari. Di Kalimantan Timur, orang-orang Dayak mengamuk membantai puluhan tentara Jepang yang sedang melakukan pesta pada sebuah acara perjamuan mereka di kantor gubernur. Tetapi pemberontakan-pemberontakan kecil itu segera di tumpas dengan mengirimkan pasukan pembasmi yang terkenal sangat kejam, yaitu *Kempetai*.<sup>128</sup>

Di Jawa, perlawanan-perlawanan muncul kebanyakan di mobilisasi oleh tokoh-tokoh Islam. Kebanyakan dilakukan oleh santri-santri yang berada di bawah bimbingan tokoh-tokoh tersebut, tentu saja juga dari kalangan massa petani, tetapi hampir tidak ada satu pemberontakan petani di Jawa yang muncul mengatasnamakan sisa-sisa dari Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Islam, yang mana pernah menjadi tonggak perlawanan massa rakyat terhadap kolonial Belanda.<sup>129</sup> Untuk mengatasi ini, pemerintah Jepang tidak terlalu represif –seperti penumpasan gerakan perlawanan di Kalimantan-. Mereka, justru mencari celah agar masuk “menjinakkan” kelompok-kelompok Islam ini dengan membujuk pengurus di MIAI yang telah berubah nama menjadi MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) untuk membentuk kantor-kantor urusan agama di seluruh Jawa. KH. Hasyim Asyari diangkat menjadi kepala kantor urusan agama ini.<sup>130</sup>

Kekuasaan Jepang perlahan-lahan mulai memudar akibat serangan pasukan sekutu. Kondisi itu menjadi pengamatan serius kelompok bawah tanah yang dipimpin oleh Syahrir. Mereka secara rutin menginformasikan kondisi politik perang pasifik kepada Hatta dan Soekarno. Pemerintahan Jepang di Indonesia mulai menyadari angin neraka kekalahan mereka. Terutama petinggi angkatan laut dan darat Jepang di Indonesia, mulai menjalin hubungan yang erat dengan Soekarno dan Hatta mengenai janji kemerdekaan untuk Indonesia yang telah

---

<sup>128</sup> Cerita tentang pemberontakan-pemberontakan zaman Jepang ini banyak dipaparkan oleh Willard H. Elsbree. *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist movements, 1940 – 1945*. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1953.

<sup>129</sup> Shigeru Sato. *War, Nationalism and Peasant; Java Under the Japanese Occupation, 1942-1945*. St Leonards, NSW: Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin. 1994.

<sup>130</sup> Yasuko Kobayashi. “Kyai and Japanese Military”. *SI* vol 4, no. 3. 1997. Halaman 65-68.

diucapkan oleh perdana menteri Jepang Koiso Kuniaki pada 7 September 1944. Pertimbangan untuk mendorong nasionalis tua (Soekarno-Hatta) ini lebih karena pertimbangan strategis, mereka lebih mudah bekerja sama daripada golongan muda (M. Yamin, BM Diah, dkk).

Tanggal 6 Agustus, Bom Atom pertama disarangkan oleh Sekutu di pusat kota besar Jepang, Hiroshima. Berselang 2 hari bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sementara itu, persiapan kemerdekaan Indonesia, telah disusun oleh kalangan muda yang merencanakan kemerdekaan tanpa keterlibatan Jepang. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan sekelompok orang yang jumlahnya sedikit didepan rumahnya.<sup>131</sup>

#### 3.4 Pasca Kemerdekaan hingga Polemik Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria.

Kabar tentang kemerdekaan Indonesia segera disiarkan oleh kantor berita Indonesia-cikal bakal RRI-, berita itu disambut di hampir di seluruh wilayah yang terjangkau siaran radio. Proklamasi inilah yang kemudian mengawali tonggak sejarah penting didalam kemunculan kembali gerakan petani didalam kancah perpolitikan Indonesia.

Gerakan yang muncul pasca proklamasi 1945 sebenarnya adalah gerakan-gerakan lama yang pernah dipukul pada tahun-tahun 1926-1933. Sekembali mereka dari pembuangan dan pengasingan, mereka mengkonsolidasikan organ-organ ini didalam partai politik yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945. Soekarno kembali menghidupkan PNI, Syahrir yang tidak sepatutnya sejak dulu dengan Soekarno membentuk Partai Sosialis Indonesia, sementara Partai Komunis Indonesia, dinyatakan berdiri kembali pada oktober 1945, kelompok-kelompok Islam seperti M. Natsir menjadikan MASYUMI sebagai partai politik mereka, begitupun Hasyim Asyari, mengubah Nahdhatul Ulama yang dulunya organisasi perkumpulan menjadi Partai Politik.

---

<sup>131</sup> F.C Jones. *Japan's New Order in East Asia: Its Rise and Fall, 1937-1945*. London: Oxford University Press. 1954. Halaman 45-67.

Pada tanggal 22-25 November 1945 digelar Kongres Petani di Yogyakarta, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan kaum buruh dan tani pada tanggal 5-7 November 1945 di Surakarta. Kongres Petani di Yogyakarta menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk suatu organisasi petani yang dinamakan Barisan Tani Indonesia (BTI). Awalnya BTI adalah kelompok petani yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta yang dekat dengan mantan aktivis PKN-nya Surjodiningrat. Karena itulah BTI mendapat dukungan kuat dari pihak Kraton Yogyakarta, khususnya Hamengkubuwono IX.<sup>132</sup>

BTI yang didalam cerita tentang sejarah gerakan petani di Indonesia selalu diidentikkan dengan Partai Komunis Indonesia, tidaklah sepenuhnya dapat disetujui. Karena pada awal berdiri BTI dia dipelopori oleh aktivis-aktivis moderat dan aktivis Sosialis yang pada waktu itu cukup kuat posisinya di Yogyakarta. Mereka memiliki hubungan dekat terutama dengan kelompok Syahrir. Pengurus inti dari BTI-awal ini adalah kelompok sosialis seperti S.Sardjono sebagai Ketua, dan M.Tauchid sebagai kepala bagian sosial Ekonomi.

Pada masa awal pembentukannya, BTI banyak mengangkat isu anti kolonialisme dan imperialisme. Dengan isu tersebut, BTI dapat merangkul berbagai kalangan dengan latar belakang ideologis apapun. Namun, pasang surut perkembangannya mengarah pada semakin kuatnya kelompok kiri (Kelompok Komunis) dan semakin dominannya kelompok komunis ini duduk sebagai pimpinan BTI. Situasi ini semakin sulit saat tahun 1947 terjadi pemberontakan PKI di Madiun pimpinan Musso-Amir serta Front Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Pengurus BTI yang dari kelompok Yogya pimpinan M.Tauchid tidak pernah setuju dengan kedua aksi tersebut, tetapi pemerintah Soekarno tetap menangkap Tauchid.<sup>133</sup> Penangkapan terhadap anggota BTI yang tidak terlibat pemberontakan Madiun mendapat reaksi keras dari M.Hatta, tetapi gubernur militer (Gatot Subroto) tidak melepaskan kelompok BTI-Yogya ini hingga agresi militer Belanda ke II tahun 1949.

---

<sup>132</sup> Andi Achdian. Tanah Bagi yang Tak Bertanah, *Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1960-1965*. Bogor. Kekal Press dan STPN. 2009. Halaman 38.

<sup>133</sup> Ben Anderson. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang, dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta, Sinar Harapan. 1988. Halaman 349.

Pertikaian antara elit politik nasional semakin meruncing, dan BTI semakin didominasi oleh pimpinan-pimpinan dari Partai Komunis yang telah “dimaafkan” oleh Soekarno. Akibat dominasi tersebut, pada tahun 1950, pemimpin yang berlatar ideologi Islam meninggalkan BTI dan menggabungkan diri dalam suatu organisasi tani yang disponsori oleh Partai Masyumi, yakni STII (Serikat Tani Islam Indonesia) yang sesungguhnya telah dibentuk sejak tahun 1946. Organisasi massa petani pada periode ini, selain menjadi wadah perjuangan kaum petani juga digunakan oleh partai politik sebagai kendaraan guna mendapatkan dukungan massa petani.

Selain STII, organisasi petani lainnya yang berada di bawah naungan partai politik antara lain adalah Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) di bawah PNI, Pertanu (Persatuan Tani Nahdhatul Ulama) di bawah NU, dan RTI (Rukun Tani Indonesia) di bawah PKI. Isu yang dibawa oleh setiap organisasi massa petani pada masa pasca kemerdekaan sebagian besar didominasi oleh isu anti kolonialisme yang berkembang dengan berbagai isu turunan. Isu inilah yang membuat beberapa organisasi massa petani memiliki kesatuan gerak, walaupun mereka berentangan secara ideologis.

Contohnya dapat dilihat dengan digelarnya konferensi petani seluruh Indonesia yang diorganisir secara bersama oleh BTI, STII, dan Petani pada tanggal 22-23 November 1949, beberapa waktu setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan penuh bagi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Beberapa isu yang mengemuka dalam konferensi petani itu antara lain tentang pemecahan masalah konversi tanah, pemilik perkebunan, dan buruh tani.

Buruh-buruh tani di Ciwangun, termasuk salah satu basis dari organisasi BTI –awal. Mereka diajak oleh seorang pendiri BTI, M Tauchid yang juga seorang pendidik kader yang dekat dengan kelompok Syahrir. Ajakan Tauchid kepada mantan buruh tani di Ciwangun ini kemudian terwujud, ketika Tauchid berhasil menggerakkan mantan buruh tani di Ciwangun untuk datang menghadiri kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada tahun 1947. Dan pada tahun yang sama, mereka keseluruhannya tergabung menjadi bagian dari organ BTI-awal ini.

Pada perkembangan lanjutan, tepatnya tahun 1953, BTI, SAKTI dan RTI menggabungkan diri menjadi satu. Mereka hanya memakai bendera BTI, yang

telah banyak dimasuki oleh pemimpin-pemimpin dari Partai Komunis Indonesia yang mulai kembali mengkonsolidasikan diri pasca peristiwa Madiun (1947). Kelompok yang bergerak masuk kedalam organisasi-organisasi ini adalah mereka yang tidak terlibat langsung dengan pemberontakan Madiun, terutama yang dipimpin oleh seorang tokoh muda bernama Aidit. Meleburnya tiga organ tani besar itu tidak disetujui oleh kelompok sosialis Syahrir yang juga ikut berjuang mendirikan BTI. Akhirnya mereka menyatakan keluar dari BTI dan mendirikan Gerakan Tani Indonesia (GTI) yang langsung menjadi alat politik Partai Sosialis Indonesia. mantan-mantan buruh tani di Ciwangun yang semula bergabung dengan BTI kemudian ikut pindah ke GTI, dan mereka mendirikan markas GTI di sebuah bekas gudang milik perkebunan yang hampir mati itu.

Organisasi-organisasi tani tersebut, khususnya BTI kemudian berkembang dengan pesat, bahkan pada akhir tahun 1955, anggota BTI telah mencapai angka 3 juta lebih dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. sementara gerakan-gerakan petani yang lain, menjalankan agenda-agenda nya masing-masing. Selain melakukan pendidikan-pendidikan dan mobilisasi untuk menguasai perkebunan-perkebunan Belanda yang hampir mati, organ-organ tani ini juga dijadikan mesin politik bagi partai yang menjadi afiliasinya. Dan GTI di Ciwangun, berhasil melakukan kerja politik ini, terbukti dengan menang telaknya PSI di Ciwangun pada Pemilu 1955.

Dimasa Pasca Kemerdekaan, gerakan petani mendapat tempat bagi berlangsungnya cita-cita kebangsaan yang dirintis oleh *founding father* Indonesia, melalui usaha-usaha mereka dalam mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya tahun 1945, para *Founding Father* Negara Indonesia, sadar betul dengan kondisi kekayaan alam yang ada di atas dan di dalam bumi pertiwi ini, dan dari basis kekayaan itulah Indonesia dan rakyatnya diandaikan untuk membangun Bumi Indonesia bagi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Sejak awal, dalam UUD 1945, perihal tentang kekayaan alam yang di eksplisitkan dengan kata-kata “Sumber Daya Alam” menjadi objek pengaturan tersendiri di dalam Pasal 33 ayat 3 yang disana mengatur tentang “penggunaan sumber daya alam itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Indonesia”. Bahkan, Eric Jacoby dalam karyanya yang diterbitkan tahun 1961 *Agrarian Unrest in Southeast Asia* menyatakan bahwa “... *Buruknya struktur agraria di Indonesia-lah yang memberi jalan bagi gagasan-gagasan tentang kebangsaan, dan perjuangan politik yang dilakukan di Indonesia, yang selanjutnya dikuatkan oleh identitas rasa perjuangan.*”<sup>134</sup>

Kesadaran tentang pentingnya memperbaiki nasib mayoritas rakyat di kepulauan Indonesia, menuntut pemimpin negara yang baru merdeka ini untuk membuat terobosan-terobosan baru, terutama untuk menata ulang struktur agraria yang timpang warisan kolonial diantaranya adalah penghapusan hak istimewa desa-desa perdikan di Banyumas (UU No. 13/1946), dan penghapusan hak istimewa sekitar 40 perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No. 13/1948).<sup>135</sup>

Secara *de jure*, walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi secara *de facto*, masih banyak perusahaan Belanda yang beroperasi pasca 1945 ini, terutama 5 perusahaan besar yaitu Pertama, *NV Borsumij*: pada bidang perindustrian seperti; pabrik bir *Oranye Brouwerij*, pabrik tekstil *Nebritex* dan beberapa apotik. Kedua, *NV Jacobson van den Berg*: di bidang perdagangan ekspor dan impor. Ketiga, *NV Internatio*: perusahaan bidang perkapalan, yang beberapa perwakilan maskapai kapal dikelola oleh perusahaan ini, di samping itu juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan perkebunan. Perusahaan ini memiliki 60 cabang dan mempunyai buruh kurang lebih 2000 orang. Keempat, *NV Lindeteves*: Perusahaan ini bergerak di bidang perindustrian dan peralatan teknik untuk keperluan industri dalam negeri. Perusahaan ini memiliki 6 cabang dan membawahi kurang lebih 2000 orang buruh. Kelima, *NV Geo Wehry & Co*: perusahaan ini sejak tahun 1867 telah beroperasi di Hindia-Belanda, kegiatan

---

<sup>134</sup> Eric Jacoby, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay, Asia Publishing Co, 1961, hlm: 50. Pada tanggal 12 September 1960, sesaat sebelum UUPA di sahkan, Menteri Agraria Sadjarwo didalam pengantar untuk sidang perumusan Rancangan Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria di DPR-GR, menyebutkan bahwa “perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesi untuk melepaskan diri dari cengkraman pengaruh sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

<sup>135</sup> Noer Fauzi Rachman. *Land Reform Dari Masa ke Masa*. Tanah Air Beta. Bogor. 2012.

utamanya bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini mempunyai 28 perkebunan di Indonesia, dengan komoditi antara lain teh, kina dan karet.<sup>136</sup>

Sementara di sektor pertambangan terdapat 12 lapangan pertambangan minyak di Sumatera Utara, khususnya di Karesidenan Sumatera Timur dan Aceh, yang menghasilkan kurang lebih 1.000.000 kg (kilogram) minyak dan kurang lebih 240.000 kg gas setahunnya dari sejumlah kurang lebih 740 pemboran yang dioperasikan oleh *De Bataafsche Petroleum Maatschapij* (BPM) dan mendirikan sebuah *refinery* (kilang penyulingan) di Pangkalan Brandan. Untuk Kawasan Hutan, pemerintah Indonesia walaupun telah membentuk tim untuk merumuskan penataan kawasan hutan, tetapi pada prinsipnya, penggunaan peraturan peninggalan Belanda masih diterapkan. Peraturan *Boschordonantie voor Java en Madura 1927* dan *Provinciale Boschbesehermings-verordening* (Peraturan Perlindungan Hutan Daerah) masih diberlakukan di area Jawa dan Madura, sementara untuk luar Jawa dan Madura masih diberlakukan aturan peninggalan Belanda seperti *Agrarische Reglement* untuk Sumatera, Sulawesi, dan kepulauan Bangka Belitung.<sup>137</sup>

Kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 menyatakan akan ada “perpindahan kekuasaan yang akan diatur dalam waktu sesingkat singkatnya” membuat kepentingan kolonial ini terancam. 1 tahun setelah Indonesia Merdeka, tahun 1946, Belanda yang membonceng pada pasukan sekutu berhasil menarik Indonesia ke meja perundingan. Negosiasi yang terkenal dengan nama Perundingan Linggarjati itu kemudian menghasilkan resolusi bahwa “negara Indonesia hanya mencakup Jawa dan Madura” sementara yang lain berada di bawah persemajukan Uni Indonesia-Belanda yang dipalai oleh Ratu Belanda. Tahun 1947, Belanda melancarkan serangan agresi militer ke pusat-pusat perkebunan dan pertambangan di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Tahun 1948, Belanda kembali melancarkan serangan ke perkebunan-perkebunan besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Serangan ini kemudian

---

<sup>136</sup> Furnival, *Hindia Belanda, Studi atas Ekonomi Majemuk*. Jakarta. Freedom Institute. 2006.

<sup>137</sup> I Nyoman Nurjaya (2005) *op cit* ; halaman: 33 – 55.

mendapat perhatian dari dunia internasional, terutama Komisi Tiga Negara yang telah dibentuk sebelumnya pasca agresi militer pertama tahun 1947. Hasilnya, Indonesia harus masuk ke meja perundingan lagi dengan Belanda. Perundingan ini kemudian dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar, yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.

Periode hingga tahun 1950, penataan sumber daya alam di kepulauan Indonesia oleh elit politik nasional dihadapkan pada persoalan rumit karena baru saja “dikalahkan” pada perjanjian KMB (konferensi Meja Bundar). DR. Gunawan Wiradi dalam sebuah makalah berjudul “*Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria, Mencari Pegangan Dalam Ketidakpastian*” menjelaskan bahwa terdapat poin dalam KMB yang merugikan pihak rakyat Indonesia—yang jarang diungkap dalam narasi sejarah *mainstream*—yaitu “perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda”. Artinya, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut. Perjanjian KMB, memunculkan masalah baru dalam perkembangan kondisi politik agraria di Indonesia, khususnya di daerah-daerah bekas *onderneming*. Lahan perkebunan yang sebelum KMB telah digarap oleh eks-buruh perkebunan dan kaum tani di sekitar perkebunan, yang selama ini hanya merasakan dampak dijajah oleh keberadaan perkebunan itu, akhirnya diminta untuk mengembalikan lagi kepada pemilik haknya yang semula yaitu perusahaan yang ditetapkan hak *erpacht*-nya berdasarkan hukum agraria Belanda. Pada beberapa wilayah konsesi-konsesi tambang Belanda yang telah ditinggalkan pemiliknya, serikat-serikat buruh yang melakukan pendudukan terhadap kantor-kantor perusahaan menolak untuk meninggalkan kantor-kantor yang diduduki, begitupun di banyak lokasi perkebunan besar Belanda di Jawa dan Sumatera, akibatnya terjadi banyak bentrokan di wilayah-wilayah seperti ini.

Titik penting berikutnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan UU Darurat No.8 Tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. UU itu menjelaskan bahwa pendudukan bekas perkebunan yang telah ditinggalkan—ditelantarkan—oleh pemiliknya tidak dikategorikan sebagai penyerobotan. Puncaknya pada tahun 1956 Presiden Soekarno mengeluarkan UU No.13 tahun 1956 tentang pembatalan kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Satu tahun

setelahnya terjadi pendudukan kantor-kantor perusahaan Belanda yang masih beroperasi oleh serikat-serikat buruh yang diorganisir oleh Partai Nasionalis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.

Pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang pelarangan tanah-tanah partikelir (UU No. 1/1958).<sup>138</sup> UU ini kemudian diikuti dengan dikeluarkan UU No.86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, pada 31 Desember 1958. Pasal utama di dalam UU tersebut yang mengatur nasionalisasi terdapat pada pasal 1 yang menegaskan bahwa “*perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh oleh negara Republik Indonesia*”, ratusan perusahaan di berbagai sektor (perkebunan, pertambangan, keuangan, angkutan-transportasi, dll) dinasionalisasi pada periode tersebut.<sup>139</sup>

Tetapi, problem nasionalisasi yang dilakukan ini adalah, dia beriringan dengan konflik elit politik nasional yang terpecah belah pasca 1950. Dalam isu nasionalisasi ini, terdapat banyak kubu yang bertarung, terutama antara nasionalis-kiri, agama dan militer. Selain itu, masalah lain yang penting juga muncul, terutama berkaitan dengan ketidaksiapan pemerintah Nasional dalam mengelola dan mengoperasikan ratusan perusahaan besar Belanda yang masih beroperasi untuk dijadikan pendapatan nasional dan digunakan untuk pembangunan nasional. Kedua persoalan ini terbukti membuat tidak efektifnya “Rencana Soemitro” dan gagalnya Rencana Lima Tahun (1955-1960) kabinet Ali Sostroamidjoyo yang disusun oleh Biro Perencanaan Nasional sebagai turunan dari agenda nasionalisasi.

Sementara politik nasionalisasi dengan segala polemiknya itu berlangsung, pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) yang dianggap merupakan tonggak fenomenal untuk melakukan perubahan

---

<sup>138</sup> Lebih detail tentang kebijakan-kebijakan awal tentang masalah penataan struktur agraria di awal kemerdekaan Indonesia dibahas didalam “Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia” karangan Singgih Praptodihardjo dan di dalam buku *Dua Abad Penguasaan Tanah*, SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), Jakarta: Penerbit Obor, 1984.

<sup>139</sup> Arianto Sangaji, *Op.Cit.*, hlm: 27. Untuk kajian tentang dilema nasionalisasi ini dijelaskan oleh Budiman Ginting. “Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia,” dalam *Jurnal Equality* Vol.12 No.2 Agustus 2007.

besar secara menyeluruh di dalam mengatasi ketimpangan struktur agraria warisan kolonial. Undang-Undang ini diniatkan menjadi induk dari berbagai perundangan lain yang terkait dengan penguasaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam. Namun fungsi jangkauan kerja UU ini dikecilkan pada urusan pertanahan pada sektor pertanian rakyat, dengan adanya pengaturan perjanjian bagi hasil (UU No. 2/1960), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/1960), cara pelaksanaan redistribusi tanah objek land reform, yakni tanah kelebihan, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960) dan pendaftaran tanah (PP 10/1961).<sup>140</sup> Walaupun demikian, UU ini tetap menjadi harapan dari apa yang dinamakan dengan reforma agraria, yaitu pembaruan struktur agraria yang timpang warisan kolonial dan eksploitatif menjadi struktur agraria yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra yang dilekatkan pada pasal-pasal UUPA yang tidak mencakup keseluruhan problem agraria di Indonesia, dia adalah suatu bentuk dari simbol dari berakhirnya peraturan menyangkut agraria yang diwariskan oleh politik kolonial. UU ini awalnya telah dimulai membahasnya sejak tahun 1948 dengan dibentuknya sebuah panitia yang dikenal sebagai “Panitia Jogja” berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.16 tanggal 21 Mei 1948 yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo dari kementerian Dalam Negeri. Tugas yang diemban oleh Panitia Jogja ini terutama untuk menemukan cara bagaimana agar menghilangkan dualisme hukum agraria di Indonesia (pengakuan Hak Barat dan Hak Masyarakat Indonesia). Tim ini bertugas mengupayakan pertanian kolektif melalui mekanisme kerja kelembagaan Koperasi, dan memberikan jaminan agar petani penggarap di Indonesia mendapatkan tanah garapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dalam perjalanan pemerintahan yang masih dini itu, selanjutnya tugas panitia jogja di teruskan oleh “panitia agraria Jakarta” yang masih di ketuai oleh Sarimin Reksodiharjo berdasarkan surat kepres RI no 36 tahun 1951, yang kemudian pada tahun 1953 digantikan oleh Singgih Praptodihardjo. Pembentukan

---

<sup>140</sup> Noer Fauzi Rachman, dalam *Nyageurkeun Nu Paremeun, Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan*. Makalah dalam pendidikan Guru Reforma Agraria. 12 Maret 2008.

Panitia Jakarta ini berjalan bersamaan di dalam program kerja kabinet Ali Sostroamidjojo yang antara lain menyatakan bahwa: *untuk memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kita, maka kabinet memandang perlu mengangkat seorang menteri urusan agraria yang disertai tugas khusus tersebut.*<sup>141</sup> Sejak itu maka dibentuklah Kementerian Agraria, sedangkan untuk urusan pembuatan Undang-Undang Agraria yang baru di bentuk satu panitia lagi yang dikenal dengan “panitia agraria Soewahyo” berdasarkan Keputusan Presiden No.1 tahun 1956.

Rangkaian kerja dari Panitia Agraria Soewahyo ini berujung pada dihasilkannya sebuah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria (RUUPA) yang kemudian diajukan ke DPR. Rancangan ini dalam perjalanan pembahasannya kemudian di gantikan oleh Soenarjo yang banyak mendapat masukan dari Seksi Agraria Universitas Gajah Mada, pada Bulan Mei 1960. Rancangan ini dicabut lagi oleh DPR dan dalam perkembangannya kemudian, panitia ini di ketuai oleh Sadjarwo yang melalui rapat DPR-GR disahkan menjadi UU No.5 tahun 1960 atau yang dikenal sebagai UUPA.

Situasi politik nasional semakin memburuk pada lima tahun pertama UUPA diluncurkan. Situasi itu diperburuk dengan kemelut di tingkat international, yaitu perang dingin antara blok kanan yang dipimpin Amerika Serikat dan blok kiri yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertikaian antarblok ini berimbas terhadap negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, karena di negara-negara inilah kepentingan bisnis dua adikuasa tersebut berada, misalnya di Indonesia saja, terdapat tiga perusahaan minyak yang besar kepunyaan Amerika masih beroperasi seperti Stanvac, California Texas-Caltex, dan Shell pada tahun-tahun ‘60an.<sup>142</sup>

Gerakan petani di Indonesia, pada masa-masa ini, tercatat mengerucut pada apa yang dikenal sebagai *aksi sepihak* yaitu aksi pendudukan lahan-lahan perkebunan dan pertanian yang dilakukan oleh organisasi-organisasi petani yang tergabung dibawah bendera Barisan Tani Indonesia. Aksi ini dilakukan terutama

---

<sup>141</sup> Andik Hardiyanto, Noer Fauzi Rachman, dan Dianto Bachriadi, Sistem Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Indonesia, dalam *Agenda Land Reform di Indonesia Sekarang*. Konsorsium Pembaruan Agraria, 1996. Hal. 19.

<sup>142</sup> Arianto Sangaji (2002). *Op cit* Halaman 29.

kepada perkebunan-perkebunan luas yang dulunya dimiliki oleh perusahaan Belanda yang kemudian pada masa nasionalisasi banyak yang dikuasai oleh militer. Selain itu, sasaran dari aksi sepihak ini juga dilakukan kepada tanah-tanah yang dikuasai oleh tuan tanah-tuan tanah yang memiliki sejumlah lahan pertanian di pedesaan. Masa ini juga bermunculan petani revolusioner dan petani yang kontra revolusi, pembelahan ini akibat dari pertikaian elit politik tingkat nasional yang semakin memanas.

Barisan Tani Indonesia, -yang pada kongres ke 2 pada tahun 1951 di Jakarta, telah bersepakat untuk menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia- berhasil memobilisasi aksi dari petani yang revolusioner. Atas perintah Komite Central PKI, mereka melakukan kolaborasi dengan Akademi Ilmu Sosial Ali Archam untuk membuat semacam assessment tentang kemungkinan dilakukannya aksi sepihak. Dari studi singkat itu, kemudian ketua CC PKI, DN Aidit, menyimpulkan, bahwa inilah saat, dimana kaum tani harus mengambil tanah-tanah luas yang dimiliki perkebunan dan tuan tanah pedesaan itu.<sup>143</sup>

Gelombang aksi *reclaiming* mendapat sorotan, dan terdapat perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap aksi ini. Terutama tantangan terbuka yang datang dari kelompok Islam moderat yang merasa terancam dengan aksi-aksi sepihak yang dilakukan BTI, karena banyak tanah-tanah yang di reclaim dimiliki tokoh-tokoh Islam. Perdebatan itu, semakin meruncing karena terjadinya persaingan politik partai yang terjadi sejak tahun 50-an. Tetapi PKI mendapat kesempatan besar, karena Soekarno memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang yang menjadi pengurus PKI. Kedekatan itu, didalam biografinya, Soekarno berpendapat, bahwa, golongan komunis adalah salah satu dari gerakan anti imperialisme yang sejalan dengan doktrin revolusi Indonesia.

Situasi politik Indonesia berubah drastis pada tahun 1965 ini. Setelah terjadi pembunuhan terhadap sejumlah petinggi Angkatan Darat, PKI menjadi kambing hitam. Tuduhan terhadap PKI ini kemudian berujung pada pembantaian ribuan orang anggota dan simpatisan PKI oleh militer dan kelompok yang anti komunis-terutama kelompok Islam-. Pembantaian ini terjadi di Jawa dan beberapa

---

<sup>143</sup> D.N Aidit. *Kaum Tani Mengganjang Setan Setan Desa: laporan Singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat*. Jakarta. Jajasan Pembaharuan. 1965.

tempat di luar Jawa, termasuk anggota-anggota dari organisasi-organisasi simpatisan PKI yang berada di pedesaan. Pemerintahan baru di bentuk, Soekarno telah kehilangan kekuasaannya, dan digantikan oleh seorang tentara bernama Soeharto. Pergantian ini membuat dibungkamnya kembali gerakan-gerakan petani, tidak hanya gerakan yang di labeli PKI, tetapi juga gerakan-gerakan petani yang lain, dan seluruh bentuk gerakan sosial dalam pengertian yang umum.

### 3.5 Pembungkaman Gerakan dan “Kebangkitan” Pasca Orde Baru.

Situasi gerakan sosial (termasuk gerakan petani) pada masa Orde Baru, mirip dengan kondisi pemberangusan gerakan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda pada rentang antara 1926 – 1933. Pada tahap awal ketika Soeharto berkuasa, dia telah menarik garis yang sangat tegas antara Orde Lama (PKI) dan Orde Baru.<sup>144</sup> Polemik politik 1965-1966 yang merupakan tonggak berdirinya Orde Baru diawali dengan pembantaian besar-besaran ribuan orang di pedesaan Indonesia yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia. Cerita tentang pembantaian ini digambarkan oleh Hilmar Farid didalam tulisannya yang berjudul *Indonesia's original sin: mass killings and capitalist expansion 1965–66* sebagai peristiwa pembantaian terbesar didalam sejarah Indonesia.<sup>145</sup>

Untuk yang tidak ikut dibantai oleh militer yang bekerja dengan menggerakkan kekuatan massa rakyat yang anti-Komunis (kebanyakan dari kelompok Islam), dilakukan pengucilan politik terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru. Sanksi non-kriminal diberlakukan dengan

<sup>144</sup> Tanggal 12 Maret 1966 keluar Tap MPRS No.IX/MPRS/1960 yang berisi: menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, dan mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat PKI.

<sup>145</sup> Hilmar Farid menghubungkan awal cerita Orde Baru tentang pembantaian ini dengan kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru yang membalik semua tatanan kebijakan populis Soekarno. Inilah awal dari ekspansi kapital besar-besaran ke Indonesia pada masa Orde Baru. lihat dalam; Hilmar Farid. “Indonesia’s original sin: mass killings and capitalist expansion 1965-1966”. *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 6, Number 1, 2005. Lihat juga Robert Cribb (Ed), *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta. Mata Bangsa. 2003. halaman 229.

pengucilan politik melalui pembuatan aturan administrative, yang sekaligus berfungsi untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru yaitu KTP yang ditandai ET (eks tapol).<sup>146</sup>

Setelah Soeharto dilantik oleh MPRS yang diketuai oleh AH. Nasoetion pada tanggal 27 Maret 1968, dibentuklah kabinet Pembangunan. Tugas awal dari kabinet pembangunan pertama ini dikenal sebagai Panca Krida yaitu: Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum, mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September, dan membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. Imbas Panca Krida ini, selain pembungkaman terhadap praktek gerakan, juga terjadi pendisiplinan keilmuan sosial di kalangan akademisi untuk membicarakan gerakan-gerakan sosial di Indonesia.<sup>147</sup>

Tugas kabinet pertama Orde Baru ini jelas dan terang sebagai cara untuk memadamkan gerakan-gerakan populis produk Orde Lama. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini tidak hanya dikenakan kepada kelompok-kelompok yang benar-benar terdaftar sebagai anggota PKI, tetapi juga kepada orang-orang yang dinilai tidak setuju dengan pemerintahan Orde Baru. Misalnya, kelompok-kelompok Soekarno yang tidak menjadi bagian dari PKI, mereka dipaksa untuk mengaku sebagai komunis, dan sebagian dari mereka inilah penghuni Pulau Buru sebagai tahanan.<sup>148</sup>

Untuk menjalankan pendisiplinan demi stabilitas nasional ini, Soeharto bekerja melalui satu kelompok yang sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1964 yaitu kelompok dari Sekber Golongan Karya. Organisasi ini berdiri pada 20 Oktober 1964 sebagai kelompok tandingan dari dominasi Partai Komunis

---

<sup>146</sup> Untuk lebih detail tentang peristiwa ini dapat dilihat didalam; John Rossa. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta. Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia. 2006.

<sup>147</sup> Vedi Hadiz dan Daniel Dakhidae (ed), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta, Equinox publishing, 2006. Halaman 1 – 30.

<sup>148</sup> Tanggal 12 Agustus – 25 Agustus 2007, saya pernah berkunjung ke Pulau Buru untuk sebuah kegiatan pelatihan kader gerakan mahasiswa. Disana kami mengunjungi beberapa keluarga tapol Pulau Buru yang memilih untuk tidak pulang pada tahun 1979 (saat kebijakan Soeharto untuk memulangkan tapol Pulau Buru). Menurut beberapa mantan tapol yang ada disana, didalam satu komplek, kebanyakan bukan PKI, tetapi PNI. Ada juga di satu komplek yang bukan orang parpol, tetapi mereka bersekolah di Yugoslavia dan Moscow, ketika pulang pada tahun 1969, aparat Soeharto menangkap mereka dan membawa ke Pulau Buru.

Indonesia yang terkenal sangat dekat dengan presiden Soekarno. Dia adalah gabungan dari 61 organisasi fungsional yang berlatar belakang beragam, tetapi kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi militer terutama Angkatan Darat. Pada peristiwa pembantaian terhadap PKI seperti yang diceritakan diatas, organ-organ yang tergabung di dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ini merupakan pasukan utama yang diandalkan oleh Soeharto –selain RPKAD pimpinan Sarwo Edhie Wibowo-.

Setelah Soeharto ditetapkan menjadi presiden, tujuh organisasi inti yang tergabung di Sekber Golkar<sup>149</sup> memutuskan untuk mengikuti pemilu pertama Orde Baru pada tahun 1971 dengan nama Golkar –tanpa ada embel kata partai-. Pada Pemilu ini mereka bertarung dengan 9 partai kontestan yang lain, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Islam (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).<sup>150</sup> Tanpa diduga, Golkar memperoleh 62 % suara, dan mendapat 236 kursi dari 360 kursi yang tersedia di MPR.

Mesin politik Orde Baru ini kemudian mendapat respon dari Soeharto, dia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri. Didalam peraturan tersebut terkandung kewajiban bagi Pegawai Negeri untuk menjadi anggota Golkar atau yang dikenal dengan prinsip *Monoloyalitas*. Tindakan penstabilan yang dilakukan Soeharto berlanjut pada tahun berikutnya dengan politik *Floating Mass* (Massa Mengambang) yaitu pelarangan bagi organisasi Partai Politik untuk memiliki cabang organisasi di tingkat desa. Dan sebagai persiapan untuk Pemilu 1977, rezim Orde Baru menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, yaitu penggabungan partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik. Partai-partai beraliran Islam digabung menjadi Partai Persatuan

---

<sup>149</sup> Organisasi yang dimaksud adalah: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan, Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan Pembangunan.

<sup>150</sup> [http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40) diakses pada tanggal 22 Mei 2012.

Pembangunan, parta nasionalis, dan agama selain Islam menjadi Partai Demokrasi Indonesi dan satu Golongan Karya yang menurut UU itu bukan partai politik.

Selain itu Peranan organisasi-organisasi massa petani pedesaan ditiadakan, diganti dengan organisasi ‘boneka’ ciptaan pemerintah, seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Selanjutnya, aneka ragam Koperasi yang dahulu diorganisir oleh berbagai partai politik dan organisasi massa *underbouw*-nya, dilarang oleh Inpres tahun 1978 dan 1984, dan semua kegiatan ekonomi berKoperasi disalurkan melalui wadah tunggal Koperasi Unit Desa (KUD).<sup>151</sup> Hak berserikat dikungkung sedemikian rupa dengan ditetapkannya UU No. 8 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur secara menyeluruh pembentukan keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan.<sup>152</sup>

Loekman Soetrisno menggambarkan bentuk kontrol pemerintah itu didalam bukunya *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Didalam buku itu Loekman Soetrisno menceritakan suatu desa di Yogyakarta yang bernama Selomartani:

Badan Administrasi desa sekali lagi tergantung pada camat; Mereka lebih bertanggung jawab kepada camat daripada kepada petani. Dilarangnya partai-partai politik untuk beroperasi di tingkat desa telah menghilangkan payung perlindungan yang bisa dipakai oleh pemerintah. Pelarangan tersebut juga menghilangkan hak-hak mereka untuk mengorganisir dan secara kolektif memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka dan memperkuat posisi tawar-menawar mereka dengan elit desa lokal. Menjawab tentang perubahan-perubahan ini, petani di Selomartani berkata bahwa mereka merasa kehilangan persatuan antara petani dan badan administrasi desa yang masih mereka rasakan 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu, kata mereka, lurah (kepala desa) dan pembantunya lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan menunjukkan rasa hormat. Tapi

---

<sup>151</sup> Frans Husken dan Benjamin White, “Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa”, dalam *Prisma*, No. 4, 1989.

<sup>152</sup> Mulyana W. Kusumah, “Realitas Suram Hak Berserikat”, dalam *Tanah Air*, Tahun. 1 No.2 Edisi Januari 1987

sekarang ini, kata mereka selanjutnya, perhatian lurah dan para pembantunya lebih dipusatkan pada pengumpulan uang pajak dan pengerahan petani-petani untuk mengikuti berbagai proyek pembangunan yang diturunkan pemerintah pusat.<sup>153</sup>

Kebijakan pengontrolan organisasi-organisasi rakyat itu, diikuti dengan suatu politik agraria yang membalik semua kebijakan agraria populis Soekarno. Pada akhirnya, tanah-tanah yang didistribusi pada pelaksanaan Land Reform pada tahun 1960-an diambil paksa oleh rezim Soeharto untuk kepentingan usaha-usaha perkebunan dan usaha-usaha besar lainnya. Undang-Undang Pokok Agraria, walaupun tidak dicabut tetapi dibentuk ulang wajahnya sebagai produk dari Partai Komunis Indonesia. Akibat yang paling jelas di pedesaan adalah, hilangnya keamanan memiliki dan menggarap tanah bagi kaum tani. Jika mereka melawan, alasan melakukan tindakan subversif telah disiapkan sebagai pasal untuk melakukan penangkapan.<sup>154</sup>

Pada masa Orde Baru muncul beberapa perlawanan dari massa rakyat. Salah satu yang paling berpengaruh adalah perlawanan yang terjadi di Kedung Ombo. Kasus ini bermula dari rencana pemerintah pada tahun 1985 untuk membangun waduk di Jawa Tengah. Pembangunan waduk ini bertujuan untuk pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah disekitarnya. Proyek ini adalah bagian dari kontrak-kontrak “politik” yang dibuat Soeharto dengan lembaga-lembaga donor internasional yang berkepentingan di Indonesia. pada penandatanganan perjanjian terakhir diawal tahun 1984 disepakati proyek ini akan didanai oleh Bank Dunia sebanyak \$ 156.000.000, Bank Exim Jepang \$ 25.200.000, dan dari APBN. Target penyelesaiannya dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.<sup>155</sup> Waduk

---

<sup>153</sup> Loekman Soetrisno. *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Yogyakarta. Kanisius. 1997. Dalam Noer Fauzi Rachman. *Op cit.* halaman 24.

<sup>154</sup> Sebagai contoh adalah kasus Tapos dan Cimacan. Lihat dalam Dianto Bachriadi dan Anton Lukacs. *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta. KPG. 2001; Dianto Bachriadi, “Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat”, dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Anu Lounella dan R. Yando Zakaria (Eds.), Yogyakarta: Insist Press bersama KARSA, 2002.

<sup>155</sup> Stanley. *Seputar Kedung Ombo*. Jakarta. Elsam. 1994.

mulai diairi pada 14 Januari 1989, menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan, dan sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini.

Perlawanan muncul dari orang-orang yang tidak mau pindah dari lokasi genangan waduk itu. Ketika sebagian besar warga sudah meninggalkan desanya, masih tersisa 600 keluarga yang masih bertahan karena ganti rugi yang mereka terima sangat kecil. Mendagri Soeparjo Rustam menyatakan ganti rugi Rp 3.000,-/m<sup>2</sup>, sementara warga dipaksa menerima Rp 250,-/m<sup>2</sup>. Warga yang bertahan inilah yang kemudian didampingi oleh aktivis-aktivis yang datang dari berbagai daerah di Jawa-terutama Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya-. Mereka pada akhirnya dipaksa untuk menerima pembangunan waduk ini, setelah mengalami teror, intimidasi dan kekerasan fisik akibat perlawanan mereka terhadap proyek tersebut.<sup>156</sup>

Kasus Kedung Ombo –dan kasus-kasus lain-<sup>157</sup> adalah pemicu lahirnya kembali aktivitas gerakan massa yang tidak setuju dengan Orde Baru. Gerakan yang muncul ini terutama dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa yang pada tahun 1980-an telah dikungkung dengan peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang ditetapkan melalui SK Menteri Pendidikan –Daed Joesoef- No.0156/U/1978. Gerakan yang muncul pada tahun 1980-an inilah yang meretas jalan bagi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang diakhiri dengan pengunduran diri Soeharto setelah 32 tahun menjadi Presiden di Indonesia.

Periode paska kejatuhan Soeharto ini dikenal sebagai masa reformasi. Jabatan Presiden digantikan oleh wakil presiden yaitu B.J Habibie. Pergantian kekuasaan ini berakibat besar bagi kembalinya gairah berorganisasi di tataran massa rakyat. Gerakan-gerakan yang muncul pada masa reformasi memiliki corak yang beragam, berbagai artikulasi muncul menyuarakan kepentingan mereka yang

---

<sup>156</sup> YLBHI. *Demokrasi Masih Terbenam; Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991*. YLBHI 1991; YLBHI, *Demokrasi di Balik Keranda; Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia 1992*. YLBHI 1992.

<sup>157</sup> Seperti kasus Marsinah, dia adalah buruh perempuan di Porong Sidoarjo yang dibunuh karena mengorganisir teman-temannya untuk peningkatan kesejahteraan. Kasus Marsinah pernah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama oleh sutradara Slamet Rahardjo.

dikungkung oleh rezim Soeharto sejak 32 tahun dia berkuasa.<sup>158</sup> Sementara itu, kalangan aktivis kampus yang sejak tahun 1990-an melakukan kerja-kerja pendampingan di desa-desa mulai membentuk organisasi-organisasi yang bertugas menyuarakan aspirasi massa rakyat ini ke tingkat yang lebih luas.

Momentum penting bagi gerakan petani juga terjadi pada masa reformasi ini yaitu dengan hidupnya kembali agenda pembaruan agraria di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru.<sup>159</sup> Bangkitnya gerakan petani pedesaan ini ditandai dengan gerakan-gerakan penggarapan kembali (*reclaiming*) petani atas tanah perkebunan/kehutanan yang dulu pernah di rampas pada zaman kolonial dan Orde Baru. Kegiatan *Reclaiming* ini kemudian disusul oleh suburnya pertumbuhan organisasi-organisasi massa petani di pedesaan yang mendorong untuk dilaksanakannya Reforma Agraria.

Selain tumbuhnya organisasi-organisasi massa rakyat dalam berbagai bentuk, reformasi juga melahirkan kebangkitan studi ilmu-ilmu sosial yang dilarang pada masa Orde Baru. Publikasi-publikasi tentang gerakan sosial pun mulai ramai didalam kepustakaan ilmu sosial di Indonesia. Tetapi, hampir semua studi tentang gerakan sosial dan gerakan petani yang muncul pada periode pasca reformasi, hanya terpusat pada peristiwa-peristiwa besar seperti yang telah diceritakan pada bagian pendahuluan. Akibatnya, pemahaman tentang gerakan sosial dan gerakan petani terfokus pada momentum-momentum dramatis yang kemudian mendominasi pemahaman tentang gerakan kepada aksi-aksi perlawanan besar yang dramatis saja.

---

<sup>158</sup> Misalnya gerakan Lingkungan, gerakan buruh, gerakan Masyarakat Adat, Gerakan Hak Azasi Manusia, Gerakan Pers, Gerakan Perempuan, dan berbagai macam lainnya.

<sup>159</sup> Agenda ini ditopang oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis agraria dan lingkungan. Aksi-aksi demonstrasi massa petani yang diorganisir oleh aktivis-aktivis agraria dan lingkungan ini kemudian memperlihatkan hasilnya pada tahun 2001 dengan disahkannya Tap MPR No. IX/2001 yang berisi tentang pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengaturan Sumber Daya Alam. Lihat dalam: Maria S.W. Soemarjono, "Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan", Makalah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28 Maret 2002.

## BAB IV

### Memaknai Gerakan Petani, Melalui Koperasi

Pembahasan ini akan saya mulai dari dua kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2012 di sebuah desa di Jawa Barat, dengan seorang yang telah menjadi petani sejak tahun 1970, usianya saat ini 62 tahun. Dan kedua pada tanggal 26 April 2012 dengan seorang Ibu di sebuah komplek perumahan, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah Restoran kecil di Bogor, umurnya 34 tahun. Saya bertanya kepada mereka tentang “apa yang mereka ketahui tentang Koperasi, dan apakah mereka anggota Koperasi”

I

“saya anggota Koperasi di KUD, Koperasi itu tempat membeli pupuk, alat-alat pertanian, dan tempat menjual hasil pertanian, sekarang, pupuk susah kalau dicari di Koperasi, kalau pun ada harganya mahal, nanti waktu panen, banyak potongan untuk membayar hutang. Baru-baru ini, Koperasi tempat jual pupuk itu sudah tidak ada, digantikan oleh tempat meminjam uang, kalau kepepet. Kalau mau bayar, ga bisa bayar dengan hasil panen, harus dijual dulu di pasar, baru dibayar pakai uang tunai ke Koperasi. Tapi saya merasa, meminjam uang di Koperasi itu kok susah sekali, harus pakai sertifikat, atau pakai surat keterangan dari desa, jika tidak ada itu, jangan harap dapat pinjaman dari Koperasi, nanti kalau dapat pinjaman, kita harus mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, jika melewati batas, ada dendanya....”<sup>160</sup>

II

“saya tidak pernah jadi anggota Koperasi, yang saya tahu dari pengalaman saya, Koperasi itu tempat meminjam uang kalau sedang ada kebutuhan mendesak, walaupun bukan anggota, semua orang yang memenuhi persyaratan peminjaman, boleh meminjam di Koperasi. Biasaya ada

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Pak MN, di desa Sindangasih, Kabupaten Tasikmalaya.

agunannya, seperti emas, atau sertifikat rumah, atau surat kendaraan bermotor. Saya sering berhutang di Koperasi di pasar Bogor, nanti bayarannya diangsur setiap bulan, kalau jatuh tempo, biasanya di denda dan masa hutangnya di perpanjang”<sup>161</sup>

Pemahaman dari dua hasil wawancara diatas, bukan bermaksud melakukan generalisir terhadap informasi tentang Koperasi, itu hanya contoh dari bagaimana orang desa dan orang kota memahami Koperasi pada zaman dari 1970-an hingga sekarang. Cara mereka memahami Koperasi seperti ini, adalah bentuk dari pengalaman mereka dengan Koperasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pemahaman seperti ini, juga memberikan satu penglihatan yang jelas, mengenai perbedaan dua contoh diatas dengan petani-petani di Ciwangun dalam memahami Koperasi (yang lahir dalam inisiatif mereka) seperti yang akan dijelaskan nanti.

Ada banyak defenisi Koperasi. Untuk Indonesia, menurut Moh. Hatta: Koperasi adalah: *Persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, dan dengan ongkos yang murah, pencapaian itu harus dilakukan bersama-sama, dan bukan dalam rangka mengumpul-ngumpulkan keuntungan orang perorang.*<sup>162</sup> menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah *bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi*<sup>163</sup> *sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*

Semangat ini pada dasarnya telah menjadi “cara kerja” dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak lama, misalnya *arisan* untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, *paketan*, *mitra cai* dan *ruing mungpulung* daerah Jawa Barat, tabungan tenaga untuk kerja pertanian, *Mapalus* di daerah Sulawesi Utara, kerja

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Ibu EN tanggal 26 April 2012 di Bogor.

<sup>162</sup> Moh. Hatta. *Kumpulan Karangan (Jilid 3)*. Jakarta. Penerbit Balai Buku Indonesia. 1954. Halaman 42.

<sup>163</sup> UU ini adalah peraturan terbaru di Indonesia yang mengatur tentang perKoperasian. Didalam UU ini dijelaskan bahwa prinsip Koperasi adalah: *Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan dengan demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, dan kemandirian.* Prinsip ini dinyatakan didalam Pasal 5 ayat 1 UU no. 25 tahun 1992.

sama pengairan yang terkenal dengan *Subak* untuk daerah Bali, dan *Julo-julo* untuk daerah Sumatra Barat, yang merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kesadaran kekeluargaan.

#### 4.1 Awal Tumbuh nya Koperasi di Indonesia.

Koperasi adalah jenis organisasi modern yang muncul pada awalnya di Eropa pada tahun 1820-an<sup>164</sup> yang bertujuan mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketimpangan yang muncul pasca revolusi Industri dalam bentuk tidak terakomodirnya kesejahteraan buruh-buruh pabrik di Eropa dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Begitupun di Indonesia, Koperasi muncul pada situasi dimana merosotnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat Indonesia akibat sistem eksploitasi kolonial yang diceritakan pada bab sebelumnya.

Untuk Indonesia, Koperasi memiliki cerita yang panjang, sebagian dokumen yang dikeluarkan DKI (Dewan Koperasi Nasional) menyatakan bahwa awal dari sejarah Koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1896, ketika R.Aria Wiriatmadja mendirikan sebuah lembaga simpan pinjam untuk priyayi rendah di Purwokerto yang bernama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*. Dia mengusahakan suatu tempat penyimpanan rutin uang pegawai-pegawai pribumi yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan kolonial dan mengelola uang simpanan itu untuk dipinjamkan sebagai pemenuhan kebutuhan mendadak dengan memakai imbalan pengembalian untuk dijadikan biaya operasional lembaga ini. Modal awal Koperasi ini diambil dari uang

---

<sup>164</sup>Awalnya Koperasi didirikan dengan gagasan Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Pada tahun 1786–1865 Gerakan Koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King dengan mendirikan toko Koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip Koperasi. Salah satu perintis awal Koperasi yang paling berpengaruh adalah Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart yang didirikan pada tahun 1844. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui Koperasi.

pribadinya dan kas Mesjid.<sup>165</sup> Pada perjalanannya, lembaga inilah yang mengawali berdirinya Bank Rakyat Indonesia.

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika dia cuti ke Eropa, dia mempelajari cara kerja *wolksbank-Raiffeisen* (Koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan *Schulze-Delitzsch* (Koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota, dan petani desa) di Jerman. Setelah dia kembali dari cuti, dia mengembangkan Koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Dalam hubungan ini kegiatan simpan pinjam yang dapat berkembang pada waktu itu adalah model Koperasi simpan-pinjam lumbung yang modalnya diambil dari zakat. Sementara, keanggotaannya terbatas pada kalangan pegawai-pegawai pemerintah kolonial yang berasal dari orang-orang pribumi Indonesia, dan petani-petani yang memiliki tanah garapan.<sup>166</sup>

Kelanjutan cerita Koperasi berikutnya, sangat erat berkaitan dengan munculnya “kebangkitan” organisasi-organisasi pribumi Indonesia yang dimotori oleh kaum intelektual baru pada tahun 1900-an.<sup>167</sup> Boedi Oetomo, dan Sarekat Dagang Islam, adalah dua nama yang muncul dalam memelopori ide Koperasi-Koperasi yang lebih luas dari cakupan yang dibuat oleh perintisnya di Purwokerto. Tahun 1908. Boedi Oetomo mendirikan sebuah Koperasi rumah tangga yang beranggotakan keluarga-keluarga priyayi jawa, sementara SDI yang kemudian berubah menjadi SI, mendirikan Koperasi-Koperasi yang mengkonsolidasikan pengusaha-pengusaha batik di Solo dan buruh-buruh pekerja kereta api di Semarang dan Surabaya yang pada tahun 1910-an meluas keanggotaannya dikalangan buruh-buruh perkebunan.

Tumbuhnya Koperasi diberbagai wilayah di Jawa<sup>168</sup> yang beriringan dengan munculnya organisasi-organisasi nasional, tentu menumbuhkan solidaritas

---

<sup>165</sup> Margono Djojohadikoesoemo, *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. 1940. Balai Poestaka, Batavia Centrum. Halaman 9.

<sup>166</sup> *Ibid.* halaman 15.

<sup>167</sup> Fase ini diceritakan dengan sangat apik oleh Pramoedya Ananta Toer didalam tetralogi-nya pada bagian *Anak Semua Bangsa*. Hasta Mitra.

<sup>168</sup> Salah satu yang juga sangat terkenal selain SDI, PI, dan Boedi Oetomo adalah: Koperasi yang didirikan oleh K.H Hasyim Asya'ari pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang mendirikan Koperasi yang dinamakan *Syirkatul Inan* yang beranggotakan 45 orang. Yang bertindak sebagai ketua sekaligus

baru yang dalam antar sesama orang yang terlibat didalam lembaga itu, inilah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah kolonial Belanda. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya solidaritas yang membahayakan kekuasaan kolonial tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Koperasi *Besluit* No 431 tanggal 7 April 1915<sup>169</sup>, yang berisi tentang peraturan yang mempersulit untuk mendirikan Koperasi.<sup>170</sup>

Penerbitan peraturan ini mendapat tantangan bukan hanya dari kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga dari kalangan intelektual Belanda yang bertugas di Indonesia. Perdebatan ini kemudian berujung pada dibentuknya panitia Koperasi pada tahun 1920 yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya Koperasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat pribumi. Dan sebagai hasil kerja dari komisi tersebut, antara lain lahirlah *Regeling Inlandsche Cooperative Vereeniging*, atau sering disebut dan lebih dikenal dengan sebutan: Peraturan Tentang Perkumpulan Koperasi Bumiputera Nomor 91 Tahun 1927, yang khusus berlaku bagi kaum bumiputera.<sup>171</sup>

Isi peraturan No. 91 tersebut antara lain : *Akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah, ongkos materai 3*

---

sebagai manager adalah K.H. Hasyim Asy 'ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji Manshur. Bendahara Syeikh Abdul WAhab Tambakberas. Lihat didalam *Risalah Sejarah Nahdhatul Ulama*. Pusat Dokumentasi Nahdhatul Ulama. Tahun 1976. Halaman 35.

<sup>169</sup> Drs. Hendroyogi, M.Sc, dalam *Azas-azas, Teori dan Praktek Koperasi*, Edisi Revisi 2002. Menurutnya sebelum ada Undang-undang perKoperasian tahun 1915, Koperasi di Indonesia diberikan status badan hukum sebagai *Zedelijk Lichaam* (*Staatsblad* 1870 nomor 64, sesuai bunyi Undang-Undang tahun 1855 yang berlaku di Negeri Belanda). Sebagai contoh ada tiga buah Koperasi pemilik/penanam kopi di Lembang, Lemburawi dan Poseli, yang didirikan dengan surat keputusan pemerintah tertanggal 31 Desember 1917 Nomor 58, yang diberikan *recht persoon* menurut *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tersebut.

<sup>170</sup> Diantara peraturan yang terdapat didalam keputusan itu adalah: 1. Mendirikan Koperasi harus disetujui diatas akta notaries 2 Koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal. 3.Harus membayar ongkos materai sebesar 50 golden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa.

<sup>171</sup> Disamping itu, pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan PerKoperasian dalam bentuk *Gouvernementsbesluit* no.21 yang termuat di dalam *Staatsblad* no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915. Peraturan PerKoperasian 1933 ini diperuntukkan khusus bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing.

*golden, hak tanah dapat menurut hukum adat, dan berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat.*

Berdasar undang-undang tersebut pemerintah segera membentuk *Cooperatie Dienst* (Jawatan Koperasi) pada tahun 1930 di bawah *Department van Binnenlandshe Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Kemudian pada tahun 1935 jawatan tersebut berada di bawah naungan *Department van Economische Zake* (Departemen Perekonomian), dan pada tahun 1939 digabung menjadi *Dienst voor Cooperative enr Binnenlandsche Handel* (Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri).

Prof. Dr. J.H Boeke (yang saat itu sebagai *Adviseur Voor Volkscredit*, yang pernah mengetuai Komisi Koperasi) di tunjuk sebagai ketua dari jawatan Koperasi pemerintah Belanda ini. Sejak itu masyarakat pribumi yang akan mendirikan Koperasi tidak perlu lagi ke notaris, tetapi cukup mendaftarkan pada pemerintah (Jawatan Koperasi) dengan biaya yang lebih murah yaitu hanya f3. Selain itu pemerintah Belanda saat itu juga membentuk Dana Jaminan (*Garantie Funds*) dengan modal awal dari pemerintah sebesar f120.000, -<sup>172</sup> untuk menjadi dana penjaminan bagi Koperasi yang meminjam uang atau kredit kepada Bank Rakyat. Sejak berlakunya peraturan ini, maka Koperasi mulai banyak tumbuh di Indonesia seperti yang dapat dilihat didalam tabel berikut<sup>173</sup>:

No	Tahun	Jumlah	
		Koperasi (unit)	Anggota (orang)
1	1927	1	<i>tidak ada data</i>
2	1928	22	<i>tidak ada data</i>
3	1930	39	7848
4	1935	299	29298
4	1938	540	40237
5	1939	574	52216

<sup>172</sup> Perbandingan jumlah f 50 pada waktu itu sama dengan 9 kwintal Beras. Lihat didalam Furnival, *Hindia Belanda, Studi ekonomi Majemuk*. Freedom Institute, Jakarta. 2008. Halaman 57.

<sup>173</sup> Diolah dari Djabaruddin Djohan, 1997, *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia*. dan Margono Djojohadikoesoemo, *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. 1940. Balai Poestaka, Batavia Centrum.

Pertumbuhan Koperasi pada masa-masa awal ini, ditopang oleh 2 tuas yang pada waktu itu terjadi dalam waktu yang bersamaan, tuas pertama adalah: kondisi krisis besar yang melanda ekonomi negara jajahan pada tahun 1929 - 1935 yang dikenal dengan masa *Great Depression*. Periode ini, seperti yang ditulis oleh Mr. A.C. Vreede di dalam majalah *Koloniale Studiën*<sup>174</sup> edisi Desember 1932. Artikel itu berjudul “*De Werkeloosheid in het Halfjaar 1932*” yang artinya “Pengangguran Setengah-Tahun Pertama 1932.” Krisis ekonomi besar itu menyebabkan banyak pekerja perkebunan diberhentikan, tidak terkecuali pekerja kulit putih. Pada bagian pertama tulisannya, Vreede memaparkan menurunnya harga sejumlah komoditas ekspor yang diandalkan Hindia-Belanda sebab permintaan berkurang dari luar negeri.

Tuas kedua, adalah meningkatnya aktivitas politik pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah di Belanda dan yang sekolah di Indonesia pada tahun 1920-an. *Pertama*, kelompok pelajar Indonesia di Belanda yang menamakan dirinya dengan *Indische Vereening* yang kemudian berganti nama menjadi *Indonesische Vereening*. Strategi non –kooperatif (tidak mau bekerja sama dengan Kolonial) yang diterapkan anggota *Indonesische Vereening* ditegaskan didalam kampanye-kampanye mereka didalam majalah *Hindia Poetra* yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Penerbitan *Hindia Poetra* ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam 2 edisi pertama, Hatta menyumbangkan suatu tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani, dan pada edisi selanjutnya, Hatta menuangkan gagasannya tentang solusi bagi jalan keluar kemelaratan ekonomi rakyat, yaitu Koperasi.

Kampanye anti kolonial, berlanjut pada saat *Indonesische Vereening* menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan berubahnya nama majalah *Hindia Poetra* menjadi majalah *Indonesia Merdeka*. Majalah dengan wajah baru ini lebih menggambarkan sikap anak-anak muda terdidik ini dalam kampanye anti kolonial dan perumusan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang menuntut

---

<sup>174</sup> Koleksi dokumen KITLV, diakses tanggal 28 April 2012.

diciptakannya suatu kemandirian yang teguh didalam segala sendi kehidupan, terutama sendi ekonomi. Didalam masa ini, Sutan Syahrir, mantan aktivis pelajar di Bandung, mulai ikut bergabung dengan PI.

Pada tahun 1926, terjadi pemberontakan oleh kalangan komunis di Jawa (Banten)<sup>175</sup>, dan Sumatra (Silungkang, Minangkabau).<sup>176</sup> PI di tuduh sebagai dalang pemberontakan itu, organisasi ini dilarang oleh Pemerintah kolonial, dan beberapa aktivis PI ditangkap,<sup>177</sup> sementara yang lainnya seperti Iwa K Sumantri atau yang dikenal sebagai S Dingley, bergabung dengan kekuatan kelompok Komunis dibawah komando Moskow.<sup>178</sup> Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik pemukulan gerakan rakyat yang baru tumbuh lewat radikalisisasi yang dilakukan oleh ISDV dan SI.

*Kedua*, kelompok *Algemene Studie Club* di Bandung tahun 1926, yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Kelompok ini adalah pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah di *De Technische Hoogeschool te Bandung* yang pada tahun 1959 menjadi Institute Teknologi Bandung. Mereka kemudian berhubungan dengan sisa-sisa aktivis PI yang kembali ke Indonesia pasca penangkapan besar-besaran pada tahun itu. Atas kesepakatan bersama mereka mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 orang, yaitu dr. Cipto Mangunkusumo,

<sup>175</sup> Michael C. Williams, *Sickle and Crescent: The Communist Revolt 1926 in Banten*. Equinox Publishing 2009. Telah diterjemahkan oleh Prof Sartono Kartodihardjo, *Bulan Sabit dan Palu Arit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Syarikat. 2003.

<sup>176</sup> Lebih detail tentang peristiwa Silungkang, dapat dilihat dalam Mestika Zed. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927*. Syarikat. Yogyakarta. 2004.

<sup>177</sup> Pada September 1927 Hatta, Abdul Madjid, Nazir Pamuntjak ditangkap di Den Haag dan dibawa ke penjara *Casiusstraat*. Mereka dituduh menjadi anggota perkumpulan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menentang kerajaan Belanda. Salah satu yang dijadikan barang bukti adalah hubungan dengan Semaun, tokoh yang dianggap bertanggungjawab dalam pemberontakan komunis tahun 1926. Bantuan uang dari Semaun kemudian dijadikan persoalan dalam pengadilan, Perhimpunan Indonesia dituding menerima bantuan uang dari Moskwa. Demikian pula konvensi yang dibuat Hatta dengan Semaun pada akhir Desember 1926, dikatakan bahwa PI mengadakan kerjasama dengan komunis untuk melawan pemerintah kolonial. Dalam sidang pengadilan Den Haag, 1928, Hatta mengatakan, PI menjalankan daya upaya dalam menguatkan *eenheidgedachte* bagi seluruh Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia itu sudah dimulai oleh para mahasiswa di negeri seberang laut tersebut. Lihat didalam Majalah Tempo, Edisi Khusus 80 Tahun Sumpah Pemuda, 27 Oktober 2008

<sup>178</sup> Iwa K Sumantri kemudian menjadi salah satu yang diminta oleh *Red Peasant International* -sebuah organisasi petani internasional yang berada di bawah kordinasi Komunis International- sebagai penulis tentang kondisi gerakan petani di Indonesia yang kemudian berwujud buku *Peasant Movement in Indonesia*.

Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia memutuskan merubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia, dan mereka aktif melanjutkan apa yang telah dirintis oleh gerakan PI di Belanda. Hanya setahun berselang, pemerintah kolonial Belanda mencium gelagat dari gerakan PNI dan tanggal 29 Desember 1929, sebagian tokoh PNI ditangkap dan diadili setahun setelahnya pada 18 Agustus 1930.

Didalam pengadilan itulah, Soekarno membacakan gugatannya yang berjudul *Indonesia Menggugat*, yang disusul kemudian dibuangnya Soekarno pada tahun 1933 ke Ende Flores hingga tahun 1942. Setelah itu PNI kemudian dipimpin oleh Mr. Sartono yang kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 April 1931. Di Belanda, mendengar kabar pembubaran PNI, Moh Hatta akhirnya membentuk PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) baru, dan bergerak dibawah tanah dengan menyerahkan pimpinan organisasi kepada Sutan Syahrir.

Sutan Syahrir, seorang alumni fakultas hukum di Universitas Amsterdam, anggota aktif PI yang melanglang buana dengan menjadi pembelajar sosialisme di Federasi Buruh Transportasi International, langsung menggerakkan PNI baru bersama Hatta yang telah pulang dari Belanda pada tahun 1932. Mereka mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal dibandingkan dengan Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lambat namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya, salah satu dari dokumen pendidikan gerakan PNI baru ini adalah materi tentang perkoperasian.<sup>179</sup>

Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang

---

<sup>179</sup> *Materi-materi pendidikan perKoperasian, dokumen pengajaran pendidikan tani*. Pusat pendidikan Gerakan Tani Indonesia. Bandung, 1957, tidak diterbitkan. Halaman iv.

Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven-Digoel. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Bandaneira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun hingga tahun 1942, saat tentara Jepang sampai di Indonesia, dan memaksa Belanda untuk menyerahkan kekuasaan daerah jajahannya kepada Jepang.

Pilihan perjuangan PNI baru yang tidak memakai strategi propaganda dan agitasi model PNI Soekarno, dipertimbangkan oleh Syahrir dan Hatta sebagai cara agar dapat menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan dikalangan massa rakyat yang lebih luas, terutama di pedesaan. Hasil dari usaha ini terbukti saat dibuangnya pemimpin-pemimpin pergerakan pada dekade itu, yakni dengan tumbuhnya Koperasi-Koperasi rakyat di desa-desa tanpa dapat dibendung oleh pemerintah kolonial karena sesuai dengan Undang-Undang yang mereka buat sendiri.

#### 4.2 Koperasi, tahun 1930-an hingga 1950.

Bangkitnya pergerakan “elit terpelajar” Indonesia ini beriringan dengan satu cerita yang telah dibahas pada bagian kedua yaitu tentang mobilisasi dan radikalisasi yang dilakukan oleh aktivis ISDV yang bergabung dengan SI dan menjadi Partai Komunis Indonesia. Terlepas dari dinamika internal politik antar aktivis yang terjadi pada waktu itu antara kelompok-kelompok yang muncul, mereka dihadapkan pada satu tantangan besar, yaitu kemerosotan kualitas hidup sebagian rakyat Indonesia akibat sistem eksploitasi kolonial yang kemudian ditambah dengan imbas dari depresi besar pada tataran ekonomi global. Tetapi sayangnya, ide-ide ekonomi yang tertuang pada naskah-naskah propaganda gerakan tersebut, tidak dapat mereka laksanakan langsung karena pemukulan besar gerakan pasca pemberontakan 1926, dan penangkapan besar-besaran para pemimpin pergerakan ini pada tahun 1933.

Pada sisi yang lain, Koperasi yang pada awal dirintis berupa kelompok simpan pinjam, dan pengadaan barang konsumsi, yang disertai dengan dibuatnya jawatan Koperasi oleh pemerintah Belanda dibawah pimpinan Boeke pada tahun 1927, telah mulai pelan-pelan bertransformasi menjadi “tidak hanya sekedar menjalankan aktivitas ekonomi diskala terbatas”. Transformasi baru itu adalah

semangat kebangsaan yang dipompa dari kampanye serta propaganda organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ditambah dengan keresahan karena kondisi himpitan ekonomi yang semakin sulit. Pertumbuhan Koperasi menjadi sangat pesat pada masa-masa ini, yang kemudian pada tahun 1939, jumlahnya telah mencapai 574 unit yang diakui oleh pemerintah kolonial, dan 1540 Koperasi yang dianggap “liar”.<sup>180</sup>

Dari literature tentang gerakan tani yang diperiksa pada rentang tahun-tahun penangkapan besar-besaran ini, hampir tidak ada narasi yang menggambarkan apa yang terjadi dengan gerakan petani dan rakyat pedesaan. Tetapi jika dihubungkan dengan munculnya Koperasi-Koperasi rakyat di berbagai tempat, ini sebuah pertanda, bahwa, “narasi” gerakan petani, pada dekade ini, telah diisi oleh Koperasi, yang disatu sisi, dia legal untuk berjalan melalui peraturan kolonial, dan dianggap tidak membahayakan kekuasaan, sementara disisi lain, pendidikan-pendidikan politik, tetap bisa berjalan didalam bungkus aktivitas Koperasi.

Tahun 1942, saat dimana Koperasi-Koperasi rakyat di berbagai tempat sedang tumbuh dan mengembangkan pendidikan-pendidikan perkaderan bawah tanah, berkobarlah perang pasific. Peristiwa ini adalah bagian dari perang dunia kedua yang terjadi di hampir sebagian besar negara-negara di dunia.<sup>181</sup> Peristiwa ini berakibat besar bagi cerita tentang Koperasi di Indonesia. Jepang, sebagai salah satu negara yang terlibat pada perang itu, muncul sebagai satu kekuatan baru mewakili Asia, afiliasi fasisme nya dengan negara-negara pendukung nazisme di

---

<sup>180</sup> Entang Sastra, *Pembangunan Koperasi, Teori dan Kenyataan*. Penerbit Alumni. Bandung. 1985. Halaman 34.

<sup>181</sup> Perang ini merupakan konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Belanda) dan Poros (Jerman, Italia, Jepang). Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personel. Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia

Jerman dan fasisme di Italia, telah berhasil mengekspansi wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan sebagian Eropa, termasuk Indonesia.<sup>182</sup>

Pada masa pendudukan Jepang ini, koperasi didisiplinkan didalam suatu wadah yang dibentuk berdasar pada peraturan militer Jepang melalui undang-undang No.23 tahun 1942. Peraturan baru ini menggantikan peraturan lama yang dibuat pada masa kolonial di tahun 1933. Didalamnya diatur tentang pendisiplinan organisasi koperasi yang ada diseluruh Indonesia dibawah pengaturan dan pengawasan badan yang bernama Kantor Pusat Jawatan Koperasi dan Perdagangan pemerintah Jepang atau *Syomin Kumiai Tyuo Zimusyuo*, sedangkan kantor daerah menjadi *Syomin Kumiai Sodandyo*. Sesudah itu dibentuk *Djawa Jumin Keizai Sintaisei Konsetsu Jumbi Inkai* (Panitia Susunan Perekonomian baru di Jawa).

Pendisiplinan ini, berkaitan dengan maksud Jepang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai penyedia kebutuhan perang Jepang. Dalam masa ini mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi “perang” Jepang. Penanaman bahan makanan digiatkan dengan mewajibkan rakyat menggunakan pengetahuan dan teknik pertanian yang baru, perluasan areal pertanian, dan penanaman komoditi baru, seperti kapas, yute-rosela dan rami.<sup>183</sup>

Salah satu usaha Jepang dalam menyediakan kebutuhan perang ini<sup>184</sup>, koperasi-koperasi rakyat yang telah dikonsolidasikan didalam *Kumiai* tadi,

---

<sup>182</sup> Untuk lebih jelas tentang perang dunia kedua dapat dilihat didalam P.K Ojong, *Perang Eropa* Jilid II. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004. Dan mengenai pendaratan pasukan Jepang di Indonesia, lihat M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 501

<sup>183</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, halaman 3-52.

<sup>184</sup> Di samping itu, rakyat harus menyerahkan 20% hasil tanaman padinya kepada pemerintahan Jepang untuk bekal perang. Tidak hanya itu, rakyat juga dituntut untuk membantu Jepang sebagai *romusha*, tenaga kerja paksa tanpa bayaran. Untuk menambah hasil bumi, tanah pertanian rakyat diperluas dengan membuka hutan dan membongkar *onderneming* eks-milik perusahaan-perusahaan kapitalis dari Belanda dan maupun negara Eropa lainnya. Tanah-tanah partikelir, oleh pemerintah pendudukan Jepang, dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan membentuk Kantor Urusan Tanah Partikelir. Rakyat dipaksa menanam tanaman yang ditentukan pemerintahan fasis Jepang, seperti ubi, singkong, padi, jarak dan lain-lain. Selain digiatpaksakan dalam segi prosesnya, dari segi hasil rakyat harus “menyerahkan bakti” berupa hasil bumi, di samping juga tenaganya.

digunakan sebagai alat bagi pengumpulan hasil panen petani, dan sumbangan-sumbangan dari pedagang-pedagang yang tergabung didalam koperasi di kota. Akibatnya, pada masa ini koperasi-koperasi rakyat banyak yang hancur. Berikut adalah wawancara yang dilakukan pada salah seorang anggota Koperasi pedagang tembakau Tasikmalaya pada tahun 1942 itu:

“... kami kesulitan untuk makan, semua hasil perdagangan harus disetorkan ke *kumiai*, kalau tidak mau setor mereka bisa bakar gedung penyimpanan tembakau kita, atau kalau setorannya sedikit, nanti *kate-kate* itu akan datang kesini ramai-ramai, dan mengambil semua yang dibutuhkan di toko-toko milik anggota Koperasi, kalau melawan, langsung ditembak..... Kebanyakan dari kami disini kan orang Tionghoa, biasanya kami paling banyak setor ke *Kumiai*, karena mereka bilang, orang Cina pintar cari uang, kalau orang sunda pintar kerja buat jalan kereta. Banyak anggota Koperasi kami yang dulu tergabung di Koperasi, sejak itu pergi, mereka tutup toko, dan pergi mengungsi ke hutan, kalau tidak, disuruh berangkat menjadi romusha ke malaka, zaman itu betul-betul sulit buat kami, banyak Koperasi mundur gara-gara *kumiai*.”<sup>185</sup>

Tidak hanya koperasi yang mengalami kondisi ini. Semua kelompok-kelompok gerakan rakyat di Indonesia pada masa ini hampir tidak dapat bergerak, pengawasan ketat di bawah polisi *Kempetai* Jepang yang terkenal kejam itu, telah membuat suatu iklim yang sepi di gerakan petani, gerakan buruh dan gerakan sosial lainnya. Walaupun, gerakan sosial di bawah tanah (seperti Syahrir, Tan Malaka, dan kelompok komunis) tetap berlangsung dan terjadi pemberontakan kecil di Tasikmalaya (Singaparna) dan Indramayu, tetapi sistem penjajahan jepang yang menerapkan mobilisasi dan kontrol untuk kepentingan perang nya itu, telah berhasil mengungkung semangat pergerakan yang sempat muncul pada awal tahun 1920-an.

---

Maksud dari semua proses pemaksaan ini adalah untuk persediaan dan perbekalan perang Asia Timur Raya. Aiko Kurosawa. *Ibid*.

<sup>185</sup> Wawancara dengan Engkong HR, umur 84 tahun. Tanggal 27 April 2012 di Bandung.

Kondisi masyarakat yang hancur lebur pada zaman Jepang ini, disatu sisi mendatangkan manfaat dari segi pendidikan keadministrasian dan kemiliteran bagi sebagian kalangan rakyat Indonesia. Pembentukan instansi-instansi baru yang berada dibawah pengawasan sistem pemerintahan Jepang, membutuhkan pegawai-pegawai yang ditugaskan sebagai pekerja bagi proses mobilisasi kebutuhan perang Jepang ini. *Kumiai* sendiri, mengambil pegawai-pegawai pencatatan mereka dari pengurus-pengurus Koperasi yang ada, sehingga pada saat itu, pengetahuan tentang administrasi ala Jepang yang mengedepankan disiplin mulai masuk dikenal oleh pengurus-pengurus koperasi ini, yang pada saatnya nanti, menjadi pioneer penggiat Koperasi ketika Indonesia merdeka.

Dikalangan aktivis pergerakan yang dulu memulai mencetuskan ide koperasi, setelah mereka dipulangkan dari pembuangan pada tahun 1942 - terutama Soekarno, Hatta, dan Syahrir- ditawari oleh pemerintah jajahan Jepang untuk bekerja sama dengan maksud, menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia yang dapat melindungi negara-negara Asia lainnya. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan pendidikan kader, dan salah satu simpul perkaderan yang dirintis oleh Syahrir ini, adalah kader-kader koperasi yang pada waktu itu didisiplinkan didalam *Kumiai*.

Ketika Jepang kalah pada perang pacific, pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dihadapkan pada pilihan, antara segera mendeklarasikan kemerdekaan, atau ikut dalam situasi perang pacific yang berarti Indonesia sebagai negara jajahan bagi si “pemenang perang” yaitu sekutu. Setelah melewati tahap persiapan sejak Bulan April 1945, dan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dengan

menyisakan soal-soal internal perbedaan pandangan politik antar sesama pemimpin pergerakan waktu itu.<sup>186</sup>

Pasca deklarasi kemerdekaan, BPUPKI yang telah berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mereka mulai merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang masih berupa pembukaan, yang kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian disusul dengan mempersiapkan naskah Undang-Undanganya, didalam UUD tahun 1945 inilah, koperasi dijadikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Menurut Hatta didalam suatu tulisan tentang otobiografi nya:

“Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia untuk melawan model ekonomi kolonial yang menindas, dengan ekonomi koperasi, rakyat akan mandiri, dan pembangunan Indonesia akan berlangsung terus menerus dibawah kendali rakyat”.<sup>187</sup>

Momentum terbesar koperasi di Indonesia pada periode pasca kemerdekaan ini terjadi pada tanggal 11-14 Juli 1947, orang-orang yang menghendaki tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi dengan dasar-dasar yang murni dan berangkat dari kondisi keindonesiaan, kemudian menyelenggarakan Kongres koperasi Indonesia I di Tasikmalaya. Kongres itu

---

<sup>186</sup> Soal-soal internal itu antara lain, terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 yaitu tidak setujunya pihak Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka terhadap pemerintahan Indonesia yang dipimpin Syahrir menetapkan strategi kerjasama lewat perundingan dengan Belanda yang mencoba kembali masuk ke Indonesia melalui tentara sekutu. Peristiwa ini berawal dari penculikan Perdana Menteri Syahrir pada 27 Maret 1946 dan berujung dengan tuntutan mereka pada Soekarno untuk membubarkan kabinet Syahrir. Kelompok ini adalah kelompok pemimpin-pemimpin yang langsung terjun mengorganisir massa rakyat seperti Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sudiro, Chaerul Saleh, Muh Yamin, dan Sukarni. Mereka kemudian di tangkap oleh Soekarno dan dipenjarakan hingga tanggal 17 Agustus 1948. Lihat Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. Halaman 261. Dan Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946*. Azza Grafika. Yogyakarta. 2009.

<sup>187</sup> Mohammad Hatta, *Untuk Negeri ku*. Kompas. Jakarta. 2011. Jilid ketiga, halaman 58.

dihadiri oleh lebih kurang 500 orang yang mewakili utusan-utusan koperasi dari 51 kabupaten di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.<sup>188</sup>

Kongres koperasi pertama ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, diantaranya Panglima Divisi Siliwangi; Kol A.H Nasoetion, Perdana Menteri Syahrir, Moh. Hatta, dan beberapa tokoh gerakan petani diantaranya Moh. Tauchid sebagai perwakilan dari Barisan Tani Indonesia yang telah berdiri 2 Bulan setelah Indonesia Merdeka.<sup>189</sup> Kongres yang diselenggarakan di Gedung Pabrik Tenun Perintis, milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Ciamis 40 Tasikmalaya tersebut telah berhasil menyepakati beberapa keputusan penting antara lain:

- Membentuk Sentral Organisasi Koperasi Indonesia (SOKRI); organisasi ini kelak berkembang menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) seperti sekarang ini.
- Menetapkan asas gotong royong bagi Koperasi Indonesia.
- Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI.
- Menetapkan susunan pengurus SOKRI secara presidium dan menetapkan Niti Sumantri, sebagai Ketua dan AD Dunga sebagai Sekretaris Jenderal SOKRI.
- Menyepakati bahwa kemakmuran rakyat harus dilaksanakan sesuai pasal 33 UUD 1945, dengan koperasi sebagai alat pelaksanaannya.
- Menyepakati pembentukan Bank Koperasi Sentra.
- Menyepakati ditetapkannya konsepsi Koperasi rakyat desa yang mencakup tiga bidang usaha yaitu kredit, konsumsi, produksi dengan catatan bahwa koperasi rakyat desa menjadi dasar susunan SOKRI.
- Meningkatkan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat.

---

<sup>188</sup> Di Ciwangun –walaupun belum didirikan Koperasi-, pada saat diadakannya kongres Koperasi, eks buruh perkebunan peninggalan Jerman itu telah dimobilisasi oleh penggerak-penggerak dari Barisan Tani Indonesia-awal. Mereka telah bekerja melakukan pendidikan-pendidikan Koperasi sejak zaman penjajahan Jepang dengan melakukannya dalam gerakan bawah tanah bersama dengan kader-kader PNI-pendidikan Syahrir-Hatta. Pada saat itu, 30 orang dari Ciwangun, berangkat ke Tasikmalaya, untuk membantu panitia persiapan kongres, dan ikut mendengarkan pidato dari Perdana Menteri Syahrir di lapangan Dadaha Tasikmalaya.

<sup>189</sup> Museum Koperasi di Tasikmalaya, *Dokumen Sejarah Koperasi Indonesia*, Arsip No.002. Tahun 1950. Dan hasil wawancara dengan pengelola Museum Koperasi tanggal 27 April 2012.

- Distribusi barang-barang yang penting bagi rakyat di laksanakan oleh koperasi.
- Memutuskan tanggal 12 juli sebagai Hari Koperasi Indonesia dan diperingati setiap tahun.<sup>190</sup>

Kongres ini, juga berhasil melakukan identifikasi yang dilakukan oleh tim kerja Persiapan Kongres Koperasi Indonesia. Tim ini akan langsung bertanggung jawab kepada pimpinan pusat SOKRI sebagai institusi pergerakan koperasi tingkat nasional, dan didalam dokumen pembukaan pidato panitia persiapan kongres koperasi, dinyatakan bahwa saat itu telah berdiri 2500 Koperasi yang tersebar di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Borneo. Data inilah yang kemudian dipakai sebagai calon perekrutan anggota SOKRI lebih lanjut.

Tujuh hari setelah kongres koperasi di Tasikmalaya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan operasi militer mereka di sejumlah wilayah di Indonesia. Fokus serangan tentara Belanda pada agresi militer ini berada di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau dan pertambangan minyak di Sumatera Selatan, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu *Korps Speciale Troepen* (KST) di bawah Westerling yang waktu itu berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (*Le para compagnie*) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST yang sejak kembali dari pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.<sup>191</sup>

Agresi Militer Belanda tahun 1947 ini mendapat tanggapan dari dunia International, atas tekanan dari PBB, bertepatan dengan peringatan 2 tahun

---

<sup>190</sup> *Ibid*, Arsip No. 015 tahun 1950.

<sup>191</sup> Pierre heijboer, *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945 – 1949*. Grasindo, Jakarta. 1998. Halaman 21.

Proklamasi Indonesia, pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Tindakan ini kemudian disusul dengan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Agustus 1947. Komite ini hanyalah sebagai *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia) atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Perwakilan anggota KTN ini didasarkan pada usulan negara yang bertikai (Indonesia dan Belanda) serta satu negara netral. Komisi ini beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Kondisi Koperasi rakyat pada masa-masa ini sangat sulit, SOKRI hampir tidak dapat menjalankan agenda-agenda kerja mereka, kecuali menyediakan makanan untuk tentara rakyat yang berjuang di wilayah-wilayah pedesaan dan membuat dapur umum untuk pengungsi dari wilayah yang terkena agresi militer Belanda. Mereka mengumpulkan hasil panen yang sangat sedikit jumlahnya dari anggota-anggota Koperasi yang tergabung didalam setiap unit, dan memobilisasi anggota untuk menjadi relawan-relawan sebagai penggiat dapur umum itu.<sup>192</sup>

Penderitaan rakyat Indonesia berlanjut kemudian saat dilancarkannya Agresi Militer kedua pada 19 Desember 1948. Mengabaikan resolusi yang diambil dengan faslilitasi KTN, Belanda memborbardir wilayah-wilayah strategis di Yogyakarta yang pada waktu itu berstatus Ibu kota Indonesia. Soekarno, Hatta Syahrir dan beberapa pemimpin nasional kemudian di tangkap. Pemerintahan Indonesia dikendalikan dari Bukit Tinggi oleh Syafrudin Prawiranegara dengan memakai nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan darurat itu didukung oleh pemerintahan persiapan di New Delhi oleh Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi, jika kondisi tidak memungkinkan berjalannya pemerintahan darurat di Bukit Tinggi.

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Ibu DT (kordinator Dapur Umum Koperasi Petani Tasikmalaya 1947), tanggal 27 April 2012, di Tasikmalaya.

Dikalangan massa rakyat yang tergabung didalam laskar-laskar, mereka telah digerakkan untuk bergerilya oleh panglima Tentara Rakyat, Jendral Soedirman, di wilayah-wilayah pedesaan dan hutan-hutan sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain Soedirman, Kolonel A.H Nasoetion, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat *Totaliter* yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1. Salah satu pokok isinya adalah: *Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah berwingate (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.* Salah satu pasukan yang harus melakukan *wingate* adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama *Long March Siliwangi*.<sup>193</sup>

Pasukan *wingate* Siliwangi inilah yang kemudian pada awal tahun 1949, sampai di perkebunan Ciwangun, mereka beristirahat di perkebunan ini sekitar 3 hari, mengatur pasukan, menambah logistik untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung, dan menyiapkan laskar rakyat di Ciwangun menghadapi kemungkinan serangan selanjutnya dari militer Belanda.<sup>194</sup> Ikatan masyarakat Ciwangun dengan divisi Siliwangi ini pula yang menjadi salah satu faktor bertahannya Koperasi Ciwangun ketika melewati polemik politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1965-1966 seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

#### 4.3. Koperasi Pada Masa Transisi (1950 – 1960)

Pasca Konferensi Meja Bundar, dengan segala permasalahan ekonomi politik Indonesia yang ditimbulkannya, pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno segera menfokuskan arah kerja mereka pada pembenahan ekonomi rakyat. Pada masa ini walaupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengganti UUD 1945 menjadi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, tetapi itu tidak

---

<sup>193</sup> A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Gerilya*. Gunung Agung. Jakarta 1983. Halaman 125-130.

<sup>194</sup> Wawancara dengan Pak JJ, tanggal 14 Maret 2012 di Ciwangun.

mementahkan komitmen arah kerja pemerintah terhadap jiwa dari pasal 33 UUD 1945. Komitmen tersebut tetap tertuang kembali dalam pasal 38 UUDS 1950.

Perjalanan Koperasi pada tahun-tahun ini, adalah kelanjutan pendidikan-pendidikan yang dilakukan pada tahun sebelum 1945. Misalnya Syahrir, yang membentuk Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948, memasukkan pendidikan gerakan Koperasi sebagai salah satu bagian dari materi pendidikan kader sosialis, yang dia ajarkan disetiap pendidikan-pendidikan PSI. Begitupun M. Hatta, mendorong agar materi tentang gerakan Koperasi dijadikan sebagai materi pokok di dalam pengajaran sekolah-sekolah dan mendorong agar semua pandangan politik partai agar menjadikan Koperasi sebagai program kerja pemulihan ekonomi rakyat.

Pada bulan Oktober 1951, Jawatan Koperasi memulai langkah pentingnya dengan menyelenggarakan kursus teknis perkoperasian selama sebulan bagi para pegawainya. Pada tahun 1952 diadakan kegiatan serupa selama satu tahun dan bahkan dilanjutkan lagi berturut-turut selama empat tahun. Oleh karenanya pada masa tersebut kegiatan penerangan dan penyuluhan Koperasi mulai digalakkan.

Begitupun pada masa kabinet Natsir (1951), kader PSI, Prof Soemitro yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri Perdagangan dan Perindustrian, melansir gagasan “Rencana Urgensi Perkembangan Industri 1951 – 1952”, yang kemudian dikenal sebagai “Soemitro Plan”. Gagasan ini diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan industri kecil yang didalam dokumen rencana itu disebut sebagai “ekonomi rakyat dan Koperasi” serta “industri kecil dan menengah”.<sup>195</sup> Rencana Soemitro ini kandas di tengah jalan, seiring dengan jatuhnya kabinet Natsir yang hanya berumur 6 bulan.

Usaha Hatta, terlihat dari dorongannya kepada kabinet Wilopo<sup>196</sup> yang kemudian tertuang didalam point-point rencana ekonomi strategis nya. Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat, Kabinet Wilopo mengajukan “program Koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: *Usaha untuk menciptakan*

---

<sup>195</sup> Soemitro Djojohadikoesoemo. *Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta. Peberbit Pembangunan. 1957. Halaman 23. Lihat juga didalam Yahya A. Muhaimin. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 – 1980*. Jakarta. LP3ES. 1990.

<sup>196</sup> Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952, 2 bulan setelah itu, Wilopo menyatakan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri.

*suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan Koperasi; Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan Koperasi; Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar Koperasi.*<sup>197</sup>

Pada tanggal 12 Juli 1952<sup>198</sup>, didalam pidatonya, Hatta menyarankan kepada pengurus SOKRI ditingkat nasional agar mengumpulkan kembali gerakan Koperasi yang telah menyebar luas di pelosok-pelosok Indonesia. Usulan itulah yang menjadi dorongan bagi pengurus SOKRI untuk melaksanakan kongres Koperasi ke II pada tanggal -17 Juli 1953 di Bandung. Didalam kongres tersebut, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dirubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI), dan segera diminta untuk membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Disamping itu, kongres yang dihadiri oleh 970 orang utusan dari berbagai daerah ini, juga mendesak agar pemerintah segera membuat peraturan baru tentang Koperasi dan mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Program penguatan gerakan Koperasi kembali muncul lagi pada kabinet Ali Sostroamidodjo (1955 – 1960), seperti yang dia sampaikan pada pidato pelantikannya sebagai Perdana Menteri:

”Untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan Koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha menggerakkan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu Pemerintah hendak menyokong

---

<sup>197</sup> Lihat lebih lanjut didalam Anonym. *Pokok-Pokok Pikiran Ekonomi Wilopo*. 1962. Arsip DKI. Didalam bagian pertama tulisan ini, dimuat kutipan perdebatan Wilopo dengan Widjojo Nitisastro tentang usaha untuk dilakukannya penghapusan Pasal 38 UUDS (yang identik dengan pasal 33 UUD 1945), perdebatan itu terjadi tanggal 23 September 1955. Menurut Wilopo-yang pada posisi membela pasal 38 UUDS-, “*pasal itu adalah ujung tombak dari Sistem Ekonomi Indonesia (Pancasila), karena didalam pasal itu terang sekali penolakannya terhadap sistem ekonomi liberal kapitalistik yang mementingkan swasta daripada kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin kalau kita hilangkan pasal itu*”.

<sup>198</sup> Koperasi Ciwangun, lahir pada masa-masa ini, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1952.

usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan, yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan perkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa, yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk Koperasi”<sup>199</sup>

Situasi perpolitikan nasional yang mengedepankan sistem politik kepartaian, ikut menunjang berdirinya banyak Koperasi-Koperasi dengan berbagai jenis, misalnya; hampir semua partai kontestan Pemilihan Umum 1955, memasukkan program Gerakan Koperasi sebagai bahan propaganda dan kampanye mereka dalam merekrut pendukung.<sup>200</sup> Terutama partai-partai yang telah lama bergelut dengan isu Koperasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Nahdhatul Ulama, Partai Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia. Program kampanye gerakan Koperasi ini juga beriringan dengan tumbuhnya organisasi-organisasi rakyat yang dijadikan alat politik bagi partai yang menjadi kontestan pada Pemilu 1955 seperti Barisan Tani Indonesia yang dimobilisasi PKI, Gerakan Tani Indonesia yang dimobilisasi PSI.

Setelah kongres Koperasi ke III yang berlangsung pada tahun 1956, pemerintah semakin didesak untuk membentuk suatu peraturan yang bisa mengakomodir pertumbuhan pesat Koperasi-Koperasi di Indonesia. Cita-cita ini kemudian terlaksana pada tahun 1958, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Didalam Undang-Undang ini, syarat-syarat pendirian Koperasi semakin dimudahkan, dan pendidikan Koperasi diwajibkan sebagai bahan ajar di sekolah dan di partai politik.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> Teko Sumodiwiryo, *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*. GKBI; Jakarta. Tanpa tahun. Halaman 45 – 46.

<sup>200</sup> J.A.C. Mackie. *The Indonesian Economy 1953 – 1963*, dalam Bruce Glassburner (ed). *The Economy of Indonesia: Selected Reading*. Ithaca. Cornell University Press. 1971. Halaman 8.

<sup>201</sup> Biro Perantjangan Negara, “Pendjelasan atas Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960,” dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Tahun ke IX No. 10, Oktober 1956

Momentum kebangkitan Koperasi ini kemudian berhasil disambungkan oleh Moh Hatta dengan jaringan internasional Koperasi yaitu *International Cooperative Alliance*. Dan pada tahun 1956, ICA mengundang perwakilan dari Dewan Koperasi Indonesia untuk datang menghadiri kongres mereka di Stockholm. 2 tahun setelah itu, pada tahun 1958, Dewan Koperasi Indonesia resmi di terima sebagai bagian dari organisasi ICA.

Pada periode ini, walaupun situasi politik dalam negeri mengalami dinamika yang sangat rumit<sup>202</sup>, perkembangan Koperasi mengalami kemajuan signifikan. Koperasi dengan berbagai jenis bermunculan di banyak tempat sebagai penopang dan penjamin tersedianya barang-barang harian untuk rakyat, walaupun didalam studi ekonomi makro Indonesia, pada masa ini dianggap sebagai masa krisis karena tingkat penurunan nilai mata uang yang sangat tinggi. Dari hasil wawancara dengan seorang mantan pengurus Koperasi lumbung di Tasikmalaya dia mengatakan:

“Terutama setelah kongres Koperasi ke II yang dilakukan di Bandung, waktu itu kami seperti diatas angin, senang sekali rasanya melihat bendera Koperasi berkibar dimana-mana. Bendera-bendera itu berdampingan dengan bendera partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu. Kami, anggota-anggota Koperasi tidak peduli dengan perbedaan partai itu, makanya ketika ada konflik yang terjadi antar partai, anggota-anggota Koperasi lah yang maju ke depan menyelesaikan masalah....teman sendiri kok saling bertengkar?. Waktu itu Koperasi memang banyak sekali. Di kampung ini saja, ada 4 Koperasi lumbung dan 2 Koperasi simpan pinjam. Walaupun katanya waktu itu ekonomi sedang sulit, tapi makanan di kampung-kampung tetap terjamin, hanya uang yang sulit, gara-gara program pemotongan angka yang dibuat oleh pemerintah waktu itu.”<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Misalnya: perselisihan antara kelompok PSI –Sutan Syahrir- dengan Soekarno akibat keterlibatan Soemitro didalam aktivitas PRRI/PERMESTA. Perselisihan MASYUMI-Moh. Natsir- dengan Soekarno tentang ketidaksetujuannya menjalin aliansi yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Perselisihan antara Militer dan Partai Komunis Indonesia tentang klaim atas perintah-perintah Soekarno tentang Nasionalisasi.

<sup>203</sup> Wawancara dengan Pak TS. Tanggal 27 April 2012.

Pertumbuhan Koperasi pada periode ini, dapat dilihat didalam tabel berikut:

**Perkembangan Koperasi dari tahun 1956 – 1959.**

Jenis Koperasi	tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Kantor Pusat (Sekunder)	1956	145	6807
	1957	150	7031
	1958	216	9475
	1959	246	11.717
Koperasi Desa (Serba Usaha)	1956	4085	969.523
	1957	4017	940.134
	1958	4750	1.108.944
	1959	5390	1.329.450
Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)	1956	4545	624.489
	1957	4269	622.049
	1958	5526	689.221
	1959	6095	756.634
Koperasi Lumbung	1956	637	53.747
	1957	491	62.258
	1958	531	56.306
	1959	1450	153.536
Koperasi Produksi	1956	1349	144.524
	1957	1213	111.815
	1958	2048	168.321
	1959	1216	139.063
Koperasi Konsumsi	1956	840	124.811
	1957	625	85.371
	1958	805	113.067

	1959	1935	244.137
--	------	------	---------

Sumber: *Statistical Pocket Book of Indonesia*, 1961.

Perkembangan pesat dengan munculnya banyak Koperasi diberbagai wilayah di Indonesia, beriringan dengan suatu kampanye tentang kemandirian ekonomi yang sedang gencar dilakukan oleh presiden Soekarno melalui program nasionalisasi perusahaan asing.<sup>204</sup> Tanggal 31 Desember 1958 dikeluarkan UU No.86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, pasal 1 dari UU ini menegaskan tentang “*perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh oleh negara Republik Indonesia*”, ratusan perusahaan di berbagai sektor (perkebunan, pertambangan, keuangan, angkutan-transportasi, dll) dinasionalisasi pada periode ini.<sup>205</sup>

Momentum nasionalisasi, banyak dilihat sebagai salah satu bagian penting dari perjalanan ekonomi politik Indonesia yang dipimpin Soekarno. Literatur yang berasal dari penelitian-penelitian (luar negeri dan dalam negeri)<sup>206</sup>, telah menempatkan peristiwa nasionalisasi Soekarno ini sebagai salah satu bentuk dari artikulasi perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Keputusan nasionalisasi ini, lahir dari kekhawatiran elit politik nasional, karena sebagian besar asset masih dikuasai oleh perusahaan Belanda (kesepakatan di KMB).

<sup>204</sup> Nasionalisasi pertama yang dilakukan pemerintah, diterapkan terhadap *De Javasche Bank* pada tahun 1953 melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1 Juli 1953 yang menggantikan *De Javasche Bankwet* 1922. Untuk pembahasan ini dapat dilihat didalam Dawam Rahardjo. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta. LP3ES.

<sup>205</sup> *Op cit*, Arianto Sangaji, 2002 halaman 27. Dan untuk kajian tentang dilemma nasionalisasi ini dijelaskan oleh Budiman Ginting dalam “Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia. dalam *Jurnal Equality* Vol.12 No.2 Agustus 2007.

<sup>206</sup> Misalnya: Kenneth D Thomas dan Bruce Glassburner. *Abrogation, Take Over and Nationalization: The Elimination of Dutch Economic Dominance From The Republic of Indonesia*. Australian Outlook, Volume 19, 1965. Jasper van de Kerkhof, *Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958*. IAS News Letter. Maret 2005. John O. Sutter. *Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institution of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of the General Election, 1940 – 1955*. Disertasi Ph.D Cornell University, tidak diterbitkan.

Penerapan strategi nasionalisasi dilakukan pada saat Indonesia masih belum dapat mengendalikan produksi komoditi (perkebunan, dan pertambangan) eks perusahaan Belanda, begitu pula dengan pengendalian kebijakan-kebijakan financial (*Javanesche Bank*). Efek KMB yang membuat Indonesia diperlakukan sebagai “orang kalah” didalam perang dengan Belanda menyisakan banyak persoalan didalam menjalankan kebijakan baru tersebut. Tetapi jika dihubungkan dengan data pertumbuhan Koperasi di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, maka pilihan Soekarno untuk melancarkan program nasionalisasi bukanlah hanya sekedar bentuk kekusaran-kekusaran di dalam elit politik nasional terhadap hasil Konferensi Meja Bundar. Jika dilihat lebih jauh, keputusan nasionalisasi yang dilakukan Soekarno, juga mempertimbangkan kekuatan massa rakyat didalam sektor ekonomi yang telah digerakkan secara mandiri oleh Koperasi (lihat tabel 2) pada rentang antara tahun 1950-1960.

#### 4.4. Koperasi pada Masa Peralihan Politik 1960 – 1965

Tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu pernyataan yang terkenal dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Pernyataan yang dibacakan dihadapan DPR-Gotong Royong yang beranggotakan partai-partai peserta Pemilu tahun 1955 itu, memutuskan agar dikembalikannya bentuk Republik Indonesia Serikat kepada bentuk Republik Indonesia, UUD-Sementara tahun 1950 dihentikan penerapannya, dan dikembalikan kepada UUD yang disahkan pada tahun 1945.

Secara *de Jure*, dikembalikannya UUD 1950 ke UUD 1945 berakibat juga bagi tidak berlakunya UU perKoperasian tahun 1958, karena UU tersebut memiliki sandaran ke UUD-S 1950. Tetapi secara khusus, presiden Soekarno menyampaikan pidato nya pada acara pembukaan kongres Koperasi ke-4 di Solo pada tanggal 6-10 September 1959, untuk mengabaikan perdebatan tentang UU Koperasi 1958 yang secara otomatis sudah tidak berlaku. Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945, justru menjadi alas kuat bagi gerakan Koperasi Indonesia untuk tetap berjalan dalam memperkuat kedaulatan bangsa.<sup>207</sup> Walaupun begitu,

---

<sup>207</sup> Video Pidato Soekarno pada kongres Koperasi ke-4 di Surakarta. Tanggal 6 September 1959. Dokumentasi DKI no.0023.

pada penghujung tahun 1959, Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 tentang pengembangan Gerakan Koperasi, sebagai cara untuk menjembatani peraturan perKoperasian hingga Undang-Undang Baru tentang Koperasi ditetapkan.

Situasi perpolitikan nasional pada penghujung dasawarsa 1950 hingga memasuki tahun 1960, adalah saat dimana konflik antar politik aliran di Indonesia semakin meruncing. Semua arena yang tersedia, mulai dari aktivitas legislasi nasional untuk mengganti peraturan-peraturan lama peninggalan Kolonial, hingga aktivitas pengorganisasian massa rakyat, dimanfaatkan sebagai alat politik. Bias persaingan pasca Pemilu 1955 itulah yang kemudian mengerucut pada analisa Soekarno untuk menjadikan politik aliran di Indonesia itu sebagai alas legitimasi kerja-kerja untuk membangun kedaulatan Indonesia.<sup>208</sup>

Pengerucutan itu kemudian dikenal dengan NASAKOM, yaitu akronim dari Nasionalis (Partai Nasionalis Indonesia), Agama (Masyumi, NU), dan Komunis (Partai Komunis Indonesia). Soekarno berpandangan bahwa dengan kondisi negara Indonesia yang baru saja bebas dari cengkraman penjajahan Belanda, hendaknya semua kekuatan yang ada di dalam negeri bersatu untuk mempertahankan dan membangun kedaulatan bangsa Indonesia. NASAKOM mendasari hampir semua kebijakan dalam negeri Indonesia pada masa itu. Dia dijadikan slogan didalam semua pidato-pidato Soekarno. Semua politik aliran yang merasa terwakili dengan NASAKOM memakai legitimasi yang serupa didalam proses pendidikan-pendidikan massa rakyat.

Kondisi Koperasi di Indonesia pada masa ini, seperti digambarkan oleh salah seorang mantan pengurus pendidikan dan pengajaran DKI (Dewan Koperasi Indonesia) tahun 1963 – 1964:

“.... Istilahnya, pada waktu itu kami (DKI) sedang terombang-ambing. Kesini salah, kesana salah. Begitupun rekan-rekan Koperasi yang bergerak di desa-desa dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Untuk di Jawa Barat, saya waktu itu bersama dengan Pak Suroso (wakil ketua DKI) pergi

---

<sup>208</sup> Lebih jelas tentang penjelasan pada periode ini dapat dilihat didalam Daniel S Lev. *The Transition to Guided Democracy in Indonesia, 1957 – 1959*. Ithaca: Modern Indonesia Project. Cornell University. 1966.

keliling dalam rangka menyebarkan buku panduan pendidikan Koperasi untuk pemuda dan pemudi. Didalam perjalanan, kami bertemu dengan banyak anggota Koperasi yang mengeluh karena mereka ditarik-tarik untuk masuk kedalam partai politik.... Saya bilang.. itu tidak jelek, partai politik perlu buat Koperasi, tidak usah merasa berat untuk berpartai. Setelah saya pulang, baru saya berpikir... kan anggota Koperasi itu lintas partai.... Tidak ada Koperasi yang dimiliki oleh hanya satu partai, pasti anggotanya dari banyak partai, nah... yang saya temui, rakyat gontok-gontokan karena beda-beda partai, padahal mereka sesama anggota Koperasi.... Tapi memang, kondisinya waktu itu sedang semrawut... belum lagi kondisi perekonomian... sangat parah..harga-harga barang melonjak tinggi, minyak tanah susah di pasar, produksi kebun-kebun rakyat terhenti karena tidak menjanjikan untuk dijual. Seingat saya... waktu itu yang banyak aktif hanya Koperasi lumbung.. karena mereka kan panen 1 kali setahun, dan beras di simpan di lumbung, nanti kalau masa paceklik datang (penghujung masa tanam, menjelang panen), Koperasi lumbung inilah yang bergerak...., kalau Koperasi simpan pinjam, pada masa ini bangkrut semua, kalau istilah sekarang, banyak kredit macet, dan anggota-anggota banyak yang tidak dapat membayar simpanan wajib bulanan.... Koperasi kan hidup dari anggotanya, kalau anggotanya sudah tidak mampu lagi, ya.. Koperasinya juga akan payah juga, ditambah kondisi politik kita waktu itu kan sedang kacau juga...”<sup>209</sup>

Tanggal 2 Agustus 1965, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Presiden Soekarno menetapkan Undang-Undang No.14 tahun 1965 tentang PerKoperasian. Peraturan baru tentang Koperasi Indonesia ini terbit didalam situasi runcingnya konflik politik antar aliran di Indonesia, terutama yang terjadi antara Militer, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, dan MASYUMI.<sup>210</sup> Didalam peraturan ini Soekarno menjadikan NASAKOM sebagai

<sup>209</sup> Wawancara dengan Pak WT (72 tahun), di Cibinong, tanggal 9 Mei 2012.

<sup>210</sup> Sementara kalangan Sosialis –Syahrir- pasca pembubaran PSI pada tahun 1956, mereka banyak bergerak di bawah tanah melakukan pendidikan-pendidikan bersama dengan organisasi petani binaan mereka yaitu Gerakan Tani Indonesia.

poros bagi berlangsungnya kegiatan Koperasi. Pernyataan itu secara eksplisit di tuliskan didalam pasal 5 Undang-Undang No.14/1965 ini yaitu “*Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi Koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM*”. Didalam bagian penjelasannya, kontekstualisasi ide pasal 5 ini dijelaskan bahwa Koperasi adalah bagian dari doktrin didalam agenda revolusi Indonesia yang belum selesai.<sup>211</sup>

Sementara itu, dikalangan massa rakyat, terjadi mobilisasi yang diorganisir terutama oleh Partai Komunis Indonesia.<sup>212</sup> Aktivitas ini, semakin massif ketika UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)/ UU No.5 tahun 1960 di tetapkan oleh pemerintah. Alas hukum ini kemudian dijadikan oleh PKI sebagai alasan untuk melakukan pendudukan kembali tanah-tanah perkebunan milik pemerintah (pasca nasionalisasi) yang dikuasakan ke militer dan dikuasai tuan tanah pedesaan, atau yang terkenal dengan aksi sepihak.<sup>213</sup> PKI yang bekerja bersama dengan organisasi-organisasi sayap yang digunakan sebagai alat politik perjuangannya dikalangan massa rakyat, ikut memanfaatkan semua kelembagaan di desa menjadi salah satu dari alat perjuangan itu. Walaupun didalam banyak literature, organisasi sayap PKI di pedesaan yang paling kuat adalah Barisan Tani Indonesia, dan beberapa organisasi lain seperti Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), dan Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA).

---

<sup>211</sup> Penjelasan didokumen aslinya sebagai berikut: *Sesuai dengan penjelasan umum perKoperasian (pola Koperasi) tidak dapat dipisahkan dari masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi), sehingga tantangan-tantangan dari gerakan Koperasi hakekatnya merupakan tantangan dari pada Revolusi itu sendiri. Pengalaman-pengalaman perjuangan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan keharusan obyektif adanya persatuan dan kesatuan segenap potensi dan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner berporos NASAKOM, yang pelaksanaannya diatur dengan kegotong-royongan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan NASAKOM.*

<sup>212</sup> PKI adalah salah satu 3 partai politik besar di Indonesia yang berhasil meraih banyak suara pada pemilihan umum tahun 1955.

<sup>213</sup> Ada banyak sekali literature yang telah membahas tentang aksi sepihak, diantaranya: Donald Hindley. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley. University of California Press. 1964.; Margo L. Lyon, “Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa” dalam SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.) *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Yayasan Obor; Ernest Utrecht, “Land Reform in Indonesia”, *Buletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. V, No. 3; dan Rex Mortimer, “The Indonesia Communism and Land Reform 1959-1965”, *Monash Papers on Southeast Asia*, No. 1, 1972

Tetapi, Koperasi menjadi salah satu alat penting bagi PKI untuk menggerakkan petani-petani di pedesaan.<sup>214</sup>

Koperasi-Koperasi rakyat yang jumlahnya ribuan dan tersebar di banyak tempat di berbagai wilayah di Indonesia, mau tidak mau, berhadapan dengan situasi politik dalam negeri yang sedang kacau. DKI, pada rapat pimpinan yang dihadiri oleh 10 orang pada tanggal 17 Januari 1964 di Jakarta, kemudian memutuskan untuk tidak ikut terlibat didalam polemik politik. Rapat itu juga menghasilkan surat yang isinya menginstruksikan kepada semua Koperasi yang tergabung didalam DKI untuk tidak ikut ambil bagian didalam polemik politik tersebut.<sup>215</sup> Tetapi, usaha itu tidak dapat menahan laju kampanye dan propaganda kekuatan besar dari Partai Komunis, yang telah masuk hingga ke desa-desa yang menjadi basis Koperasi juga.

Akibatnya, pada periode ini, aktifitas produksi dan kegiatan di Koperasi menjadi menurun. Anggota-anggota Koperasi di pedesaan yang kebanyakan adalah petani-petani kecil, telah masuk didalam serangkaian aksi-aksi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.<sup>216</sup> Sementara, petani-petani dengan kepemilikan tanah yang luas, yang sebelumnya menjadi bagian dari Koperasi dan banyak yang juga menjadi pengurus Koperasi, telah dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang harus di lawan oleh PKI.<sup>217</sup>

Pertentangan besar politik nasional ini, kemudian berujung pada satu peristiwa besar yang terjadi pada penghujung tahun 1965. Setelah didahului aksi pembunuhan terhadap petinggi militer Angkatan Darat di Jakarta oleh kelompok yang menamakan dirinya Dewan Revolusi, kiblat politik Indonesia segera berubah drastis. Partai Komunis Indonesia yang awalnya menjadi bagian dari

---

<sup>214</sup> Didalam dokumen Pesan Tahun Baru Politbiro Commite Central PKI yang berjudul *Memasuki Tahun 1958, dengan Fase Baru Perdjoangan Anti Kolonialisme*, dinyatakan bahwa, Koperasi adalah alat revolusi yang harus di dayagunakan untuk kepentingan perwujudan cita-cita komunisme. Rex Mortimer, *Traditional Modes and Communist Movement: Change and Protest in Indonesia*, dalam John Wilson Lewis (ed). *Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia*. Stanford University Press. 1974.

<sup>215</sup> Surat Edaran DKI No.002 tanggal 18 Januari 1964.

<sup>216</sup> Klaim ini dinyatakan oleh Ketua CC PKI. DN Aidit didalam *Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang*. Laporan Politik Kepada Sidang Pleno ke IV CC PKI yang diperluas pada tanggal 11 Mei 1965. Jajasan Pembaharuan. 1965.

<sup>217</sup> Untuk Jawa Barat, dapat dilihat didalam D.N Aidit. *Kaum Tani Mengganjang Setan Setan Desa: laporan Singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat*. Jakarta. Jajasan Pembaharuan. 1965.

pemerintahan, menjadi pesakitan yang dituduh melakukan kudeta terhadap kekuasaan presiden Soekarno.<sup>218</sup> Dan tidak lama berselang, terjadi peristiwa besar yang kemudian mempengaruhi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia hingga saat ini, termasuk, hubungannya dengan perkembangan Koperasi.

Peristiwa besar itu adalah pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh menjadi bagian dari PKI. Dalam laporan yang berbeda-beda, hampir sejuta orang di bunuh, dan ratusan ribu orang lainnya ditangkap tanpa pernah diadili. Pemerintahan baru yang menamakan dirinya Orde Baru dibawah pimpinan Jendral Soeharto melakukan penyisiran hingga ke pelosok-pelosok desa untuk mencari dan menghabisi orang-orang yang dituduh PKI.<sup>219</sup>

Pemerintahan baru ini kemudian merancang suatu operasi yang berjalan merayap dari barat pulau jawa hingga ke Bali, -kecuali Jawa Barat yang memiliki cerita tersendiri<sup>220</sup>- pasukan RPKAD (kemudian berubah nama menjadi KOPASUS) yang dipimpin oleh Sarwo Edhi Wibowo ini bekerja dengan masyarakat yang tidak suka dengan PKI, mereka melakukan suatu kampanye seperti kampanye NAZI untuk menghabisi “orang-orang yang tidak diinginkan” di Jerman, dan melakukan aksi pembasmian yang mirip dengan pembantaian.

Belum ada suatu studi yang membahas dan menelaah seperti apa posisi Koperasi dan orang-orang yang menjadi anggota Koperasi di desa pada masa itu. Tetapi dari wawancara dengan pengurus DKI yang menjabat pada tahun 1965, dan dia ikut dituduh sebagai bagian dari PKI, menyatakan:

---

<sup>218</sup> Ulasan tentang berbagai study yang pernah dilakukan diseputar peristiwa ini dapat dilihat didalam Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. 2000. Halaman 61 – 76.

<sup>219</sup> Robert Cribb "The Indonesian Killings 1965-1966." Clayton: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1990; dan Robert Cribb, "Genocide in Indonesia 1965-1966." *Journal of Genocide Research 2001*, No. 3, halaman 219-239

<sup>220</sup> Di Jawa Barat, yang terkena dampak penyisiran pasukan RPKAD hanya di wilayah Subang. Sementara yang lain, telah “diamankan” oleh panglima militer Siliwangi, Letjend Ibrahim Adjie. Dia melaporkan ke markas Pusat Darat, bahwa untuk Jawa Barat, PKI beserta dengan massa pendukungnya telah dibubarkan. Lihat didalam Budi Susanto S.J (ed). *Sisi Senyap Politik Bising*. Kanisius. Yogyakarta. 2007. Halaman 64. Fakta lain tentang kebijakan Ibrahim Adjie untuk melindungi orang-orang tidak bersalah pada peristiwa ini dapat dilihat didalam catatan Ilham Aidit didalam: <http://ilhamaidit.wordpress.com/2007/12/25>.

“Anggota Koperasi itu memang banyak yang Komunis, mereka menjadi komunis bukan karena mereka mengerti politik, banyak yang ikut karena diajak oleh teman, saudara, atau kepala kampung, kalau di Boyolali, pada waktu itu saya tinggal disana, orang-orang menjadi komunis karena diberi cangkul oleh PKI, dan namanya didaftar sebagai penerima cangkul.... Lha.. masa orang ga boleh terima cangkul... setahu saya, di Boyolali, ratusan orang, anggota Koperasi disana yang ikut kena operasi Merapi Merbabu Kompleks itu... dibunuh... saya sendiri, hampir kena, karena saya memang dekat dengan petani-petani yang dituduh komunis, tapi untungnya saya selamat, masuk ke gereja katolik, dan diselamatkan romo di gereja katolik. Untuk anggota-anggota Koperasi yang berada di desa-desa, saya kira banyak yang kena razia, Koperasi kan anggotanya tidak dibatasi, harus partai ini atau itu. Kebetulan waktu itu kan PKI rajin ke desa memberi informasi-informasi tentang membagi tanah untuk petani miskin, ya pasti banyak pendukungnya.”<sup>221</sup>

Tragedi ini mengawali proses transisi baru seluruh kehidupan politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia. Oleh beberapa ilmuwan sosial Indonesia, periode ini dianggap sebagai titik balik kembalinya Indonesia menjadi “negara jajahan”, terutama “jajahan” bagi banyak kepentingan yang bermain didalam konteks perang dingin yang berlangsung antara Blok Barat (Kapitalis) dan Blok Timur (Komunis) yang dimenangkan Blok Barat. Kemenangan gilang gemilang yang dicapai oleh Blok Barat, dan kampanye penolakan terhadap Komunisme, saling kait mengkait dengan momentum transisi ini, dan Indonesia berhasil dijadikan suatu percontohan bagi Blok Barat, bahwa mereka bisa menghalangi negara ini jatuh kedalam pangkuan Komunisme.<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan Pak SY (75 thn) di Cibinong tanggal 9 Mei 2012.

<sup>222</sup> Analisa mengenai keterlibatan Blok Barat, terutama Amerika Serikat, pada proses transisi ini dijelaskan dengan sangat detail oleh Braidley Simpson dalam *Economic With Guns. Amerika Serikat, CIA dan Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*. Di dalam buku ini dia memaparkan bagaimana campur tangan kantor-kantor konsultan Amerika Serikat di dalam perubahan dan pengaturan kiblat politik dan ekonomi negara Indonesia pada masa transisi tersebut.

#### 4.5. Masa Depolitisasi Koperasi oleh Orde Baru.

Memasuki tahun 1967, pemerintahan yang baru dibentuk dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, segera mengkonsolidasikan kekuatan baru. Periode lama yang disebut sebagai Orde Lama (pemerintahan Soekarno) direkonstruksi sedemikian rupa sehingga dianggap gagal melaksanakan pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Isu-isu populis ala Soekarno digantikan dengan sangat cepat ke isu pembangunan yang dikenal dengan *Developmentalism*. Tradisi keilmuan yang berasal dari kalangan kritis, digantikan oleh ilmu-ilmu yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan baru itu. Begitupun Koperasi, peninggalan bersejarah *Founding Father* Republik Indonesia, direkonstruksi ulang, sebagai bagian dari pendukung agenda pembangunan nasional Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Soeharto, dia mendapatkan warisan berbagai masalah yang belum terselesaikan pada masa sebelumnya, berupa kebangkrutan ekonomi yang mengancam ketersediaan pangan rakyat, stabilitas politik dalam dan luar negeri yang tidak menentu, naiknya angka pengangguran, dan tertundanya proyek-proyek pembangunan yang telah dirintis pada masa Soekarno. Keterbatasan anggaran pemerintahan baru ini, kemudian mendapat jawaban dari skenario global yang dimainkan pada perang dingin antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Sovyet Rusia.

Titik penting yang dapat dilihat pada awal pemerintahan Orde Baru ini adalah diterbitkannya UU No.9 tahun 1966, yang menyatakan tentang bergabungnya kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* dan *International Bank for Reconstruction and Development*. Tidak lama berselang, Soeharto yang telah diasistensi oleh ekonom-ekonom IMF<sup>223</sup> mengeluarkan tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang terkenal dengan “paket 1967” yaitu: *pertama* UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, *kedua* dalam tahun yang sama, tepatnya tanggal 24 Mei 1967, UU No.5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dan *ketiga* akhir tahun, tanggal 2 Desember 1967 dikeluarkan Undang Undang Pokok Pertambangan (UU No.11 tahun 1967).

---

<sup>223</sup> Braidley Simpson, *Ibid.* halaman 20.

Dalam penyusunan ketiga Undang-Undang ini, Rezim Orde Baru, sama sekali tidak memperhatikan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait yang telah disusun sebelumnya (misal UU No.44/1960 tentang pertambangan Gas dan Minyak Bumi yang hanya boleh dilakukan negara, peraturan Menteri Kehutanan No.1 tahun 1964 tentang kewenangan hutan yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, dll) tetapi yang menjadi point penting dari “paket 1967” ini adalah terbukanya arus investasi ke Indonesia untuk mengekstraksi tambang,<sup>224</sup> menambang kayu di hutan,<sup>225</sup> mengusahakan perkebunan besar<sup>226</sup> dan semua itu dilakukan dengan skema permodalan dari perusahaan besar luar negeri.

Tentang PerKoperasian, pemerintah Orde Baru segera mengeluarkan Undang-Undang Baru pada tanggal 18 Desember 1967, yaitu UU No.12 tahun 1967. Undang-undang ini menggantikan UU Koperasi yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Di dalam bagian awalnya, Undang-Undang ini sangat jelas merepresentasikan “jalan pikiran” pemerintahan Orde Baru. Didalam pembukaannya, UU produk Orde Baru ini menyatakan bahwa UU Koperasi yang lama (1965) tidak sesuai dengan semangat Indonesia dan cenderung menjadikan Koperasi sebagai alat politik. Didalam pasal ketentuan umum, kata-kata “gerakan” yang selalu menempel didalam penjelasan tentang Koperasi juga dihilangkan menjadi hanya “Koperasi”.

---

<sup>224</sup> Freeport adalah perusahaan pertama yang diberikan perpanjangan izin setelah UU.No11 Tahun 1967 disahkan Soeharto, dan hingga tahun 1970 terdapat 9 perusahaan besar Asing yang beroperasi di 30 blok penambangan minyak bumi dan gas di kepulauan Indonesia (Data BKPMA 1970)

<sup>225</sup> Sektor Kehutanan, pada zaman Orde Baru mulai massif dieksploitasi menjadi Hutan Industri pada tahun 1975 dengan dikeluarkannya PP No.18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengungutan Hasil Hutan.

<sup>226</sup> Disektor perkebunan, hasil dari polemik nasionalisasi yang tidak pernah tuntas pada tahun 1950-an, perkebunan-perkebunan yang berhasil dinasionalisasi segera diurus oleh negara dengan mengelolanya melalui Perseroan Perkebunan Negara (PPN) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1960, dan pada tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), sementara tanah-tanah bekas perkebunan yang tidak masuk dalam PNP yang sebagian digarap oleh massa tani setempat dimasukkan tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, Permendagri No.3 Tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak Barat di tetapkan, dit tanah konversi hak barat inilah cikal bakal HGU-HGU yang jumlahnya ratusan di Indonesia.

Orde Baru memang bekerja dengan pola seperti yang dia terapkan dalam contoh kasus Koperasi. Ini adalah salah satu dari sekian bentuk cara kerja yang diterapkan Soeharto untuk mengontrol wilayah kekuasaannya. Cara ini dikenal dengan nama *Floating Mass* (Massa Mengambang)<sup>227</sup>, yaitu strategi untuk memutus aspirasi politik rakyat dalam bentuk organisasi-organisasi massa, dan penyediaan kanal bagi aspirasi politik itu hanya untuk kepentingan penguasa. Penerapan *Floating Mass* ini pula yang diterapkan terhadap organisasi Koperasi. Penerapannya mirip dengan organ-organ lain yang dipaksakan untuk berfusi didalam organisasi boneka buatan pemerintah (Serikat Buruh disatukan di SPSI, Serikat Tani dalam HKTI, dll), Koperasi tetap dibiarkan berdiri, tetapi diatur lewat Undang-Undang Baru yang dibuat Soeharto.

Bersamaan dengan strategi pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto. Koperasi yang telah kocar-kacir pasca peristiwa 1966 hingga 1970, mulai membenahi diri kembali. Pada kongres Koperasi tahun 1967 – yang kemudian ditukar menjadi Musyawarah Nasional- Dewan Koperasi Nasional yang biasa di singkat DKI dirubah menjadi DEKOPIN. Tetapi, yang berbeda dari kepengurusan DEKOPIN ini adalah, banyak diantara mereka yang duduk sebagai pejabat pemerintahan di pusat maupun di tingkat kabupaten, yang mana, pejabat-pejabat tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai alat pengontrol, demi menjaga stabilitas nasional.

Soeharto, memberikan slot yang sangat besar untuk Koperasi didalam rencana-rencana pembangunannya. Dalam pidato-pidato kenegaraannya pada tahun 1970, dia mengatakan bahwa, perekonomian Indonesia harus di sokong oleh semangat Koperasi, karena itulah, Koperasi harus dijadikan soko guru bagi pembangunan Indonesia. Tetapi, maksud dari penggalakan Koperasi yang dinyatakan didalam pidato Soeharto itu memiliki suatu tujuan yang kemudian akan terlihat pada perjalanan PELITA I, yaitu Koperasi dimanfaatkan sebagai alat

---

<sup>227</sup> Didalam Politik kepartaian, Soeharto menerapkan kontrol ketat, pasca pemilihan Umum 1971, tepatnya pada 1973, jumlah partai politik ,dari 10 partai (kontestan pemilu 1971) dijadikan menjadi hanya 3 partai politik. Golongan Agama Islam bersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, sebagai partai pemerintah, dan Golongan Nasionalis dan Agama (selain Islam) bersatu dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga kelompok ini di pimpin oleh Golkar yang dijadikan oleh Soeharto sebagai kendaraan politiknya.

untuk mendukung modernisasi pertanian yang dikenal dengan nama *Revolusi Hijau*.

Revolusi Hijau, adalah suatu program perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting: penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu.

Revolusi Hijau yang untuk Indonesia di kenal dengan nama program intensifikasi padi, tidak berjalan sendiri, dia dikawal oleh 2 program unggulan yang lain yaitu program pengendalian populasi yang dikenal dengan nama program Keluarga Berencana, dan Program pemerataan penyebaran penduduk yang dikenal dengan program Transmigrasi – yang sebenarnya telah diterapkan oleh pemerintah kolonial pada awal penerapan politik etis-. Revolusi Hijau didukung oleh skema pendaan dari dua sumber yaitu hutang dan hibah luar negeri dari sekelompok penyedia dana hutang luar negeri bernama *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) dan *World Bank* yang sejak tahun 1968 telah memberi dana dalam jumlah besar kepada pemerintah Indonesia dengan paket-paket perjanjian yang memungkinkan bermainnya modal asing di Indonesia (seperti paket *Structural adjustment Programme*), dan sumber kedua adalah dari pendapatan minyak bumi, yang merupakan hasil booming minyak dunia yang mencapai harga US\$12/barel pada tahun 1974 dari sebelumnya hanya US\$3/barel, harga minyak ini terus naik hingga pada tahun 1982 mencapai US\$36/barel. Dari keuntungan penjualan minyak bumi ini 20% dijatahkan untuk pembiayaan revolusi hijau.<sup>228</sup>

Model ini berangkat dari suatu teori besar yaitu “teori Populasi”, yang dipopulerkan oleh Thomas Malthus. Teori ini dikembangkan pada abad ke-18

---

<sup>228</sup> Noer Fauzi Rachman, dalam *Nyageurkeun Nu Paremeun, Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan*. Makalah dalam pendidikan Guru Reforma Agraria. 12 Maret 2008.

didalam konteks revolusi Industri di Inggris. Didalam buku klasiknya yang berjudul *An Essay on the Principle of Population*, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada peningkatan produksi pangan. Menurutnya “bencana kelaparan” adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Walaupun banyak perdebatan yang melahirkan pertanyaan terhadapnya, tetapi teori Malthus kemudian mengilhami banyak model kebijakan penanganan kekurangan pangan, dan pengendalian populasi di negara-negara berkembang pada awal dasawarsa 70-an.

Kaitan perkembangan kebijakan ini dengan Koperasi selanjutnya adalah, alih-alih menghindarkannya sebagai abdi politik –seperti yang dikhawatirkan oleh Orde Baru didalam bagian pertama UU. 14. 1967- justru menjadi alat politik Orde Baru. Tetapi, untuk membuatnya menjadi alat politik, Koperasi di depolitisasi melalui program-program pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto. Depolitisasi ini kemudian berujung kepada didisiplinkannya Koperasi kedalam unit-unit yang melayani kebutuhan, serta menyokong berjalannya program revolusi hijau melalui instruksi presiden tahun 1973, dan tahun 1984.

Dalam kebijakan politik pemerintahannya Soeharto menempatkan Koperasi dibawah satu kementerian. Diksi-diksi seperti “Koperasi soko guru perekonomian Indonesia”, dan “Koperasi adalah semangat pembangunan”, tetapi dalam prakteknya, Koperasi hanya sekedar “melepaskan hutang” untuk menghargai jasa *founding father* Indonesia. Kebijakan Ekonomi Orde Baru justru menghabisi ruang gerak Koperasi. Kebijakan yang dimaksud sebenarnya telah berjalan sejak awal pemerintahan Orde Baru, tetapi kebijakan ekonomi yang menggerus habis semangat Koperasi itu terjadi pada paruh pertama dasawarsa 1980.<sup>229</sup>

Pada tahun 1983, dikeluarkanlah paket pertama dari lima paket deregulasi perbankan Nasional, paket pertama ini adalah awal dibebaskannya penentuan suku bunga deposito oleh Bank. Campur tangan Bank Indonesia dihapuskan, paket kebijakan ini juga memperkenalkan apa yang kemudian dikenal dengan perdagangan saham. Setelah itu paket kedua pada tahun 1988 atau yang lebih

---

<sup>229</sup> Lebih jelas tentang kebijakan-kebijakan ekonomi orde baru, lihat di Anne Booth dan Peter McCawley (eds). 1981. *The Indonesian Economy During the Soeharto Era*. Oxford University Press. Halaman 79 – 131.

dikenal sebagai Pakto 88, yang berisi tentang kemudahan bagi pemodal untuk mendirikan Bank termasuk Bank Koperasi yang dikenal dengan nama Bank Bukopin. Paket ini melahirkan sekumpulan *Bankocracy* yang digunakan oleh Soeharto dan Orde Baru untuk membiayai proyek-proyek pembangunannya, tetapi Pakto 88 berakibat pada persaingan yang terjadi antar Bank, akibatnya dalam 2 tahun saja terjadi banyak kasus di perbankan nasional.

Paket revisi Pakto 88 diluncurkan pada tahun 1991, paket ini terkenal dengan konsep CAR (*Capital adequacy ratio*) atau perbandingan antara modal sendiri dengan asset, pemerintah mengharuskan 8% modal pendirian Bank harus dari modal internal perusahaan yang akan mendirikan bank, tetapi tahun ini 2 bank besar (Bank Duta dan Bank Umum Majapahit) ambruk di perdagangan valuta asing. 3 paket diatas membuat terjadinya booming bank di Indonesia, pada tahun 1991 saja, terdapat 17.000 bank, 8400 diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat, ada 100 nama baru di daftar kepemilikan bank, dan sebagian dimiliki oleh pendanaan dari luar negeri, selain itu, kumpulan *bankocracy* ini adalah para konglomerat-konglomerat yang memiliki usaha di sektor-sektor strategis dalam negeri, akibatnya mereka mengucurkan pembiayaan untuk perusahaan mereka sendiri, padahal itu tidak diperbolehkan dalam aturan perbankan nasional. Praktek *insider lending* mengakibatkan banyaknya kredit macet, sehingga beberapa Bank besar seperti Bank Summa, dilikuidasi oleh BI pada tahun 1992.<sup>230</sup> Puncak dari kekacauan ini adalah ketika tanggal 1 november 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi serempak terhadap 16 bank yang dianggap bangkrut dan mengharuskan beberapa bank untuk melakukan merger.

Akibat yang paling terasa bagi perkembangan Koperasi adalah, hilangnya semangat pembangunan ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan didalam kelembagaan Koperasi. Pemaknaan tentang Koperasi berubah drastis dari kelembagaan bersama untuk kemajuan bersama, menjadi Koperasi yang hanya dimaknai tidak lebih dari fungsi-fungsi finansial yang dikerjakan oleh Bank. Tidak heran, jika pada masa-masa sekarang ini, Koperasi

---

<sup>230</sup> Informasi tentang paket deregulasi perbankan ini, disarikan dari data yang dipaparkan oleh Tempo edisi 36/02 – 8 November 1997.

banyak yang dimaknai mirip dengan bank yang menyediakan fasilitas yang mirip dengan bank.

Sementara itu, didalam konstalasi politik nasional saat ini, Koperasi telah hilang sama sekali dari pembicaraan. Jika pun ada yang berbicara tentang Koperasi, mereka telah kehilangan imajinasi tentang bagaimana seharusnya Koperasi berjalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Djabarudin Djohan didalam buku *Wajah Koperasi Indonesia*, memaparkan tentang cerita Koperasi saat ini yang sudah hancur. Elit pimpinan di pusat saling berkelahi antara satu dengan yang lain, anggaran bantuan pengembangan Koperasi habis begitu saja tanpa ada hasilnya, dan diksi tentang Koperasi, perlahan-lahan mulai tidak diminati lagi.<sup>231</sup>

---

<sup>231</sup> Tentang kondisi perKoperasian saat ini dapat dilihat didalam, Djabarudin Djohan, *Wajah Koperasi Indonesia*. Jakarta. LPS2I. terutama bab tentang “Malu aku menjadi orang Koperasi”. Halaman 142.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **MEMAKNAI KOPERASI CIWANGUN SEBAGAI GERAKAN PETANI**

Saya datang ke Ciwangun pada tahun 2010, setelah hampir 58 tahun koperasi ini berdiri. Kedatangan ini sebagai tindak lanjut dari undangan seorang Bapak yang bertemu pada sebuah acara seminar tentang Reforma Agraria di Jakarta yang tidak sengaja dia datangi. Saat pertama datang, hal pertama yang saya tanyakan kepada penjaga malam (Pak GT) di mess tempat saya diinapkan adalah “perkebunan karet ini milik siapa, apakah pengusahanya berada di sini atau di Bandung atau Jakarta”? Pertanyaan itu dijawabnya sambil memandang saya dengan wajah heran dan nada agak memprotes “ini kebun punya koperasi, termasuk punya saya”. Jawaban inilah yang menyebabkan, dimulainya hubungan saya dengan orang-orang di Ciwangun berlangsung hingga sekarang.

Pada suatu kesempatan wawancara dengan ketua koperasi ini, saya diajak oleh beliau kedalam ruangan administrator. Didalam sesi wawancara itu, berkali-kali keluar kata-kata “perkebunan ini dijalankan atas dasar sama rata sama rasa”. Darimana kata-kata itu berasal kalau bukan dari kaum pergerakan Sarekat Islam tahun-tahun 1920-an, yang dipopulerkan oleh Marco Kartodikramo. Setelah wawancara usai, seketika saya akan keluar ruangan administrator itu, diatas ventilasi pintu utama terpampang gambar *tiga serangkai*, Soekarno di tengah, diapit dikanan dan kiri oleh Syahrir dan Moh Hatta. Sekali lagi, ini menimbulkan keinginan kuat bagi saya menggali perjalanan orang-orang di Ciwangun.

Begitupun saat bertandang ke rumah ketua koperasi, diantara rumah-rumah beton anggota koperasi yang lain, rumah pak ketua ini hanya bangunan sederhana dengan pekarangan ala desa yang banyak ditumbuhi tanaman-tanaman bumbu dapur. Ruang tamunya kecil dan tidak bersofa. Saat makan siang, kami makan di bagian rumah bagian belakang yang langsung bersambung dengan dapur. Disana terdapat tungku berbahan bakar kayu yang agaknya telah usang, terlihat dari sisa pembakaran yang sudah menumpuk dan mengeras di sisi-sisi bawahnya. Sebelum saya bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan “kesederhanaan” itu, Pak Ketua sudah menimpali saya dengan penjelasan –lagi-lagi- tentang “sama rata sama rasa”.

Apa yang disebut sebagai gerakan petani, pada kenyataannya adalah sebuah diksi yang memiliki arti sangat luas. Pembahasan yang dicakupnya sama dengan luasnya dengan cakupan pembahasan tentang petani itu sendiri, yang didalam kepustakaan antropologi telah dibahas sejak lama. Pertanyaan tentang “gerakan dan bukan gerakan” didalam praktek sosial petani seperti yang telah dipaparan diatas, telah membawa satu pemahaman tentang kompleksnya persoalan yang harus diperhatikan untuk melihat petani sebagai aktor didalam praktek gerakan. Kekompleksitasan ini berkaitan dengan berbagai latar yang membentuk panggung sejarah petani tersebut.

Didalam diskursus tentang gerakan petani di Indonesia, telah terbentuk suatu mainstream yang dianut oleh kalangan aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintahan tentang kata ganti “gerakan petani” dengan “perlawanan petani”. Kemudian muncul studi-studi lanjutan tentang apa yang dimaksud dengan “perlawanan” tersebut. Rumusan-rumusan yang muncul kemudian adalah, beragam konsep tentang jenis perlawanan. Perbedaan itu mengerucut pada konsep tentang perlawanan dalam bentuk terbuka, dan dalam bentuk sembunyi yang tertutup. Masing-masing konsep ini dikembangkan dengan memakai contoh kasus di berbagai tempat yang berbeda, dan lahirlah konsep seperti perlawanan sehari-hari, dan berbagai konsep lain yang dipaparkan pada bagian pendahuluan.

Dari pergaulan yang saya alami bersama dengan aktivis-aktivis petani sejak tahun 2005-sekarang, perkembangan konseptual tentang gerakan petani telah mengarah pada pemahaman yang sempit tentang perlawanan. Tindakan melawan yang dimaksudkan mengerucut pada bentuk aksi-aksi dramatis yang bisa dipamerkan sebagai tindakan heroik. Simbol turunan dari *leksikon* revolusi pun menjadi andalan bagi cara menampilkan gerakan petani. Pemahaman ini membawa implikasi akademis didalam cara melihat gerakan petani di Indonesia. Studi-studi tentang gerakan petani selalu diasosiasikan dengan yang “revolusioner”. Untuk Indonesia, apa yang disebut “revolusioner” itu tentu saja merujuk pada aliran-aliran politik tertentu dan pada masa tertentu pula (misalnya: gerakan *Millenarian* pada tahun 1800-an, aksi sepihak pada tahun 1960-an, dan aksi reclaiming tahun 2000-an).

Penelusuran latar sejarah yang dilakukan dalam tulisan ini, ingin melihat timbul dan tenggelamnya gerakan petani disatu sisi, dan inisiatif petani yang tidak digolongkan sebagai gerakan pada sisi yang lain. Persis seperti apa yang diingatkan oleh Marc Edelman, tentang pentingnya memberikan perluasan cara baca dan radar untuk melacak gerakan, didalam tulisannya yang berjudul *Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politic*. Kelompok pertama, adalah gerakan petani yang muncul dengan mengasosiasikan dirinya pada identitas-identitas kolektif, entah kelas, agama, etnis, atau aliran politik. Mereka melakukan apa yang disebut oleh John McCarthy dan Mayer Zald dengan *Resource Mobilization*. Bentuk praktek gerakan nya pun bisa dilacak, karena ada tindakan yang mempresentasikan praktek mereka ke publik. Kelompok kedua, adalah mereka yang melakukan “perlawanan” tetapi terdapat situasi yang tidak memungkinkan mereka mempresentasikan praktek mereka ke publik.

Gerakan Petani, -meminjam istilah Takeshi Siraishi (1990)- dalam cakupan ini menjadi suatu proses “penerjemahan” dan “pencomotan” yang kompleks dan dinamis. Contoh kasus Koperasi Ciwangun ini adalah bentuk dari kompleks dan dinamis nya proses penerjemahan tentang gerakan petani tersebut. Bentuk terkini dari “gerakan di Ciwangun ini” adalah koperasi. Perjalanan sejarah Indonesia, telah mengantarkan suatu pemahaman tentang koperasi sebagai hal yang bukan dianggap gerakan, seperti yang dijelaskan pada bagian ke IV didalam tulisan ini. Sementara itu perjalanan konseptual mengenai Gerakan Petani dalam sejarah Indonesia telah mengerucut pada bentuknya yang paling terkini. Terutama diwakili oleh aksi-aksi dramatis dan heroisme kolektif dari Serikat-serikat Petani yang ada di Indonesia, seperti yang dipaparkan pada bagian II dalam tulisan ini.

Koperasi Ciwangun bercikal dari suatu heroisme kebangkitan nasional pada tahun 1919. Terbukti dengan terlibatnya sebagian dari mereka didalam aktifitas Sarekat Islam faksi Semarang yang sangat keras membangun konfrontasi dengan pihak kolonial Belanda. Begitupun pada masa depresi ekonomi dan politik tahun 1930-an, mereka telah berjejaring dengan aktivis-aktivis pengkader dari PNI-Baru yang berada di Bandung. Saat Indonesia merdeka, petani-petani di Ciwangun terlibat aktif didalam organisasi tani nasional pendukung revolusi yang diagung-agungkan oleh Soekarno yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). Tahun

1954, polemik yang terjadi diantara pimpinan BTI, menyebabkan mereka keluar dari BTI dan bergabung dengan Gerakan Tani Indonesia (GTI). Keterlibatan di GTI inilah yang meletakkan dasar-dasar bagi penataan produksi lanjutan di Ciwangun yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Jika sejarah keterlibatan Ciwangun didalam organisasi-organisasi tani ini terjadi sekarang, pasti Koperasi Ciwangun segera dikelompokkan sebagai gerakan. Tetapi kejadiannya telah berlangsung sejak lama, yang kemudian disusul oleh momentum-momentum yang membuat mereka tidak dianggap sebagai bagian dari gerakan petani. Momentum itu terutama terjadi pada masa Orde Baru hingga sekarang. Gerakan petani di bungkam, sementara koperasi di politisasi menjadi alat kekuasaan rezim untuk menjalankan watak pembangunannya. Pada sudut pandang seperti ini, Koperasi Ciwangun mendapat untung. Karena mereka digolongkan sebagai koperasi, maka dia dianggap tidak bagian dari gerakan yang harus di basmi oleh orde baru.

Pada momentum ini, sekaligus dia (Koperasi) menjadi hilang dari pembicaraan tentang gerakan petani yang kembali tumbuh paska Orde Baru runtuh tahun 1998. Karena, hampir semua studi tentang koperasi yang pernah dilakukan, tidak pernah meletakkannya sebagai bagian dari gerakan petani. Padahal, gerakan koperasi lah yang mempertahankan ekonomi massa rakyat ketika depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Begitupun pada masa Soekarno, pertumbuhan pesat dari gerakan koperasi, adalah salah satu pertimbangan Bung Karno untuk membatalkan perjanjian KMB yang merugikan Indonesia, yang kemudian disusul dengan kebijakan nasionalisasi. Tetapi, -seperti dinyatakan diatas-, koperasi kemudian di caplok dan dipolitisasi oleh Soeharto, yang membuat gerakan koperasi hanya sebatas pemuas nafsu dari program-program pembangunan Orde Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abayaseker, Susan. 1972. "Partai Indonesia Raja, 1936 – 1942: A Study in Cooperative Nationalism" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*. Vol 3, no. 2, September. Halaman 23-45.
- Abayasekere, Susan. 1973. "The Soetardjo Petition" dalam *Journal of Indonesia*. no. 15. April. Halaman 31-48
- Abeyasekere, Susan. 1976. *One Hand Clapping: Indonesian Nationalist and the Dutch, 1939 – 1942*. Monash Papers on Southeast Asia No. 5. Halaman 17 – 29.
- Abdullah, Taufik. 1971. *Schools and Politics; the Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series.
- Achdian, Andi. 2009. Tanah Bagi yang Tak Bertanah, *Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1960-1965*. Bogor: Kekal Press dan STPN.
- Aidit, DN. 1965. didalam *Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang*. Laporan Politik Kepada Sidang Pleno ke IV CC PKI yang diperluas pada tanggal 11 Mei 1965. Jajasan Pembaharuan.
- Aidit, D.N. 1965. *Kaum Tani Mengganjang Setan Setan Desa: laporan Singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat*. Jakarta: Jajasan Pembaharuan.
- Aidit, D.N. 1952. *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta.
- Alexander, Oates William. 1968. "The Afdeeling B: an Indonesian Case Study". *Journal of Southeast Asian History*. Vol 9. No. 1 Maret.
- Anderson, Ben. 1988. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang, dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anderson, Benedict. 1966. "Japan: The light of Asia". Dalam Josef Silverstein (ed). *Southeast Asia in World War II: Four Essays*. Yale University: Southeast Asian Studies Monograph Series no.7.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Bachriadi, Dianto. 2002. "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam Anu Lounella dan R. Yando Zakaria (Eds.). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist Press bersama KARSA.

Bachriadi, Dianto dan Anton Lukacs. 2001. *Merampas Tanah Rakyat, Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: KPG.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing. 2010 *Data Perusahaan Tambang Modal Asing di Indonesia*.

Biro Perantjangan Negara. 1956. "Pendjelasan atas Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960," dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Tahun ke IX No. 10, Oktober.

Boomgard, Peter. 1987. "Forest and Forestry in Colonial Java 1677 – 1942", makalah yang dipresentasikan pada *Conference on Environmental History of Pacific*, Canberra, Australia.

Boomgard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1886*. Jakarta; Djambatan.

Borras, Saturnino Jr, Mark Edelman, Cristobal Kay (ed). 2008. *Transnational Agrarian Movement Confronting Globalization*. London. Blackwell.

Boxer, C.B. 1983. *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602 – 1799*, Jakarta: Sinar Harapan.

Cribb, Robert. 2001. Tahun. "Genocide in Indonesia 1965-1966", *Journal of Genocide Research 2001*, No. 3, halaman 219-239.

Cribb, Robert (Ed). 2003. *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Desmarais. 2002. *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasant*. Point Black, NS and London; Fenwood Books & Pluto Press.

Dewan Koperasi Indonesia. 1950. *Dokumen Sejarah Koperasi Indonesia*. Arsip No.002.

Dewan Koperasi Indonesia. 1962. *Pokok-Pokok Pikiran Ekonomi Wilopo*. Arsip DKI.

Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian. *Statistik Perkebunan 2010*, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit 2010*.

Djojohadikoesoemo, Margono. 1940. *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. Balai Poestaka Batavia Centrum.

Djojohadikoesoemo, Soemitro. 1957. *Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Pembangunan.

- Djohan, Djabarudin. 2011. *Wajah Koperasi Indonesia*. Jakarta: LPS2I
- Edelman, Mark. 2001. *Social Movement: Changing Paradigms and Forms of Politic*. Annual Review of Anthropology 2001; 30.
- Elsbree, Willard. 1953. *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist movements, 1940 – 1945*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Elson, R.E. 2005. *Constructing the Nation: Ethnicity, Race Modernity and Citizenship in early Indonesian Thought*, dalam *Asian Ethnicity*.
- Farid, Hilmar. 2005. "Indonesia's original sin: mass killings and capitalist expansion 1965-1966". *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 6, Number 1.
- Firmasnyah, Aritonang, Hegel Terome, Nanang Hari, Syaiful Bahari. 1999. *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia*, Sekretarian Bina Desa dan YAPPIKA, 1999
- Furnival. 2008. *Hindia Belanda, Studi ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Geheim, Mailrapporten. 1920. No. 510X/19, *Algemeene Rijksarschieff (ARA)*, Den Haag, Netherland.; dan *Kaoem Moeda* No.27, 9 Februari.
- Gerakan Tani Indonesia. 1957. *Materi-materi pendidikan perkoperasian, dokumen pengajaran pendidikan tani*. Bogor: Pusat pendidikan Gerakan Tani Indonesia.
- Ginting, Budiman. 2007. "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia," dalam *Jurnal Equality* Vol.12 No.2 Agustus.
- Hadiz, Vedi, dan Daniel Dakhidae (ed). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta, Equinox publishing.
- Hajati, Chusnul. 1996. "The Tragedy of Cimareme: the Resistance of Haji Hasan to the Colonial Power in 1919". *SI* vol 3. No. 2.
- Hardiyanto, Andik, Noer Fauzi Rachman, dan Dianto Bachriadi. 1996. Sistem Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Indonesia dalam *Agenda Land Reform di Indonesia Sekarang*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Hatta, Mohammad. 1954. *Kumpulan Karangan (Jilid 3)*. Jakarta: Penerbit Balai Buku Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeri ku*. Jakarta: Kompas.

Heijboer, Pierre. 1998. *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945 – 1949*. Jakarta: Grasindo.

Husken, Frans dan Benjamin White. 1989. “Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa”, dalam *Prisma*, No. 4.

Hindley, Donald. 1964. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. Berkeley: University of California Press.

Iskandar, Mohammad. 2001. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Jacoby, Eric. 1961. *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay: Asia Publishing Co.

Jones, F.C. 1954. *Japan's New Order in East Asia: Its Rise and Fall, 1937-1945*. London: Oxford University Press.

Kahfi, Erni Hayant. 1997. “Islam and Indonesian Nationalism: The Political thought of Haji Agus Salim”. *SI* vol 4, no 3.

Karel. A. Steenbrink. 1986. *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Kartodihardjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500 – 1900, dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta. Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta, Penerbit Aditia Media.

Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movements in Rural Java*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1988: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*. Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta, Pustaka Jaya.

Kerkhof, Jasper van de. 2005. *Dutch Enterprise in Independent Indonesia: Cooperation and Confrontation, 1949-1958*. IIAS News Letter, Maret.

Kobayashi, Yasuko. 1997. “Kyai and Japanese Military”. *SI* vol 4, no. 3.

Kooiman, Dick, Otto van Den Muijzenberg, dan Peter Van Der Veer (ed). 1984. *Conversion, Competition, and Conflict: Essays on the role of Religion in Asia*. Amsterdam: Free University Press.

Kuntowijoyo. 2002. *Radikaliasi Petani: Esai-Esai Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya

Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kurosawa, Aiko. 1987. "Propaganda Media on Java Under the Japanese 1942-1945". Dalam *Jurnal Indonesia*. No. 44. Oktober.

Kurts, Marcus J. 1992. *Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case*. Theory and Society 29: Kluwer Academic Publisher.

Kusumah, Mulyana W. 1987. "Realitas Suram Hak Berserikat", dalam *Tanah Air*, Tahun. 1 No.2 Edisi Januari.

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics* (Second Edition). London, Verso.

Laporan kehutanan, 1986. Departemen Kehutanan, .

Lev, Daniel S. 1966. *The Transition to Guided Democracy in Indonesia, 1957 – 1959*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.

Lounella, Anu dan R. Yando Zakaria (Eds.). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist Press bersama KARSA.

Lukacs, Anton, dan Carol Waren, "The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia", *Indonesia*, no 76, October 2003.

Lukmanudin, Ibang. 2001. "Mari Bung Rebut Kembali, Rakyat Sagara Menuntut Hak atas Tanah", dalam *Mengubah Ketakutan menjadi Kekuatan, Kumpulan Kasus-kasus Advokasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2001.

Lyon, Margo L. 2009. "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.) *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Yayasan Obor.

Mackie, J.A.C. 1971. The Indonesian Economy 1953 – 1963, dalam Bruce Glassburner (ed). *The Economy of Indonesia: Selected Reading*. Ithaca: Cornell University Press.

Majalah Tempo, Edisi Khusus 80 Tahun Sumpah Pemuda, 27 Oktober 2008

Malaka, Tan. 2003. *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok.

Mazoyer, M. dan L Roudart. 2006. *A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to the Current Crisis*. New York; Monthly Review Press.

Mc Charty, John. D. dan Mayer. N. Zeld. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, Vol. 82 (1977)

Mc Coy, Alfred (ed). 1986. *Southeast Asia Under Japanese Occupation*. Yale: University Southeast Asian Studies. Working Paper no.41.

Mc Vey, Ruth. 2010. *The Rise of Indonesian Communism*. Cornell University press. Versi bahasa Indonesia Ruth T Mc Vey. 2010 *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Mortimer, Rex Mortimer. 1972. "The Indonesia Communism and Land Reform 1959-1965", *Monash Papers on Southeast Asia*, No. 1.

Mortimer, Rex. 1974. Traditional Modes and Communist Movement: Change and Protest in Indonesia, dalam John Wilson Lewis (ed). *Peasant Rebellion and Communist Revolution in Asia*. Stanford University Press.

Mosse, Adam. 2007. *Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty*. Working Paper 107. Chronic Poverty Research Centre.

Mouffe, Chantal. 2000. "Hegemony and New Political Subjects: Toward A New Concept of Democracy" dalam Kate Nash. (Ed). 2000. *Readings in Contemporary Political Sociology*. Oxford, Blackwell.

Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 – 1980*. Jakarta: LP3ES.

Nasution, A.H. 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Gerilya*. Jakarta: Gunung Agung.

Nurjaya, I Nyoman. 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. Malang: Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No.1, Maret.

Ojong, P.K. 2004. *Perang Eropa Jilid II*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

PBNU. 1976. *Risalah Sejarah Nahdhatul Ulama*. Pusat Dokumentasi Nahdhatul Ulama.

Peigie, J. 2004. *Revolusi Agraria, Gerakan Sosial, dan Pertanian Eksport di Negara-negara Dunia Ketiga*. Yogyakarta. Pedati.

Pelusso, Nancy. 1992. *Rich Forest Poor People. Resource Control an Resistance in Java*. Univ. California Press.

Penders, DR. C.LM. 1984. *Bojonegoro 1900-1942. A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapore. Gunung Agung.

Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform Dari Masa ke Masa*. Bogor. Tanah Air Beta.

Rachman, Noer Fauzi. 2005 *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta, Insist Press.

Rachman, Noer Fauzi. 2008 *Nyageurkeun Nu Paremeun*. Dokumen pendidikan Paguyuban Guru Reforma Agraria. *Tidak diterbitkan*.

Rahardjo, Dawam. 1985. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

Ravesteyn, W. Van. 1928. *De Wording van het Communisme in Nederland* (Perkembangan Komunisme di Belanda). Amsterdam.

Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ricklefs, M.C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

Rossa, John. 2006. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.

S. Dingley, *Gerakan Sosial di Indonesia*, tidak di terbitkan. Dalam versi aslinya *Peasant Movement in Indonesia*. (pertama terbit tahun 1927)

S.J, Budi Susanto . 2007. (ed). *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: Kanisius.

Sangaji, Arianto. 2002. *Buruk Inco Rakyat di Gusur, Ekonomi Politik Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sastra, Entang. 1985. *Pembangunan Koperasi, Teori dan Kenyataan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Sato, Shigeru. 1994. *War, Nationalism and Peasant; Java Under the Japanese Occupation, 1942-1945*. St Leonards NSW: Asian Studis Association of Australia in Association with Alien & Unwin. 1994

Serikat Petani Indonesia. 2010 *Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan, dan Pembaruan Agraria*.

Soemarjono, Maria S.W. Soemarjono. 2002. "Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan", Makalah pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28 Maret.

Soetrisno, Loekman. 1997. *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.

Stanley. 1994. *Seputar Kedung Ombo*. Jakarta: Elsam.

Stoler, Ann. 1995. *Capitalism and Confrontation in Sumatra Plantation Belt. 1870-1979*. University of Michigan Press.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sumodiwiryo, Teko. Tanpa tahun. *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: GKBI.

Suryo, Djoko. 1991 “Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu dan Masa Datang” dalam *Prospek Pedesaan 1990*. Yogyakarta: P3PK-UGM.

Sutter, John O. tahun. *Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institution of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of the General Election, 1940 – 1955*. Disertasi Ph.D Cornell University.

Taintor. Marvin Bunker. 1979. *An Ecological Model of Peasant Revolution: The Indonesian Communist Experience, 1952-1965*. Ph.D. Dissertation. New York State University.

Tauchid. Mochamad. 2011 *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, terbitan ke-4 oleh Yayasan Bina Desa, Jakarta.

Tauhid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria. Sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Sajogyo Institute dan STPN Press.

Taylor, Jean Gelman. 1983. *Social World of Batavia: European and Euroasian in Dutch Asia*. Madison: Univ of Wisconsin Press.

Thomas, Kenneth D dan Bruce Glassburner. 1965. *Abrogation, Take Over and Nationalization: The Elimination of Dutch Economic Dominance From The Republic of Indonesia*. Australian Outlook, Volume 19.

Tilly, Charles. 1976. *The Vende*. London, Harvard University Press.

Tilly, Charles. 1984. “Social Movement and National Politics” dalam C. Bright and Sandra Harding (Eds). 1984. *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. Ann-Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Toer, Pramoedya Ananta. 2002. *Kronik Revolusi Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Toer, Pramoedya Ananta. 2001. (ed) didalam H. Mukti. *Hikayat Siti Mariah*. Jakarta: Dipantara.

Utrecht, Ernest. 1982. "Land Reform in Indonesia", *Buletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. V, No. 3.

Van Niel, Robert. 1960. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Hagg.

Wahono, Francis (ed). 2006. *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan Sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta. Cindelarar. 2006.

Waseda, University. Okuma Memorial Social Sciences Research Institute. 1963. *Japanese Military Administration in Indonesia*. Washington DC. US Department of Commerce.

Williams, Michael C. 2009. *Sickle and Crescent: The Communist Revolt 1926 in Banten*. Equinox Publishing.

Wiradi, Gunawan, dan Tjondronegoro (ed). 2009. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Wolf, Eric. 1969. *Peasant War in Twentieth Century*. New York, Harper and Row.

YLBHI. 1991. *Demokrasi Masih Terbenam; Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991*. YLBHI.

YLBHI. 1992. *Demokrasi di Balik Keranda; Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia 1992*. YLBHI.

Zara, Yuanda. 2009. *Peristiwa 3 Juli 1946*. Yogyakarta: Azza Grafika.

Zed, Mestika. 2004. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927*. Yogyakarta: Syarikat.

<http://ilhamaidit.wordpress.com/2007/12/25>.

[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40)

<http://tokohitamblackchamber.blogspot.com/2011/06/dokumen-kumpulan-agraria-partai.html>.